

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH KEBUDAYAAN SULAWESI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1995

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PERMUSEUMAN

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH KEBUDAYAAN SULAWESI

Tim Penulis :

Mukhlis P.

Edward Poelinggomang

Abdul Madjid Kallo

Bambang Sulistio

Anwar Thosibo

Andi Maryam

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA**

1995

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PERMUSEUMAN

No. INDUK : 235/669

KLASIFIKASI:

ASAL : H

26/12-95

SEJARAH KEBUDAYAAN SULAWESI

Penulis : Mukhlis P.
Edward Poelinggomang
Abdul Madjid Kallo
Bambang Sulistio
Anwar Thosibo
Andi Maryam

Penyunting : DR. R.Z. Leirissa

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta, 1995
Edisi 1995

Dicetak oleh : **cv. Dwi Jaya Karya, Jakarta**



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Disamping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya ini dikemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun

tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 1994 / 1995.

Penelitian dan penulisan *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* ini merupakan studi lanjutan dari penulisan sejarah-sejarah kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Pada tahap awal sudah dilakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap sejarah kebudayaan Jawa dan Kalimantan, dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.

Buku ini memuat uraian tentang kebudayaan prasejarah di Sulawesi, kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Maritim, kebudayaan agraris, kebudayaan Islam dan agam-agama lain, serta pengaruh Barat di daerah tersebut.

Dengan diterbitkannya *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* ini diharapkan akan memperkaya khasanah kesejarahan dan memberi embaran yang memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Di samping itu diharapkan akan menjadi semacam acuan untuk dapat meningkatkan kesadaran sejarah generasi penerus

terhadap gagasan-gagasan dan karya-karya budaya yang pernah ada di dalam masyarakat.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini disampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Ohorella', with a horizontal line underneath.

Dra. GA. Ohorella

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Pewarisan Internal	3
1.2 Faktor Ekstern Dalam Pewarisan Budaya Daerah Sulawesi	5
1.3 Masa Depan Budaya Daerah Sulawesi	8
Bab II Kebudayaan Prasejarah	11
2.1 Profil Ekologi Sulawesi	11
2.2 Penduduk dan Mata Pencanharian	13
2.3 Hasil Budaya Zaman Prasejarah	17
2.3.1 Zaman Batu Tua	18
2.3.2 Zaman Batu Tengah	20
2.3.3 Zaman Batu Muda	23
2.4 Kebudayaan Megalit dan Perundangian	24
2.4.1 Pengertian Kebudayaan Megalit	24
2.4.2 Teras Pertama	28
2.4.3 Teras Kedua	28
2.4.4 Teras Ketiga	29
2.4.5 Teras Keempat	29
2.5 Religi dan Kepercayaan Tradisional	30

2.5.1	Kepercayaan Alub Todato	31
2.5.2	Kepercayaan Toani Tolatang	32
2.5.3	Kepercayaan Patuntung	33
2.5.4	Pranata Keagamaan	34
Bab III	Kebudayaan Abad XIV -- XVII	
3.1	Kota Pantai	40
3.2	Kerajaan-kerajaan Maritim	45
3.3	Birokrasi Pemerintahan	52
3.4	Pola-Pola Ekonomi	57
3.5	Kehidupan Sosial dan Politik	63
Bab IV	Kebudayaan Abad XVII -- XIX	
4.1	Kebudayaan Agraris	75
4.2	Islamisasi Sufisme dan Gerakan Sosial	89
4.3	Misi dan Zending	95
Bab V	Pengaruh Barat	
5.1	Perkembangan Birokrasi Kolonial	109
5.2	Pendidikan di Masa Kolonial	119
5.2.1	Pendidikan Tradisional	119
5.2.2	Pendidikan Islam	123
5.2.3	Pendidikan Barat	126
5.3	Pendidikan Nasional	133
5.3.1	Pendidikan Sekolah Rakyat	136
5.3.2	Pendidikan Menengah	137
5.3.3	Perkembangan Perguruan Tinggi	138
5.3.4	Konsep-konsep Lokal Dalam Budaya Sulawesi	140
Daftar Pustaka	150

BAB I

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah perwujudan dari sebuah renungan, kerja keras dan kearifan suatu masyarakat dalam mengarungi dunianya. Kebudayaanlah yang menjadikan suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna. Dengan format budaya pula masyarakat menata alam sekitarnya dan memberikan klasifikasi, sehingga berarti bagi warganya dan dengan begitu tindakan terhadap alam sekitarnya itu terorientasikan. Masyarakat pula memilamilah anggota-anggota masyarakat ke dalam kelompok-kelompok menurut penggolongan tingkat dan lapisan sosial dalam masyarakat. Setiap tingkat, golongan, derajat-derajat dalam masyarakat dibedakan oleh sistem simbol dan titulatur. Simbol dan titulatur dalam masyarakat dan makanan yang dikonsumsi tidak hanya beraneka jenisnya tetapi juga diatur, dengan kata lain, karena kebudayaanlah maka lingkungan sekitar masyarakat dan realitas di dalam masyarakat itu sendiri diatur dan mendapatkan arti.

Banyak orang beranggapan bahwa ekonomi, politik, teknologi, religi dan sebagainya termasuk unsur-unsur kebudayaan. Pemahaman semacam itu sebenarnya tidak mengungkap lebih dalam apa yang dikandung oleh kebudayaan. Memang benar bahwa ekonomi, politik, kesenian, religi dan sebagainya itu adalah kebudayaan karena persepsi maknawi yang terkandung di dalamnya merupakan kebudayaan. Ekonomi, politik, teknologi, kesenian, religi dan sebagainya itu mengandung dan mencerminkan

makna, dan makna itulah kebudayaan. Struktur politik dan ekonomi yang memberi kedudukan tertentu pada sekelompok anggota masyarakat tertentu, mencerminkan pula kebudayaan kelompok atau lapisan tertentu. Karena dengan kedudukan/penggolongan itu terwujudlah sistem dan perilaku politik-ekonomi. Dunia realitas politik-ekonomi tersebut akan lain sama sekali dipersepsikan oleh lapisan masyarakat lain.

Dengan demikian maka kebudayaan adalah kerangka persepsi yang penuh makna dalam struktur dan perilaku. Apa yang ada dalam realitas mengandung makna dan diberi makna, atau dengan lebih abstrak dapat dikatakan tidak ada yang bebas budaya. Politik, ekonomi iptek, hidup keagamaan, kesenian dan sebagainya tidaklah bebas makna. Semuanya diwarnai oleh kebudayaan.

Dalam rangka pemikiran kebudayaan demikian itu, bagaimanakah persepsi masyarakat pendukung Budaya Sulawesi terhadap warisan budayanya. Sebagai suatu warisan perlu diketahui bagaimana proses pengalihan budaya berbagai etnis di Sulawesi dan apa yang dialihkan. Hal ini penting karena harus difahami bahwa tidak ada yang secara seratus persen atau mutlak diwariskan oleh generasi dahulu kepada generasi berikut. Tiap generasi, bahkan tiap kelompok dalam suatu masyarakat, secara khas memberi makna kepada dunianya, dan permaknaan itu sendiri bercorak dinamis artinya dapat berubah. Dengan demikian, pewarisan budaya sekaligus berarti pula sampai kadar tertentu mengandung pengembangan budaya. Kebudayaan sebagai sistem yang lahir dari respons suatu masyarakat terhadap dunianya, dan itu akan berubah bila terjadi perubahan dalam lingkungan realitas empiriknya. Kebudayaan yang senantiasa memberikan respons terhadap lingkungannya akan merumuskan pemaknaannya terhadap realitas empirik yang berubah itu. Karena itu perubahan realitas dapat mempengaruhi perubahan kebudayaan.

Jika kita mau menengok kembali perjalanan sejarah Kebudayaan Sulawesi yang panjang dan mengagumkan itu, sejak zaman "*Megalitik*", sehingga sekarang. Betapa deras harus perubahan yang menerpa Pulau Sulawesi. Betapa realitas empirik yang para pendukung kebudayaan berbagai etnik di Sulawesi mengalami berbagai pergeseran. Dan sekarang apalagi yang masih tersisa sebagai warisan budaya. Kalau kita mencoba merenungkan hal itu dan meninjaunya dari segi

penyaringan dan pemeliharaannya oleh masyarakat pendukungnya dalam hal ini manusia Sulawesi. paling sedikit dapat dikemukakan dua hal alternatif sbb.:

- (1) Terjadi pewarisan budaya yang berlangsung dikalangan masyarakat secara internal.
- (2) Terjadi pewarisan budaya yang melibatkan pihak luar sebagai eksotikkultur.

Alternatif kedua dapat terjadi juga melalui dinamika dari kegiatan implementasi pembangunan.

1.1 Pewarisan Internal

Jika perkembangan dan dinamika dalam suatu masyarakat masih mampu menangani dan mengelola realitas dan persoalan yang timbul dengan berhasil, artinya dapat memberikan jawaban dan pemecahan yang memuaskan bagi warganya, maka pewarisan budaya yang dapat disaksikan adalah proses pengalihan kebudayaan yang kurang mengandung unsur-unsur perubahan dari apa yang telah dimiliki oleh gemlampaui.

Kebudayaan Sulawesi yang sampai kini dimiliki oleh masyarakat berbagai ethnisk di Sulawesi, telah teruji efektivitasnya dalam menjawab dan memecahkan tuntutan dan perkembangan kehidupan nyata dalam masyarakat dilakukan melalui berbagai lembaga sosialisali. Pola perilaku dalam daur hidup masyarakat mendukung proses pendidikan dan sosialisasi yang memperkokoh kesinambungan budaya daerah Sulawesi. Berbagai ritual dalam budaya berbagai ethnisk di Sulawesi, mulai dari masa hamil, kelahiran anak, peralihan kedewasaan, perkawinan, sakit, kematian dan kegiatan berkenaan dengan berbagai acara kematian menjadi ajang penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi bagi warga masyarakat di Kepulauan Sulawesi. Berbagai kegiatan hidup lain, seperti usaha tani dan nelayan, organisasi sosial (politik dan pemerintahan), interelasi sosial, penyelesaian konflik, penggalangan kerjasama, kegiatan rekreasi, seni dan sebagainya semuanya berfungsi sebagai wahana menyelenggarakan sosialisasi demi mengkomunikasikan pemahaman dan penerapan kebudayaan.

Proses sosialisasi yang mendukung pewarisan budaya dalam masyarakat di empat propinsi Sulawesi didukung oleh corak budayanya yang menonjolkan sifat keterpaduan. Kebudayaan masyarakat semacam itu menunjukkan bahwa berbagai bidang hidup berhubungan satu dengan yang lain dan tak terpisahkan dengan persepsi tentang hubungan emosional mereka yang sangat kuat dalam etika *anak celebes**.

Dalam proses pewarisan budaya yang berlangsung di Pulau Sulawesi berbagai peluang-peluang yang muncul bagi terjadinya perubahan. Karena munculnya perubahan pada realitas empirik dalam sejarah masyarakat Sulawesi akan tampak dengan jelas.

Bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk yang bermigrasi keluar dari wilayah budaya sendiri cenderung meneruskan dan memelihara penggunaan bahasa daerah seperti yang dikuasai oleh generasi yang pindah awal. Sementara di wilayah budaya asal, bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk yang tetap tinggal disana mengalami perkembangan yang tidak dialihkan kepada kelompok yang telah berpindah. Akibatnya, dapat disaksikan perbedaan makna istilah, ungkapan dan nuansa bahasa yang terjadi antara dua kelompok itu ; penggunaan bahasa daerah dari kelompok yang keluar itu dinilai lebih jarang dibandingkan dengan kelompok yang tetap tinggal di wilayah budaya sendiri. Gejala yang sama juga dapat ditunjukkan oleh sistem perkawinan, upacara keagamaan, arsitektur rumah, dan sebagainya. Lihatlah misalnya orang-orang Mandar yang berbicara dengan bahasa Mandar tetapi berirama Banjar di Samarinda, atau orang-orang Minahasa di Jakarta dengan gaya bahasa Betawi-Manado dll. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang mendorong kelompok migran untuk tetap melanjutkan pola budaya lama dalam bidang-bidang hidup tertentu di daerah bukan wilayah budayanya itu.

Dalam menghadapi realitas empirik yang sudah mulai berubah seperti diuraikan diatas, maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi pada warga masyarakat yang bersangkutan. Kaum tradisional yang tetap bersikeras mempertahankan implementasi kebudayaan yang sudah dimiliki dan melancarkan penjelasan-penjelasan tertentu terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sebagai berkaitan dengan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari adat kebiasaan.

Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah munculnya upaya-upaya penggunaan teknologis di kalangan warga masyarakat. Upaya tersebut bisa berhasil, bisa gagal, tetapi bisa juga untuk sementara atau sebahagian saja berhasil. Namun, bila kecenderungan ini terjadi, maka itu sebuah pertanda akan timbulnya suatu proses sekularisasi dan diferensiasi awal dalam masyarakat dan pendukung budaya Sulawesi yang sangat terkenal karena dimensi-dimensi hidupnya terkait secara integral dan erat hubungannya dengan sistem kepercayaan.

Dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan Sulawesi yang demikian itu, selalu ada peluang bagi terjadinya perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat sendiri, dan peluang-peluang itu telah terbuka sejak orang-orang Mandar di Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis, orang Sangir, orang Buton, Minahasa, orang-orang Makassar melakukan kontak dengan budaya luar. Nakhoda Mandar yang amat terkenal di abad ke 18 - 19, tidak hanya melakukan tawar menawar dengan budaya luar, melainkan telah mengambilnya dan membawanya pulang ke Mandar, demikian juga dengan orang Bugis, Makassar, Buton, Sangir, Minahasa dll.

Namun, bila ditelaah proses pewarisan budaya secara internal yang terjadi di Pulau Sulawesi tampak lebih dominan fungsi pemeliharaan budaya, sementara fungsi penyaringan lebih mendukung kelanjutan pemeliharaan budaya yang telah dimiliki. Dalam keadaan demikian itu berarti *dinamika* masyarakat Sulawesi *perlu dipacu*. Pemilihan kata perlu dipacu, mungkin lebih baik jika harus mengatakan bahwa terjadi kemandekan dinamika budaya di Pulau Sulawesi

1.2 Faktor Ekstern dalam Pewarisan Budaya Daerah Sulawesi

Jika dalam realitas empirik kehidupan suatu masyarakat banyak mengalami perubahan itu berarti kemampuan budaya yang dimiliki oleh masyarakat bersangkutan berhasil atau mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap persoalan-persoalan yang timbul, akan tetapi perlu diketahui bahwa lama kelamaan masyarakat itu makin lemah. Dalam situasi seperti itu sudah kelihatan kemacetan kebudayaan. Teknologi yang ada dan sudah dikembangkan dalam lingkungan sendiri tidak lagi dapat memberikan respons yang tuntas. Situasi obyektif menunjukan bahwa adalah tepat saatnya untuk melancarkan perubahan.

Memang dalam kenyataan sering kali disaksikan bahwa pada saat kesempatan untuk introduksi perubahan muncul, sementara tindakan penerapan upaya perubahan tidak terjadi. Jadi, peluang untuk mengintroduksi perubahan kedalam suatu masyarakat akan tepat saatnya bilamana pihak yang ingin menawarkan alternatif itu mengetahui dalam segi apa kebudayaan masyarakat yang bersangkutan mengalami kemacetan karena tidak mampu lagi memberikan jawaban memuaskan kepada persoalan yang dihadapi warga masyarakat tersebut. Dalam keadaan seperti ini Masyarakat Sulawesi memerlukan tokoh yang memaklumi kekuatan etnik yang ada dalam budaya dan masyarakat Sulawesi di empat propinsinya.

Bagaimana proses perubahan kebudayaan itu berlansung ?

Dari contoh yang dikemukakan diatas peluang untuk mengadakan perubahan kebudayaan terbuka lewat munculnya perubahan dalam realitas empirik. Bila perubahan realitas empirik yang membawa promblem diupayakan pengatasannya dengan mengimplementasikan suatu teknologi baru (baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak), maka suatu relitas baru tercipta. Proses pengenalan teknologi baru dan penerapannya dalam masyarakat yang tadinya mengalami permasalahan bukan saja memecahkan masalah, tetapi situasi baru yang kini tercipta itu pada gilirannya menghadapkan suatu realitas empirik lain yang sampai keadaan tertentu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada posisi itu realitas empirik yang telah berubah itu memiliki otonomi tertentu yang akan mempengaruhi masyarakat. Terhadap situasi baru itu masyarakat yang bersangkutan memberi makna. Makna yang dikenakan terhadap realitas empirik yang berubah itu merupakan perubahan kebudayaan. Pemaknaan baru (defenisi situasi) tersebut sampai derajat tertentu dipengaruhi oleh konteks realita empirik yang telah berubah tetapi juga sekaligus oleh latar belakang budaya yang secara totalitas masih dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Upaya pembangunan seringkali tidak memperhitungkan peluang-peluang yang tepat sekali pun wawasan etik sangat dominan dalam dialog kultural. Ini tidaklah berarti bahwa upaya dari luar yang kurang mencari peluang tepat itu tidak berhasil mengubah kebudayaan Mandar. Introduksi teknologi baru dalam industri sarung mandar atau teknologi perikanan misalnya mungkin bisa berhasil diterima para penenun dan

nelayan, karena jumlah produksi dapat ditingkatkan. Hanya saja persoalan yang ditimbulkan oleh adopsi teknologi itu tidak ditangani, yaitu pemasaran belum dikembangkan mengantisipasi perubahan teknologi. Introduksi perubahan yang tidak diletakan dalam kaitan integral dalam posisi industri akan gagal membawa perubahan bahkan mungkin menimbulkan masalah baru. Pemecahan sektoral tidaklah memuaskan. Pewarisan budaya karena kontak dengan luar belum tentu dapat diintegrasikan dalam masyarakat penerima, bilamana unsur yang diambil alih tidak diletakan dalam hubungan menyeluruh dengan berbagai segi kehidupan masyarakat penerima.

Dalam dialog antara realitas empirik dan kerangka makna, maka kebudayaan masyarakat akan ditawari peluang perubahan yang makin rumit apabila perubahan realitas dalam rangka pembangunan bukan saja berupa perubahan realitas fisik melainkan bersamaan dengan itu ditawarkan juga interpretasi baru mengenai realitas tersebut. Jadi ada dua tawaran, yaitu situasi empirik yang berubah dan pemaknaan tentangnya. Terhadap kedua hal itu kebudayaan-kebudayaan lokal dalam hal ini kebudayaan Daerah Sulawesi akan membangun makna baru. Memang respons masyarakat belum tentu akan sesuai dengan tawaran pemaknaan yang disertakan dengan perubahan realitas empirik tersebut. Yang lebih sering terjadi dalam implementasi pembangunan adalah perubahan realitas empirik akibat pembangunan berlansung tanpa didampingi pemaknaan yang sebenarnya ingin memperkenalkan lewat perubahan realitas tersebut. Akibatnya, pemaknaan terhadapnya dikembangkan sendiri oleh masyarakat setempat. Begitulah dapat disaksikan terjadinya pembangunan yang membawa perubahan teknologi, sementara akibat-akibat lain diluar teknologi (baik yang sosial maupun yang persepsioanal) tidak turut digarap; masyarakat setempatlah yang harus mengembangkan sendiri penangannya. Apapun yang terjadi, proses itu berakibat terjadinya perubahan kebudayaan.

Kebudayaan Sulawesi seperti yang kita ketahui bukanlah kebudayaan terisolasi. Kebudayaan dari berbagai ethnisk di Sulawesi dewasa ini menghadapi sorotan dan fokus dari berbagai media massa dan intensitas kontak-kontak dengan pihak luar lewat perdagangan dan pariwisata. Keadaan itulah yang membuat masyarakat Sulawesi mempunyai peluang yang lebih luas untuk mempertimbangkan alternatif-

alternatif untuk memilih cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Dalam masyarakat seperti itu sering kali pula dapat disaksikan peranan instansi formal dalam menentukan dan mengatur serta mengorganisasikan berbagai kegiatan masyarakat. Dalam hubungan dengan itu salah satu contoh dapat dikemukakan, yaitu instansi formal dalam mengorganisasikan kesenian rakyat. Pengorganisasian kesenian rakyat oleh instansi formal mungkin dapat memperlambat proses pewarisan budaya lewat kesenian rakyat dalam arti sepenuhnya. Pengorganisasian kesenian rakyat oleh instansi formal dapat menciutkan essensi rakyat yang dinilai kasar, rendah dan sepele diorganisasikan oleh instansi formal, kemudian diberi kemasan baru supaya mencapai tingkat seni istana yang anggun, halus dan tinggi. Campur tangan instansi semacam itu dapat menjadi kendala proses pewarisan budaya kesenian rakyat yang pada hakekatnya berbeda daripada kesenian dalam tradisi baru.

Tetapi sebaliknya peranan besar dari instansi formal yang mengorganisasikan kegiatan masyarakat itu dapat berpengaruh sekali dalam menyalurkan persepsi dan program formal. Kalau demikian halnya, maka peranan instansi formal bukanlah menjamin terjadinya proses pewarisan budaya masyarakat (misalnya lewat kesenian rakyat), tetapi manfaat dan pengubah fungsi kesenian rakyat itu, perlu disadari dan diantisipasi konsekuensi-konsekuensinya.

Pewarisan budaya yang terjadi dalam kontak dengan luar ini, fungsi penyaringannya akan lebih menonjol daripada fungsi pemeliharaan. Untuk melakukan penyaringan, maka perimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dialog budaya akan menentukan. Dalam masa pembangunan yang menunjukkan peranan dominan dan menentukan dari negara, posisi negara berada pada tempat yang lebih kuat dalam relasi yang tak seimbang dengan pihak-pihak lain. Kedudukan itu bisa menguntungkan tetapi tidak senantiasa mendukung proses pewarisan budaya yang wajar.

1.3 Masa Depan Budaya Daerah Sulawesi

Pewarisan kebudayaan Sulawesi, sebagaimana pewarisan budaya berbagai kelompok masyarakat lain di tanah air akan berfungsi bagi pengembangan kebudayaan bangsa, bergantung kepada interpretasi yang

kita berikan kepada kebudayaan bangsa itu. Bila kebudayaan bangsa juga mencangkup sistem pemaknaan dan cara bangsa kita merespons berbagai permasalahannya, maka makin terpelihara keaneka ragaman kebudayaan masyarakat-masyarakat warga bangsa ini untuk mencobakan pemecahan-pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Penyeragaman kebudayaan akan menghapuskan kekayaan alternatif, sementara mendorong perkembangan keanekaragaman menyediakan sumber alternatif bagi pengembangan kebudayaan bangsa dan pengembangan kebudayaan-kebudayaan daerah. Daya cipta dan perkembangan budaya berkat pewarisan budaya demi menghasilkan jawaban baru terhadap persoalan dan masalah perlu bersikap terbuka kepada pemanfaatan semua sumber yang dapat menyumbang, baik dari sesama kebudayaan lokal lain, kebudayaan nasional, maupun sumber-sumber lain yang tersedia (termasuk kebudayaan asing). Tawaran jawaban baru tidak hanya datang dari satu sumber (misalnya : kebijakan nasional) saja.

Dalam dialog kultural itu, maka kebudayaan daerah dapat memberi sumbangan kepada kebudayaan bangsa. khususnya dalam era pembangunan, maka pelaksanaan pembangunan di berbagai masyarakat daerah di Indonesia akan mengajarkan kepada kita tentang pengembangan kebudayaan pembanguna itu sendiri. Mengidentifikasi peranan budaya daerah dan proses pewarisan yang terjadi dilingkungan kebudayaan lokal bagi perkembangan kebudayaan bangsa, yaitu menawarkan alternatif-alternatif kepada penanganan masalah nasional. Ini berarti bahwa keanekaragaman kebudayaan di tanah air kita adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Kearah itulah kebudayaan Daerah Sulawesi menuju.

Catatan

*) Celebes adalah nama lain dari Pulau Sulawesi

BAB II

KEBUDAYAAN PRASEJARAH

2.1 Profil Ekologi Sulawesi

Arnold J. Toynbee seorang ahli antropolog pernah melakukan penyelidikan terhadap 30 kebudayaan di dunia menyatakan bahwa suatu kebudayaan terjadi atau dilahirkan karena adanya tantangan dan jawaban (*challenge-and-Response*), yaitu antara manusia dan alam sekitarnya. Dalam alam atau lingkungan yang baik, manusia akan berhasil mendirikan suatu kebudayaan seperti di Eropa, begitupun terhadap lingkungan alam sekitar yang telah berhasil dikuasai oleh manusia akan timbul suatu kebudayaan¹.

Terlepas dari perdebatan terhadap teori yang dikemukakan oleh Arnold J. Toynbee, yang jelas bahwa keadaan kondisi lingkungan dianggap mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kebudayaan, karena keberadaan manusia secara fisik mempunyai kaitan langsung dengan alam sekitarnya. Lingkungan dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia sedemikian rupa, demikian pula sebaliknya pola tingkah laku manusia dapat merombak keadaan lingkungan alam sekelilingnya. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara lingkungan dengan manusia dan pola aktivitas yang dimanifestasikan dalam pola tingkah laku adalah hubungan keserasian dan keseimbangan secara linear.

Meskipun lingkungan mempunyai hubungan yang erat dengan kebudayaan manusia, tetapi terdapat ahli ekologi beranggapan bahwa hanya lingkunganlah yang dapat menentukan budaya manusia, bukan manusia itu sendiri yang menentukannya; manusia pada dasarnya bersifat pasif sehingga ia tidak dapat menentukan pola aktivitasnya. anggapan yang demikian itu tentu saja tidak dapat diterima secara utuh, namun pengaruh lingkungan terhadap pola tingkah laku manusia tidak dapat dipungkiri. Demikian pula bahwa faktor manusia dapat merubah lingkungan baik sebagian atau secara keseluruhan.

Manusia Sulawesi pada zaman prasejarah hidup ditengah-tengah lingkungan yang masih liar dan setiap saat mereka dapat ancaman baik yang berasal dari kelompok manusia, maupun yang datang dari binatang buas dan bencana alam. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari berbagai ancaman tersebut tentu diperlukan adanya penaklukan-penaklukan terhadap keadaan yang masih liar itu, dan selanjutnya mengadakan adaptasi terhadap alam sekitarnya. Hal demikian perlu dilakukan mengingat wilayah pulau Sulawesi umumnya terdiri dari gunung-gunung yang menjulang tinggi dan dibatasi oleh lembah-lembah yang terjal dengan hutan-hutan rimba yang ditumbuhi bermacam-macam jenis tumbuhan serta dihuni oleh berjenis-jenis binatang buas. Di sana sini didapati daratan tinggi yang sempit dan daratan rendah yang tidak begitu luas, baik pada daerah yang terletak di sepanjang pantai, maupun pada daerah-daerah pedalaman.

Bila melihat keadaan geologinya, maka Pulau Sulawesi merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang bentuknya menyerupai huruf K dengan empat lengan yang masing-masing dipisahkan oleh Teluk yang dalam. Melihat sejarah fisik pembentukan daerah timur di Indonesia, pembentukan pulau Sulawesi merupakan pembentukan yang paling rumit yang berawal pada kurun waktu *Palaeozoikum* yaitu ketika lempeng Benua Australia bergerak ke utara yang menyebabkan melengkungnya bagian timur daratan benua ke barat, dan desakan patahan sorong darat ke arah timur-barat yang mengubah bentuk masa daratan. Peristiwa benturan inilah yang merupakan awal terjadinya kepulauan Sulawesi².

Berdasarkan atas peristiwa geologis yang terjadi itulah maka mandala Pulau Sulawesi terbagi menjadi tiga bulatan yaitu : (1)

lingkungan Sulawesi Barat, (2) lingkungan Sulawesi Timur, dan (3) lingkungan Sulawesi Banggai-Sula³.

Lingkungan wilayah barat dan timur dipisahkan oleh patahan Palu yaitu antara daratan Palu dan Teluk Bone, sedangkan lingkungan Banggai-Sula mencakup daerah Luwuk dan sepanjang Semenanjung Barat Laut ke Kepulauan Banggai dan Sula yang ada di Propinsi Maluku⁴.

Mengenai susunan batuan yang pembentukan dasar dari Mandala Sulawesi terdiri dari jenis batuan ultra basal dan jenis metamorf yang diselingi oleh batuan belah dan batuan granit. Pada lingkungan Sulawesi Banggai-Sula yang memiliki batuan dasar metamorf dari masa *Paleozoikum* tertindih oleh batuan efusit dari masa trias dan perm. Pada lingkungan Sulawesi Timur mempunyai batuan dasar jenis ultra basal, basis pada bagian barat dan batuan kapur dari masa *mesozoikum* di bagian timur dan selatan.

Pada lingkungan Sulawesi Barat memiliki batuan dasar ultra basal dan batuan belah yang terdapat pada bagian selatan, sedang pada bagian utara dilandasi oleh batuan belah gneis tererupsi secara baik pada laut dangkal. Menurut perkiraan batuan-batuan tertua di daerah Sulawesi Selatan adalah *crystalline schists* yang terdapat pada sisi sebelah timur dari pegunungan Quarles dan pada bagian sentral pegunungan Latimojong. Usia yang pasti dari batu-batuan itu belum diketahui, tetapi niscaya lebih tua dari *mosozoic* atau *palezoic* muda. Namun demikian beberapa *phyllites* yang ditemukan disisi bagian timur dan barat diperkirakan berada pada usia *Mesozoik* dan *Eocene*⁵

2.2 Penduduk dan Mata Pencarian

Wilayah Sulawesi telah dihuni oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Diperkirakan bahwa penduduk pada zaman purba itu merupakan campuran berbagai ras yang datang dari berbagai penjuru. Ras *Austro Melanesoid* yang datang melalui arah selatan (migrasi dari pulau Jawa) dengan ciri khas kapak genggam yang terbuat dari batu yang berbentuk diskus lonjong dan senang memakan binatang kerang⁶. yang datang melalui arah timur (difusi dari Pulau Irian) dengan ciri khas *Abris Sous Roche* yang senang melukis di gua-gua dengan warna merah⁷, maupun ras *Paleo Mongoloid* yang datang melalui arah utara (migrasi dari Kepulauan Sangir) dengan ciri khas alat-alat flakes dan ujung panah

yang sisi-sisinya bergerigi⁸, termasuk dalam gelombang penyebaran penduduk Indonesia yang pertama kali dan merupakan pendukung dari kebudayaan *mesolithikum*.

Hubungan antara orang *Austro-Melanesoid* dengan orang *Paleo-Mongoloid* pada mulanya adalah hubungan antara mereka yang melakukan penaklukan dengan mereka yang ditaklukkan, tetapi lama kelamaan saling berassimilasi untuk kemudian membentuk suatu masyarakat yang baru. Untuk mudahnya mereka sering disebut orang Toala mungkin dalam diri banyak orang pegunungan, dan terlebih-lebih diantaranya ialah suku bangsa terasing.

Di Pulau Sulawesi orang Toala melampaui tingkat peradapan zaman batu dengan mata pencaharian berburu binatang di hutan belukar, meramu tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran, dan menangkap ikan dan binatang kerang di laut. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil di muara-muara sungai dekat pantai, sedang tempat tinggal mereka semacam perkampungan yang terdiri dari ceruk-ceruk atau gua yang menempel pada bukit karang yang besar. Di depan tempat tinggal mereka terdapat halaman yang luas terbuka tempat mereka mengadakan pesta dan bermain-main. Salah satu kegemarannya yang paling istimewa ialah menghiasi dinding gua dan karang tempat mereka tinggal dengan gambar-gambar tangan dan binatang. Pada masa sekarang, bekas perkampungan dan lukisan-lukisan yang berwarna merah masih bisa dijumpai di gua Leang Kabupaten Maros⁹.

Seluruh proses penyebaran manusia yang datang dari utara, timur dan selatan ke Sulawesi terjadi pada satu zaman, waktu manusia belum mengenal kepandaian becocok tanam. Untuk memperkirakan waktunya secara pasti sangat sulit ditentukan, kecuali ancar-ancar yang diberikan oleh para ahli purbakala yaitu antara tahun 10.000 sampai tahun 2.000 SM¹⁰.

Tidak lama setelah tahun yang diberikan diatas, maka suku bangsa Austronesia yang mula-mula mendiami lembah sungai di daerah Yunnan Tiongkok Selatan bergerak menyebar. Sebagian dari mereka sampai ke Semenanjung Malaka, Sumatera dan pulau-pulau di bagian baratnya; sementara yang sebagian lainnya menduduki pulau Jawa. Mereka menyebrangi lautan dengan perahu layar kemudian menyerbu masuk ke Sulawesi secara bergelombang. Rupanya mereka telah berhasil

mengembangkan kecakapan berlayar dengan biduk-biduknya yang bercadik sehingga mampu mengarungi lautan sampai jarak yang sangat jauh. Orang Toala yang telah terlebih dahulu menduduki Pulau Sulawesi sebagai taklukan atau dimusnahkan dan sebagian lagi melarikan diri ke daerah pegunungan. Bagi mereka yang tidak melarikan diri dan berasimilasi dengan pendatang baru, menetap di pantai dan menjadi penghuni pantai yang terutama hidup dari usahanya yang bergantungkan diri pada hasil laut.

Orang Austronesia rupanya sudah mengenal kepandaian bercocok tanam di ladang, yang mereka buka dengan cara memotong dan membakar hutan. Tanah yang mereka garap secara sederhana, kemudian mereka tanami keladi dan ubi jalar. Kalau ladang yang mereka olah hilang kesuburannya, mereka pindah ke hutan lain yang mereka buka lagi dengan cara membakar dan menebang pohon. Alat yang mereka gunakan untuk menebang pohon dan mencangkul tanah terbuat dari batu yang diasah salah satu sisinya sampai tajam dan berbentuk persegi empat. Adapun kepandaian menanam padi baik dengan sistem irigasi maupun dengan sistem peladangan menetap, lama kemudian baru diterapkan oleh penduduk Sulawesi. Pada mulanya mungkin berasal dari bangsa yang membawa kepandaian membuat benda-benda perunggu, atau bangsa-bangsa yang datang sesudah itu.

Bila pada mulanya penduduk Sulawesi merupakan campuran dari berbagai ras, maka dalam perkembangannya kemudian tidak mengherankan kalau di pulau ini terdapat sejumlah kesatuan sosial. Secara horisontal ditandai dengan kenyataan adanya perbedaan suku bangsa, dan masing-masing mempunyai identitas kebudayaan sendiri-sendiri. Kepercayaan keagamaan juga bermacam-macam mulai dari agama-agama besar dunia seperti Islam dan Kristen sampai pada sejumlah kepercayaan asli yaitu Animisme dan Dinamisme. Adaptasi ekonomi juga memperlihatkan perbedaan, seperti semi nomaden yang berpindah-pindah, menanam padi, nelayan, pedagang dan industri rumah tangga. Struktur masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan secara vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, sedang struktur politik tradisional terdapat dari mulai anak suku sampai pada kerajaan.

Tidak semua yang ada di Sulawesi itu berbeda-beda, di sini masih ditemukan beberapa hal yang sama. Pada wilayah-wilayah tertentu seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, masyarakat biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal usul keturunan yang sama dari Dinasti Sawerigading, suatu kepercayaan yang seringkali didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat. Begitu pula bahasa yang digunakan termasuk dalam satu rumpun bahasa yaitu rumpun bahasa Polynesia - Melayu yang huruf-hurufnya berasal dari huruf Sansekerta¹¹. Ini berarti bahwa semua bahasa yang ada di Sulawesi memiliki kata-kata seasal serta mempunyai tata bahasa yang strukturnya amat besar persamaannya.

Adanya perbedaan suku bangsa, agama, dan mata pencaharian hidup seringkali dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial disebut sebagai ciri masyarakat yang majemuk, dan rupanya ada dua faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat Sulawesi bersifat majemuk¹².

Faktor yang pertama terlatak pada keadaan geografi yang membagi Sulawesi atas sejumlah wilayah dan daerah yang terpencil. Ketika nenek moyang orang-orang Sulawesi mula-mula datang secara bergelombang sebagai imigran dari berbagai penjuru, keadaan geografis semacam itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di suatu wilayah atau daerah yang terpisah-pisah satu dengan lainnya. Isolasi geografis yang demikian itu dikemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap wilayah atau daerah tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa lain. Tiap-tiap kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah anak suku yang dipersatukan oleh ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai satu jenis tersendiri.

Faktor yang kedua yaitu letak wilayah Sulawesi di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik yang merupakan lalu lintas perdagangan laut internasional, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa wilayah nusantara sepanjang sejarahnya telah dikunjungi oleh berbagai suku bangsa dan bangsa asing dengan memperkenalkan budaya masing-masing mulai dari bahasa asing seperti bahasa Tiongkok, Arab, Portugis dan Belanda sampai pada berbagai suku bangsa Melayu. Hasil akhir dari semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat.

Daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai banyak persamaannya secara kebudayaan, karena sangat mudah dan seringnya terdapat hubungan di antara penduduknya. Sebaliknya penduduk yang tinggal dipedalaman yang dipisah-pisahkan oleh hutan tropis dan gunung-gunung yang menjulang tinggi memperlihatkan bentuk yang berlainan. Secara ekologis, daerah pedalaman terdiri dari daerah tempat dicitaknya sawah yang dapat diairi secara intensif terutama di daerah daratan rendah sekitar sungai besar dan lereng gunung. Daerah yang topografi dan keadaan tanahnya tidak memungkinkan diusahakan sawah, menyebabkan timbulnya pertanian berpindah-pindah dan adaptasi ekonomi lainnya.

Penduduk Sulawesi yang tersebar di pesisir pantai dan mereka yang mendiami daerah pedalaman, pegunungan dan hulu sungai, masing-masing terhimpun dalam kelompok-kelompok anak suku berdiri atas dasar kekerabatan sebagai tali pengikatnya, serta mereka masih merasa seketurunan dari nenek moyang yang tertua. Pemimpin-pemimpin anak suku berkewajiban memberi perlindungan kepada anggota-anggotanya, dan sebaliknya menuntut ketaatan dan kesetiaan dari mereka terhadap segala peraturan yang telah menjadi tradisi.

2.3 Hasil Budaya Zaman Prasejarah

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembagian zaman dalam prasejarah Indonesia selain berdasarkan sistem sosial ekonomi¹³, ada lagi pembagian yang lebih lazim dan lebih tepat untuk sejarah perkembangan kebudayaan yaitu pembagian menurut benda-benda peninggalan masa lampau yang merupakan produk dari kebudayaan-kebudayaan umat manusia¹⁴.

Benda-benda peninggalan prasejarah sebagai wujud dari kebudayaan material tentu saja tidak dapat diketemukan lagi secara keseluruhan, karena bahan-bahan tersebut mungkin telah lapuk ditelan masa sehingga apa yang sampai kepada kita hanya sebagian kecil yang bahannya terbuat dari batu atau logam. Tambahan pula bahwa benda-benda yang kita jumpai sekarang bentuknyapun tidak selalu sama seperti yang dibuat pertama kali tetapi selalu berubah sesuai dengan perubahan kebudayaan, atau sesuai dengan kemajuan teknologi pembuatannya.

Zaman Prasejarah Pulau Sulawesi, seperti juga yang lazim di pulau-pulau lainnya di Nusantara ini, dapat dibagi menjadi tiga zaman yaitu,

(1) Zaman batu tua atau *Palaeolithicum*, (2) Zaman batu pertengahan atau *Mesolithicum*, dan (3) Zaman batu muda atau *Neolithicum*. Ketiga zaman itu kemudian disusul oleh zaman perunggu dan akhirnya ditutup oleh zaman besi.

Berdasarkan atas identifikasi peninggalan benda-benda prasejarah di Asia Tenggara, maka setelah zaman Batu muda berakhir disusul oleh zaman berikutnya yaitu perunggu, jadi melangkai satu zaman yaitu zaman tembaga, bahkan terdapat ahli keurbakalaan Indonesia cenderung menganggap bahwa kebudayaan zaman perunggu bersamaan waktunya dengan zaman besi¹⁵. Kebersamaan ini menandakan bahwa zaman yang disebutkan terakhir merupakan kebudayaan pelengkap yang asalnya dari daratan Asia.

2.3.1 Zaman Batu Tua.

Zaman batu tua dalam sejarah keurbakalaan Indonesia memakan waktu yang cukup panjang dan diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun. Fosil manusia yang hidup dalam masa ini hanya ditemukan di pulau Jawa tepatnya di pinggir Bengawan Solo dan berada pada lapisan bumi pleistocen tengah. Oleh karena ukuran volume otak dari fosil ini berada di antara yang dimiliki oleh manusia dan kera maka fosil itu oleh penemunya dinamakan *Pithecanthropus Erectus* yang pengertiannya adalah manusia kera berjalan tegak. Mungkin karena pengaruh volume otak sebagai penentu tingkatan kecerdasannya maka benda-benda perkakas hasil ciptaannya tergolong sangat sederhana.

Peninggalan benda-benda budaya zaman batu tua tidak ditemukan satu lokasi dengan *Pithecanthropus erectus*, tetapi ditemukan di daerah lain. Bila dilihat dari cara kerja maka alat-alat batu yang dihasilkan dikerjakan secara kasar tidak diasah atau dihaluskan, bahannya diambil dari alam kemudian dibuat untuk keperluan yang sifatnya insidental saja tanpa menghiraukan segi bentuk dan keindahan alat. Oleh karena itu penamaan zaman batu tua tidak hanya menunjuk pada satu periode tertentu saja tetapi juga dapat dilihat dari segi pembuatannya¹⁶. Mengenai teknik yang digunakan terdiri dari dua cara yaitu teknik mematahkan dan teknik mematok. Teknik mematahkan termasuk dalam teknologi tingkat awal budaya manusia yang masih didapat pada masa-masa kemudian, sedang teknik mematok merupakan teknologi lanjutan dari teknik mematahkan.

Alat-alat batu itu kebanyakan berbentuk kapak genggam dan ditemukan di beberapa pusat kebudayaan diantaranya ialah di daerah Pacitan. Berdasarkan hasil penelitian von Keonigswald pada tahun 1935 di daerah yang disebutkan, maka kapak genggam yang tidak bertangkai tersebut dinamakan alat-alat *chopper* yang artinya alat penetak. Meskipun alat-alat ini ditemukan secara tersebar pada permukaan bumi, tetapi diduga menempati posisi atau berasal dari lapisan *Trinil* dan *Pleistocen* tengah. Bila dugaan ini benar adanya berarti alat-alat tersebut dibuat dan digunakan oleh manusia yang fosilnya berada pada lapisan yang sama yaitu *Pithecanthropus Erectus*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kebudayaan Pacitan adalah kebudayaan *Pithecanthropus Erectus*.

Selain kapak genggam Pacitan sebagai alat penetak, alat-alat lain yang berasal dari zaman batu tua juga di ketemukan di Sulawesi seperti alat-alat dari tanduk dan tulang binatang. Alat-alat itu digunakan untuk menombak ikan dan mengorek ubi serta keladi dari dalam tanah. Begitupun alat-alat yang dibuat dari batu indah (*flakes*) yang berfungsi sebagai belati dan berbagai alat batu serpih-bila dan mata panah adalah hasil budaya zaman batu tua yang fungsinya tidak hanya mengiris, memotong dan menusuk, tetapi juga untuk mengorek dan melobang¹⁷. Beberapa fungsi yang telah disebutkan diatas mungkin dilakukan sehubungan dengan aktivitas mereka dalam berburu binatang dan mengumpulkan makanan, sedang fungsi-fungsi alat lainnya hanya untuk pembuat peralatan. Begitu pun di daerah Sulawesi Selatan seperti Cabenge ditemukan banyak *flakes*, berupa alat-alat kecil dari batu yang berbentuk indah¹⁸.

Dari berbagai hasil penemuan yang menghasilkan bermacam-macam alat seperti yang disebutkan diatas, tentu dapat diketahui tentang penggunaannya, dan dengan demikian termasuk didalamnya kehidupan manusia zaman itu. Alat-alat itu sebenarnya telah menunjukkan bahwa dipergunakan untuk berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan makanan. Alat-alat dari zaman *Paleolitikum* jelas tidak dapat dipergunakan untuk bercocok tanam di ladang atau di sawah. Maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa kehidupan manusia zaman batu tua merupakan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak bertempat tinggal secara menetap, melainkan berpindah-pindah tergantung pada binatang buruannya dan hasil-hasil tanah disekitarnya.

Mengenai kebudayaan kerohaniaannya tidak dapat diketahui dengan pasti karena bukti-bukti tentang hal itu tidak diketemukan. Yang bisa diketemukan oleh Ny. Heeren Palm pada tahun 1950 hanya hasil keseniaannya saja yaitu gambar-gambar telapak tangan yang berwarna merah menempel pada dinding gua Leang-leang di Sulawesi Selatan. Penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh H.R. van Heekern sekitar situs yang pertama akhirnya menghasilkan temuan gambar berwarna dari seekor babi hutan. Adapun umum gambar-gambar itu pada mulanya disangka berasal dari zaman batu tua, tetapi penelitian yang teliti memberikan petunjuk bahwa asalnya dari zaman berikutnya, yaitu zaman batu muda.

2.3.2 *Zaman Batu Tengah*

Seperti dikatakan pada bagian terdahulu bahwa kebudayaan zaman batu tua berlangsung sangat lama, dan selanjutnya mendapat pengaruh-pengaruh asing dengan mengalirnya arus kebudayaan baru dari daratan Asia yang membawa coraknya sendiri. Dalam ilmu kepurbakalaan kebudayaan baru yang timbul itu dinamakan mesolithikum dan sinonim artinya dengan zaman batu tengah.

Perlu ditegaskan bahwa dengan dimulainya zaman batu tengah tidak berarti bahwa zaman batu tua telah berakhir, melainkan masih terus berlangsung. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa alat-alat dari tulang termasuk *flakes* dan alat-alat serpih-bila masih tetap mengambil bagian penting dalam zaman batu tengah. Begitupun bila dipandang dari segi perkembangan sosial ekonominya maka manusia yang hidup dalam zaman batu tengah masih berada dalam masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut¹⁹. Meskipun demikian keadaannya, manusia sudah memainkan peranan penting di dalam menentukan kehidupannya. Masa ini ditandai dengan suatu perkembangan baru yaitu adanya kehidupan bertempat tinggal menetap pada gua-gua atau ceruk-ceruk bukit karang. Terpilihnya gua sebagai tempat tinggal manusia disebabkan karena ruang yang terdapat dalam gua dianggap cukup aman, baik dari segi budaya, hujan dan panas maupun gangguan binatang buas.

Dengan dimulainya pola hidup secara menetap, berarti mereka memiliki banyak waktu untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat

seperti membuat lukisan dan goresan pada dinding gua atau ceruk tempat tinggalnya. Adapun maksud dari lukisan terletak pada kepercayaan yang bersifat magis-religius yakni suatu keyakinan akan memperoleh hasil yang banyak, apabila mereka menggambarkan jenis-jenis binatang yang menjadi buruannya. Tambahan pula bahwa ada kemungkinan bahwa bercocok tanam secara kecil-kecilan dan sangat sederhana sudah dikenal pula²⁰.

Kebudayaan *Mesolithikum* di Indonesia banyak di jumpai bekas-bekasnya di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tempat tinggal yang ditemukan di pinggir pantai disebut dengan perkataan Denmark *kyokkenmoddinger*, sedang kehidupan di gua-gua disebut *abris sous roche*,

Kyokkenmoddinger atau sampah dapur merupakan corak dari zaman batu tengah yang membuktikan telah adanya penduduk pantai yang tinggal di ceruk-ceruk batu karang. Makanan pokok mereka adalah siput laut yang banyak terdapat di dasar laut yang dangkal disepanjang garis pantai, dan berbagai macam kerang yang hidup menempel pada batu karang. Sisa-sisa makanan mereka berupa rumah siput yang telah dipotong bagian ekornya dan kulit-kulit kerang, dibuang pada suatu tempat sehingga membentuk ketinggian. selama ratusan sampai ribuan tahun kemudian timbunan itu bereaksi secara kimiawi dan menjelma menjadi bukit karang, kemudian inilah yang dinamakan sampah dapur. Pada saat bukit-bukit itu pertama kali ditemukan, para ahli geologi mengira bahwa itu adalah suatu lapisan bumi yang istimewa, namun tidak demikian keadaannya.

Dari hasil penggalian bukit-bukit kerang ditemukan berbagai macam alat penting diantaranya ialah :

- (1) kapak genggam yang dibuat dari batu kali yang dipecah dan dibelah sehingga sisi luarnya tetap halus sedang sisi dalamnya diolah kembali. Kapak genggam ini dinamakan *hache courte* dan *pebble megalithikum* yang mempunyai perbedaan dengan kapak genggam *chopper paleolithikum*.
- (2) pipisan (batu penggiling beserta landasannya) yang tidak hanya untuk menggiling makanan tapi juga untuk menghaluskan cat merah sebagaimana kelihatan dari bekas-bekasnya.

(3) pecahan-pecahan tengkorak kepala dan gigi manusia.

Berdasarkan analisa konstruksi tulangnya maka manusia mesolitikum ini termasuk dalam golongan bangsa *Papua Melanesoid*.

Tempat penemuan kedua dari kebudayaan *mesolithikum* adalah *abris sous roche* yaitu gua tempat tinggal, dan paling banyak ditemukan di daerah Lamoncong Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah hasil penyelidikan tahun 1893 bahwa manusia yang mendiami daerah ini adalah orang Toala, suatu suku bangsa keturunan langsung dari penduduk Sulawesi Selatan zaman prasejarah, dan masih sekeluarga dengan suku bangsa Wedda dari Sialan. Meskipun dari gua-gua itu di temukan banyak alat-alat dari zaman prasejarah, tetapi ada kesangsian untuk menghubungkan benda-benda temuan itu dengan orang Toala²¹. Dari penyelidikan lebih lanjut akhirnya dipastikan bahwa kebudayaan Toala termasuk dalam zaman batu tengah, yang hasilnya terdiri dari *flakes* dan alat-alat tulang. Diantara *flakes* itu banyak berupa ujung-ujung panah yang mempunyai keistimewaan karena sisi-sisinya bergerigi.

Seratus tahun lamanya dari penyelidikan yang pertama, maka pada tahun 1993 di daerah Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan dilakukan penyelidikan secara intensif terhadap tipe-tipe Gua dan peninggalan budaya prasejarah yang berada di dalam *abris sous roche*. Dari hasil penemuan Nur Mulyadi²² dan Mursyidah²³ disimpulkan bahwa kriteria dipilihnya sebuah gua hunian karena adanya kesatuan kondisi geologi, ekologi dan biologi yang saling menunjang. Ketiga kondisi inilah yang memungkinkan manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan serta menangkal sejumlah problem yang disodorkan oleh alam.

Mengenai benda-benda temuan yang berada didalam gua terdiri dari kapak genggam, mata panah dan penyerut yang terbuat dari batu; bercampur dengan sisa-sisa cangkang molluska dan kreweng. Yang paling menarik dari semua penemuan adalah hasil-hasil kesenian berupa lukisan-lukisan berwarna hitam dan digambarkan dalam bentuk yang bersifat abstrak dan skematik, dengan tehnik goresan. Adapun bentuk adegan yang diperlihatkan terdiri dari adegan berburu binatang, menari, kehidupan menuju alam arwah, manusia kangkang, perpaduan anatomi manusia dan binatang *antropomorphis*, melompat dan manusia bersusun. Selain itu ditemukan pula lukisan-lukisan cap tangan, binatang, garis-garis abrak, dan beberapa lukisan yang tidak dapat diidentifikasi lagi.

2.3.3 Zaman Batu Muda

Tidak seperti zaman batu tua dan zaman batu tengah yang bekas-bekas temuannya bersifat regional yaitu terbatas pada daerah-daerah tertentu, peninggalan batu muda dapat dianggap nasional karena bekas-bekas temuannya meliputi seluruh kepulauan Nusantara. Oleh karena itu zaman kebudayaan batu muda sering dianggap sebagai dasar dari kebudayaan Indonesia meskipun kedua zaman yang mendahuluinya ikut membentuk dasar itu. Ciri-ciri yang paling menonjol dari zaman batu muda adalah selain kepandaian mengasah dan mengupan alat-alat batu sehingga diperoleh bentuk yang indah dengan nilai seni yang tinggi, juga terjadinya perubahan penghidupan dari *footgathering* menjadi *foodproducing*. Penghidupan mengembara telah lampau, dan orang-orang telah tinggal menetap untuk bercocok tanam dan berternak.

Perubahan sosial yang terjadi dianggap suatu revolusi yang sangat besar artinya dalam seluruh segi kehidupan ummat manusia. Dengan kehidupan menetap maka muncullah suatu masyarakat yang terorganisir dengan segala bentuk peraturannya. Ikatan kerjasama kemudian menciptakan pembagian kerja antar anggota-anggotanya, dan melalui pembagian kerja timbul kepandaian-kepandaian tertentu seperti membuat kerajinan tangan sebagai perhiasan (gelang dan kalung), menenun pakaian dari tekstil dan membuat periuk belanga. Mengenai alat-alatnya yang ditemukan terbagi dalam dua golongan besar yaitu kapak persegi dan lonjong, yang masing-masing mewakili arus kebudayaan tersendiri.

Penamaan kapak persegi mencakup pengertian yang luas karena tidak hanya kapak saja tetapi banyak lagi alat-alat lainnya seperti beliung, kapak bahu, dan tara dalam berbagai bentuk dan ukuran termasuk didalamnya. Menurut penyelidikan van Heine Geldren, pangkal kebudayaan kapak persegi berada di daerah Yunan di Tiongkok Selatan dan melalui lembah-lembah sungai Yang-tse-kiang dan Mekong tersebar sampai ke Hindia Belakang. Di tempat ini kebudayaan itu mempunyai cabang kapak bahu yang nantinya berdiri sendiri dan mempunyai jalan penyebaran yang berlainan. Kebudayaan kapak persegi kemudian, mempunyai pusat di daerah Tonkin yang penduduknya akrab dengan lautan dan pandai membuat perahu. Dengan perahu bercadik maka orang-orang zaman batu muda itu menyebar ke Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan dari sini ada yang ke timur dan ke Kalimantan,

selanjutnya ke Filipina, Formosa dan Jepang. Adapun pendukung kapak persegi ialah bangsa Austronesia yang kemudian menurunkan bangsa Indonesia yang datang kira-kira 2000 tahun sebelum masehi.

Berbeda dengan kapak persegi, penamaan kapak lonjong karena memang lonjong. Sering pula dinamakan *Neolithikum Papua* karena terutama sekali ditemukan di Irian dan pulau-pulau bagian timur. Oleh karena kapak lonjong tidak ditemukan di bagian selatan Hindia Belakang dan Malaka, maka dapat disimpulkan bahwa jalan persebaran kebudayaan kapak lonjong ialah jalan timur: dari daratan Asia ke Jepang, Formosa, Filipina, Minahasa terus ke timur.

2.4 Kebudayaan Megalitik dan Perundagian

2.4.1 Pengertian Kebudayaan Megalitik

Secara etimologi peristilahan *megalitik* berasal dari kata *mega* dan *lithos*, *mega* berarti besar dan *litos* berarti batu. Jadi pengertian *megalitik* adalah batu yang bentuknya besar. Ini menandakan bahwa terdapat suatu budaya yang menghasilkan bangunan dari batu besar yang dijadikan sarana pemujaan dan juga benda-benda lain dari batu yang berhubungan dengan bangunan-bangunan makam.

Untuk masa sekarang pengertian *megalitik* lebih luas lagi dari yang dikemukakan di atas, begitupun jangkauannya tidak hanya dihubungkan dengan batu besar. Monumen yang disusun dari batu kecil pun dapat digolongkan ke dalam kebudayaan megalitikum sepanjang monumen itu ada hubungannya dengan pemujaan terhadap arwah leluhur. Di samping itu beberapa ritus-ritus pemujaan nenek moyang walaupun tidak diabadikan dengan bangunan-bangunan *megalitik* namun tindakannyapun dapat digolongkan atau dapat dipandang sebagai manifestasi dari kebudayaan megalitik²⁴. Manifestasi semacam ini telah masuk ke dalam sikap dan perilaku masyarakat pendukungnya sepanjang masa, sehingga tampak bangunan yang lengkappun suatu masyarakat dianggap melakukan upacara *megalitik* seperti di Toraja dalam hal ini pengorbanan kerbau yang berkaitan dengan pemujaan leluhur.

Pola penghidupan pada masyarakat megalitik yang menonjol adalah upacara penguburan, terutama sekali seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Penguburan sering dilakukan

di daerah yang sering dihubungkan dengan sejarah nenek moyangnya, atau tempat-tempat tinggi yang disakralkan. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa roh seseorang yang meninggal tidak lenyap tetapi hidup di dunia arwah. Agar arwah mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia arwah maka saat dikuburkan diikut sertakan bekal kubur *burial gifts*, baik pada pase penguburan yang pertama *primary burial* maupun penguburan yang kedua *secondary burial*.

Sebagai puncak acara pada waktu penguburan dilakukan pemotongan hewan yang disertai pendirian bangunan dari batu besar. Melalui upacara dan pendirian bangunan tersebut, diharapkan agar arwah simati mendapat tempat yang khusus di dunia arwah, dan bagi yang ditinggalkan dapat memohon perlindungan untuk kesejahteraan hidupnya maupun untuk kesuburan tanaman. Pendirian monumen yang letaknya berdiri sendiri maupun yang berkelompok semuanya tidak luput dari latar belakang pemujaan kultus nenek moyang. Pada pola perkembangan tradisi *megalitik* juga ditandai dengan adanya kerjasama dalam hal gotong royong di dalam mendirikan monumen, yang mana tidak dapat dilakukan seorang diri karena volumenya besar dan berat. Pemujaan arwah nenek moyang yang telah mati pada zaman *megalitik* merupakan ciri khas yang tidak pernah ditemukan pada tradisi lain. Pemujaan arwah nenek moyang itu sudah menyatu di kalangan pendukungnya yang mana tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan pemujaan itu berkembang terus sampai sekarang.

Masyarakat pendukung tradisi *megalitik* di pulau Sulawesi ditandai dengan kehidupan yang bersifat sakral dan profan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa sarana-sarana yang berkembang dengan kebutuhan sakral selalu berkaitan dengan kebutuhan profan, misalnya tempat tinggal selalu ditemukan bersama-sama dengan tempat pemujaan. Begitupun tradisi pendirian monumen *megalitik* selalu berdasarkan kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama akan adanya pengaruh yang kuat terhadap kesejahteraan hidup dan kesuburan tanaman. Olehnya itu jasa dari seseorang yang telah meninggal diabadikan dengan mendirikan bangunan yang berupa batu besar yang kemudian menjadi medium pemujaan, penghormatan, tempat persinggahan dan sekaligus merupakan lambang si mati. Pola pemikiran semacam ini dapat ditemukan dalam pembuatan bangunan-bangunan *megalitik* di Pangesoreng Kabupaten Maros Sulawesi Selatan²⁵.

Peninggalan *megalitik* yang tersebar di hampir seluruh Pulau Sulawesi bila ditinjau dari fungsinya secara umum dapat dibedakan atas dua bagian yaitu :

- (1) *Living Monumen Tradition*, yaitu setiap peninggalan prasejarah yang pada saat ditemukan masih dipergunakan oleh masyarakat penduduknya sesuai dengan fungsinya dan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai.
- (2) *Dead Monument*, yaitu peninggalan prasejarah bangunan teras berundak-undak yang pada saat ditemukan sudah tidak digunakan lagi sesuai dengan fungsinya pada masa lampau.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peninggalan dari masa tradisi *megalitik* hampir tersebar di seluruh pelosok Kepulauan Indonesia. Peninggalan kebudayaan *megalitik* tersebut pada umumnya memperlihatkan corak dan bentuk-bentuk yang mendasar. Meskipun dalam penampilannya memperlihatkan ciri-ciri yang bervariasi dan ukuran yang berbeda-beda. Diantara semua temuan ada pula yang memiliki ciri khas tersendiri dan terbatas wilayah perkembangannya seperti kalamba (Sulawesi Tengah), waruga (Minahasa), dan sarkofagus (Bali). Ciri-ciri khas tersebut menampakkan perbedaan dengan wilayah budaya tersendiri yang lebih banyak disebabkan adanya perbedaan kondisi lingkungan alam sekitar sebagai pembentuk kebudayaan dan tingkah laku manusia.

Dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, terdapat dan tersebar banyak peninggalan prasejarah yang pada umumnya didominasi oleh peninggalan *megalitik*. Adapun peninggalan-peninggalan *megalitik* di daerah ini antara lain ialah *menhir*. Secara etimologi *menhir* berarti batu tegak, bentuknya kasar karena belum dikerjakan. Manusia sering meletakkannya di suatu tempat untuk kepentingan memperingati seseorang yang masih hidup atau sudah mati. Batu tersebut dianggap sebagai medium penghormatan, menjadi tahta kedatangan roh, sekaligus lambang dari orang-orang yang diperingati.

Adanya perbedaan bentuk serta tipe *menhir* di berbagai situs *megalitik*, karena mempunyai latar belakang konsep yang berbeda. Seperti halnya *menhir* yang ada di Poso Sulawesi Tengah mempunyai dua jenis bentuk. Bentuk yang pertama adalah persegi empat panjang

dan menyerupai papan, sedangkan yang kedua berbentuk menyerupai batang pohon²⁶. Adapun bentuk pola hiasnya berupa pahatan garis lurus horizontal yang mempunyai tujuan *profan*.

Mengenai menhir yang berbentuk pohon dapat dijelaskan bahwa bagi masyarakat Poso, apabila suatu komplek ladang akan dikerjakan maka orang perlu menentukan satu tempat yang berfungsi sebagai pusat yang artinya titik permulaan dan titik akhir dari segala kesibukan yang terdapat pada ladang itu dan tempat itu di sebut "pongkaresi". Di tempat ini ditanam pula sebuah pohon yang sangat subur tumbuhnya dan banyak buahnya dan dinamakan "pokae" (sejenis ficus) adanya hubungan pohon pokae yang bisa mendatangkan kesuburan dan kesejahteraan dengan menhir yang berbentuk pohon.

Salah satu temuan baru dari masa *megalitik* di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, dan juga dianggap cukup unik adalah bangun teras berundak situs Ne'ku Mombong²⁷. Menurut deskripsi yang diberikan penemunya bahwa pada mulanya bangunan itu hanya beberapa bagian saja yang nampak. Hal ini disebabkan karena bentuk bangunan tersebut telah tertimbun vegetasi daun, beberapa pohon dan tanah.

Bahan yang digunakan untuk membangun terdiri atas batu kali yang disusun rapi tanpa diberi bahan perekat. Batu-batu tersebut disusun bertingkat-tingkat dan saling tindih menindih, sehingga berbentuk dinding. Susunan batu-batu yang berbentuk dinding tersebut ditemukan tiga buah yang berfungsi sebagai penopang dari teras yang berada diatasnya. Meskipun dinding itu dibuat serapi mungkin namun tetap nampak kesederhanaan pembuatannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak seimbangnnya ukuran ketinggiannya, serta bahannya yang diambil dari sumber alam tanpa mengubahnya.

Bangunan ini memiliki teras yang datar dengan tiga buah undakan dan seluruh bangunan terbuka serta bersatu dengan alam sekitarnya. Apabila diamati secara jelas, terlihat bahwa denah bangunan hampir berbentuk bujur sangkar dengan orientasi mengarah ke utara. Denah bujur sangkar tersebut terutama terlihat pada bangunan utama dari seluruh kelengkapan bangunan teras berundak, melintang dari timur ke barat.

Selain bangunan utama di atas, kelengkapan dari seluruh bangunan teras berundak juga terlihat adanya lorong yang dibuat seperti parit yang

mengelilingi bangunan utama. Di luar dari lorong itu terdapat lagi teras teras dari tanah yang berupa gundukan mengelilingi parit. Yang lebih menarik lagi adalah ditemukannya gundukan tanah kedua yang terdapat disebelah utara dalam wilayah situs. Gundukan tanah kedua ini mungkin sengaja ditempatkan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke bangunan utama teras berundak. Di samping itu ditemukan juga tangga batu yang berada disisi barat laut dan sisi timur laut bangunan utama. Bentuk-bentuk seperti ini merupakan salah satu ciri khas tersendiri yang dimiliki bangunan teras berundak situs ne'ku Mombong.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana bentuk-bentuk bangunan teras berundak dan kelengkapannya, maka dibawah ini akan diuraikan satu persatu.

2.4.2 Teras Pertama

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa bangunan utama teras berundak ini memiliki tiga buah teras, yang masing-masing letaknya bertingkat dan berundak. Teras utama terletak paling bawah di antara ketiga teras itu. Di sekeliling teras pertama dibuat penopang dari batu yang membentuk dinding, sehingga teras tidak akan runtuh meskipun terbuat dari tanah gembur bercampur pasir. Batu-batu kali yang berbentuk dinding, bahannya mungkin saja diambil dari batu sungai yang terdapat di daratan rendah. Batu-batu itu mempunyai ukuran yang bervariasi antara yang berdiameter 6 cm hingga 25 cm. Batu-batu itu disusun bertingkat dan saling tindih menindih, sehingga kuat untuk menopang teras di atasnya. meskipun tidak ada bahan perekat yang digunakan, nampaknya ada ditemukan tanah pada rongga-rongga batu yang fungsinya sebagai penguat.

2.4.3 Teras Kedua

Teras kedua terletak di bagian tengah ketiga teras bangunan utama. Jarak antara teras pertama ke teras kedua adalah 3 meter dengan pengukuran dari sisi utara dinding teras utama. Seperti halnya dengan teras pertama, disekeliling teras kedua ini dibuat dinding yang berfungsi sebagai penopang permukaan teras kedua.

Dinding yang terdapat di empat sisi teras kedua bahannya juga dari batu-batu sungai yang bentuk ukurannya bervariasi. Perbedaannya

dengan teras pertama hanya pada ketinggian teras. Ketinggian teras yang kedua lebih rendah bila dibanding dengan yang pertama, sehingga batu-batu kali yang bervariasi ukurannya biasanya hanya tiga, dua, atau satu tingkat saja. Karena rendahnya dinding kedua ini, banyak diantara batu-batu sungai itu terlepas dan berhamburan ke daerah sekitarnya. Hal ini juga membuat permukaan teras kedua sering terbongkar, sehingga sangat sukar untuk menentukan batas-batas teras kedua.

2.4.4 Teras Ketiga

Teras ketiga terletak di bagian paling atas dari ketiga teras bangunan utama. Jarak antara teras kedua dengan teras ketiga diperkirakan sekitar 2,4 meter dengan pengukuran dari arah sisi utara dinding teras kedua. Seperti halnya teras pertama dan kedua, teras ketiga ini juga memiliki denah persegi empat, sehingga bila diamati secara sepintas akan mengarah ke empat penjuru mata angin.

Baik teras pertama, kedua maupun teras ketiga nampaknya sengaja dibuat dalam keadaan terbuka dan menyatu dengan alam sekelilingnya. Hal ini dapat dilihat, karena bentuk bangunan teras berupa teras berundak tidak diberi penutup sehingga bentuknya menyerupai piramida yang terbuka.

Dinding penopang permukaan teras ketiga, ukurannya semakin rendah bila dibandingkan dengan dinding teras lainnya, Ukuran ketinggian dinding ini mungkin melatar belakangi si pembuat bangunan untuk memilih batu-batu kali yang sangat kecil bentuknya. Ukuran batu itu juga bervariasi antara 7 cm sampai 15 cm. Bila dibandingkan dengan teras kedua, maka dinding teras ketiga nampaknya lebih kuat untuk menopang tanah permukaan di atasnya, meskipun demikian permukaan teras ketiga ini terancam kerusakan, akibat tumbuhnya pohon-pohon besar di atasnya.

2.4.5 Teras Keempat

Teras keempat adalah tangga batu yang merupakan salah satu kelengkapan dari bangunan utama. Tangga batu ini berada diluar sisi utama teras dan berfungsi sebagai jalan untuk naik ke atas teras pertama. Bahannya juga dari batu sungai yang disusun ke atas yang makin keatas makin tinggi sudut kemiringannya serta makin banyak susunan batunya.

Tangga batu ini tidak membentuk undakan, dan rupanya sengaja dibuat demikian untuk menghindari binatang-binatang buas yang sudah terperangkap dalam parit untuk naik keatas bangunan teras berundak. Bukan hanya teras yang bentuknya berundak, tetapi juga tanah yang sengaja dibuat dua susun dengan maksud sebagai dinding bagian luar selokan pembatas.

Para ahli arkeologi masih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang variasi dan jumlah dari teras berundak. Namun menurut pakar arkeologi lain yaitu Dimas Suryanto²⁸ bahwa bangunan bertingkat dan punden berundak-undak dibangun dengan batu-batu besar, batu-batu kecil, dan kepingan batu. Undakan batu merupakan tangga yang menuju kebagian puncak seperti di Gunung Padang Jawa Barat. Dari pengertian ini jelaslah bahwa apa yang ditemukan di situs ne'ke Mombong memperlihatkan kesamaan bentuk dengan pengertian yang dikemukakan oleh pakar arkeologi.

Mengenai asal mula teras berundak dipergunakan, rupanya para ahli sependapat bahwa bentuk seperti itu sudah dipergunakan sejak masa prasejarah Indonesia. Seperti yang juga dikemukakan oleh van Ramount (1951) yang meneliti bangunan-bangunan di lereng gunung Penanggungan dengan mengemukakan bahwa bangunan di lereng gunung itu dipergunakan untuk memuja nenek moyang. Dewa yang dulu dianggap tinggal di sorga, sekarang telah bersatu dengan arwah nenek moyang di puncak-puncak gunung²⁹.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk bangunan teras berundak sudah mulai dikenal pada masa perkembangan kebudayaan *megalitik* di Indonesia. Apabila memperhatikan bentuk-bentuk bangunan teras berundak serta latar belakang pendirian bangunan situs ne'ke Mombong, nampaknya juga erat kaitannya dengan unsur-unsur pemujaan terhadap arwah nenek moyang.

2.5 *Religi dan Kepercayaan Tradisional*

Sebelum masuknya agama Samawy yaitu Islam dan Nasrani ke Pulau Sulawesi, penduduknya telah mengenal dan menganut kepercayaan asli, suatu faham dogmatis yang terjalin dengan adat-istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, terutama pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya merupakan apa saja adat hidup yang

mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan asli tersebut umumnya bersifat Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan Animisme menyembah kepada roh-roh nenek moyang yang mereka anggap masih bersemayam di batu besar, pohon yang rindang daunnya dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan Dinamisme menyebabkan kepada kekuatan alam atau benda-benda seperti gunung, batu, dan keris. Kekuatan benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai penangkal datangnya bahaya atau berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekebalan. Warisan inilah yang dianggap oleh mereka sebagai agama dan kepercayaan yang benar dan yang dikenal dengan berbagai nama seperti Toani Tolotang, Patuntung, dan Aluk Todolo.

2.5.1 Kepercayaan Aluk Todolo

Adapun kepercayaan yang disebutkan terakhir mengajarkan bahwa diluar diri manusia terdapat tiga unsur kekuasaan yang wajib dipercayai akan kebenaran dan kebesarannya yaitu Puang Matua, Deata-deata, dan To Mebali Puang.

Puang Matua sebagai penguasa langit merupakan unsur kekuatan yang paling tinggi. Setelah manusia yang pertama yaitu La Ukku diciptakan oleh Puang Matua di langit, maka manusia pertama ini segera membuat aturan-aturan yang disebut Sukaran Aluk, yang kemudian memerintahkan kepada keturunannya yaitu Poang Mula Tau turun ke bumi membawa ajaran tersebut untuk dilaksanakan oleh ummat manusia. Inti dari ajaran itu adalah bahwa Puang Matua memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi pemuja yang setia, dan jika ummat manusia lalai mengadakan pemujaan terhadapnya maka akan mendapat kutukan.

Setelah Sukaran Aluk diturunkan kepada ummat manusia di bumi, Puang Matua pun memberikan kekuasaan kepada Deata-deata untuk memelihara dan menguasai alam raya. Dari sekian banyak Deata-deata yang menguasai benda-benda alam raya, terdapat tiga deata yang paling populer yang masing-masing menguasai wilayah tertentu yaitu :

- (1) Deata tangngana langi yang bertugas mengawasi angkasa
- (2) Deata kapadanganna yang menguasai permukaan bumi (daratan, sungai dan lautan)
- (3) Deata tangngana padang yang menguasai isi perut bumi.

Oleh karena para deata ini perlu dimintai berkahnya untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup di bumi, maka ummat manusia selain mengadakan upacara pemujaan kepada Puang Matua, juga ada penyembahan terhadap Deata-deata. Kekuasaan yang ketiga adalah arwah para leluhur yang telah menjelma menjadi dewa yang dikenal dengan sebutan Tomembali Puang. Kekuasaan Tomembali Puang ini juga merupakan pemberian dari Puang Matua, dalam hal mengawasi perbuatan dan perilaku keturunannya termasuk memberikan berkah kepadanya. Untuk itulah maka manusia selain memuja dan menyembah kepada Puang Matua dan Deata-deata juga ada pemujaan kepada Tomembali Puang sebagai tanda bakti ketaatan terhadap leluhurnya. Ketaatan itu terwujud dalam bentuk kebaktian dan persembahan berupa sesajian.

Ketiga kekuasaan tersebut merupakan kekuatan gaib yang dipercaya dan disembah oleh manusia dengan cara mempersembahkan kurban-kurban yang terdiri dari hewan-hewan seperti kerbau, babi, dan ayam. Biasanya persembahan itu dilakukan secara terpisah, dalam waktu dan cara yang berbeda pula sesuai dengan struktur kekuasaan itu.

2.5.2 *Kepercayaan Toani Tolotang*

Sama seperti kepercayaan Aluk Todolo, kepercayaan Toani Tolotang juga mempercayai adanya Dewa-dewa di samping Dewa utama (Dewata Seuwae). Adapun nama-nama dewa itu sesuai dengan wilayah kekuasaannya yaitu : Dewata Langie, Dewata Mallinoe, dan Dewata Uwae³⁰.

Dewata Langie yaitu suatu dewa yang menghuni langit. Dewa ini diharapkan mendatangkan hujan yang sekaligus membawa kemakmuran. Di samping itu Dewata Langie juga dapat membawa kerusakan kepada ummat manusia dengan jalan menurunkan petir atau mendatangkan kemarau yang panjang. Dalam persembahan sajian, manusia harus menyediakan empat warna makanan yang ditempatkan pada sebuah tempat khusus yang diletakan di bagian atas (loteng) rumah.

Dewata Mallinoe yaitu suatu dewa yang banyak menempati tempat-tempat tertentu di dunia seperti di belokan jalan, pohon besar dan tempat-tempat keramat. Manusia sering memberikan saji-sajian dengan meletakan atau menggantung beberapa macam buah-buahan, makanan,

lauk pauk dan binatang sebagai persembahan agar tidak mengganggu ketentraman manusia.

Dewata Uwae yaitu dewa air yang bertempat tinggal di lautan, sungai dan danau. Untuk memberikan saji-sajian kepada dewa air ini, penduduk sering membuat sebuah rumah miniatur yang di dalamnya berisi daun-daunan, makanan, dan beras warna-warni kemudian dilabuhkan.

Asal mula kepercayaan ini ketika seorang laki-laki bernama La Paunangi mendengar suara Dewata Sauwae yang yang tidak diketahui entah dari mana datangnya. Suara itu menyerukan agar La Paunangi menghentikan kepercayaan yang dianutnya karena tidak dapat memberikan di dunia dan hari kemudian, kemudian menggantinya dengan kepercayaan baru yang lebih mulia dan suci. Setelah La Paunangi bersedia menerima ajaran itu, maka ia diangkat menjadi Nabi dan diperintahkan menyebarkan ajaran itu turun temurun sampai keanak cucunya. Secara garis besar kepercayaan itu meliputi keyakinan terhadap Dewata Sauwae, aturan-aturan perkawinan, Tarekat yang dilalui, nasehat-nasehat serta larangan³¹.

2.5.3 Kepercayaan Patuntung

Berbeda dengan dua kepercayaan yang disebutkan diatas, kepercayaan Patuntung rupanya dapat dianggap sebagai sinkritisme antara kepercayaan asli dengan agama samawy. Dikatakan sinkritisme karena selain memiliki beberapa persyaratan yang biasanya harus dimiliki suatu agama langit yaitu mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, mempercayai adanya kenabian, kitab suci, dan hari pembalasan; juga masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan seperti dalam kepercayaan Animisme dan Dinamisme.

Nabi bagi kepercayaan Patuntung adalah Amma Toa yaitu seorang pemimpin pertama kepercayaan itu, yang dengan kepandaianya pula dapat menciptakan "kitab suci". Kitab suci yang mereka namakan Patuntung (tuntunan) itu merupakan pedoman bagi setiap pengikutnya dalam menjalankan kaidah-kaidah kerohanian. selain ajaran kaidah kerohanian, kitab ini juga berisi mantera-mantera yang dapat dipergunakan untuk pengobatan, berbagai macam aturan berpakaian, mandi dan kawin mawin³².

Apabila kitab suci Ptuntung diarak disuatu tempat itu berarti di tempat itu terjadi suatu malapetaka yang luar biasa seperti adanya wabah menyakit menular, yang hanya bisa ditanggulangi oleh kesaktian kitab itu.

Setiap pemeluk Patuntung wajib menerima semacam azimat yang berfungsi sebagai penolak bala dan penjaga keselamatannya. Azimat ini harus dijaga dengan berbagai macan kelakuan yang irrasional seperti: tidak diperkenankan mandi kecuali di hari-hari tertentu yang diatur dalam kitab. Jika larangan itu dilanggar maka hilanglah kekebalan badan yang dimilikinya. Selain itu diwajibkan pula memakai pakaian dan ikat kepala yang warna hitam pekat kemanapun mereka bepergian.

Salah satu hal yang dianggap penting bagi mereka yang bermaksud mengunjungi daerah atau pusat dari kepercayaan Patuntung di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yaitu salam Patuntung. Jika pendatang salah menerima atau mengucapkan salam Patuntung, maka yang bersangkutan akan menerima akibat yang fatal. Apabila mereka bertemu dengan seseorang yang asing dan belum dikenalnya, mereka memberi salam penghormatan dengan mengucapkan "Assalamu Alepu" yang maksudnya selamat bersatu. Adapun jawaban dari salam ini ialah "Alepu Tallasa" yang berarti bersatu pasti hidup.

2.5.4 Pranata Keagamaan

Secara historis, pranata keagamaan atau kepercayaan di Pulau Sulawesi telah cukup mapan jauh sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, karena mereka telah menganut ajaran yang lebih menekankan kepada kerohanian-kejiwaan. Orang Sulawesi sadar bahwa dunianya terdiri dari dua aspek, yaitu dunia yang nyata dan dunia yang tidak tampak. Dunia yang tidak tampak adalah dunia di luar jangkauan pancainderanya, dan menurut keyakinannya bahwa di dalam dunia itu terdapat berbagai makhluk dan kekuatan alam yang tidak dapat dikuasai oleh manusia secara biasa, melainkan dengan cara yang luar biasa. Karena kebanyakan orang Sulawesi tergolong tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk menghadapi kemurkaan makhluk dan kekuatan alam tersebut, timbullah ketakutan terhadap mereka. Salah satu jalan yang paling mudah ditempuh untuk menanggulangi kemurkaan makhluk dan kekuatan alam itu, yaitu mengambil hati mereka dengan cara menyembah

atau mengirimkan saji-sajian. Dengan cara tersebut diharapkan mereka dapat memberi perlindungan dan membantu dalam merealisasikan cita-cita hidup manusia.

Untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak utamanya maksud manusia mengadakan persembahan, maka diperlukan suatu wadah sebagai mediator. Berawal dari sini maka terbentuklah lembaga atau prana sosial keagamaan (perdukunan) yang berfungsi sebagai penghubung antara makhluk (Dewa, Roh Nenek Moyang, Kekuatan Alam) dengan manusia biasa.

Demikianlah awal mula terbentuknya pranata keagamaan menurut kepercayaan Animisme, Dinamisme dan kepercayaan kepada Dewa-dewa. Sangat sulit menentukan secara pasti kapan kepercayaan itu dimulai, karena sampai sekarang pun kepercayaan tersebut masih tetap berlangsung. Di kalangan penduduk Sulawesi yang sudah menganut Agama Islam dan Kristen, terutama di daerah pedesaan masih dijumpai praktek-praktek keagamaan yang berpedoman kepada kepercayaan lama. Begitupun dalam berbagai upacara yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan adat-istiadat seperti upacara turun ke sawah dan upacara kelahiran serta kematian, saji-sajian masih tetap dipertahankan.

Menurut kepercayaan terdahulu, bahwa Dewata mereka dahulu kala itu tidak mempunyai tempat bersemayam tertentu, dan tidak selalu di suatu tempat. Para Dewata itu baru berada di tempat bersemayam jika sedang ada upacara atau persajian. Hubungan antara individu dengan dewata dan antara masyarakat dengan dewata, diatur oleh suatu lembaga keagamaan. Selain kepercayaan adanya dewata, juga ada kepercayaan bahwa di dunia ini juga dihuni oleh makhluk-makhluk halus berupa Jin, setan dan lainnya. Meskipun kedudukan makhluk ini lebih rendah tingkatnya tetapi selalu mengganggu manusia. Untuk itulah maka persajian lebih banyak terhadap dirinya dibanding dengan dewata.

CATATAN

1. R. Mohammad Ali, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Ganaco, 1962), Hlm. 77-78.
2. Yusuf Martum, *Alat Batu sepih-Bila di Padang Lampe Kabupaten Barru Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993), hlm. 19-20.
3. Lihat Abdul Rahim, *Sulawesi Tengah dan Bahan Galian*, (Palu: Dinas Pertambangan Sulawesi Tengah, 1991). hlm. 19.
4. Yusuf Martun, *op.cit.*, hlm. 20.
5. Mattulada, *Geografi Budaya Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan. 1982) hlm. 11.
6. Keterangan mengenai ditemukannya kapak genggam dan timbunan sampah dapur di Sulawesi dapat dilihat pada karya Sri Mustika, *Molluska Sebagai Sisa Sampah Dapur Manusia Prasejarah Pada Situs Gua-gua di Minasate'ne*, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1990).
7. Lihat Soekmono, *op.cit.*, hlm 42.
8. *Ibid.*
9. Untuk lebih jelasnya lihat Muhammad Ramli, *Lukisan Dinding Gua Sakapao Maros Pangkep*, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1987), Koentjaraningrat (ed.), "Penduduk Indonesia Tertua dan Persebaran Bangsa-bangsa dalam Zaman Pre-history", dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1970), hlm. 1-34.

10. Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 9; Soekmono, *op.cit.*, hlm. 58
11. Matulada. "*Kebudayaan Bugis Makassar*" dalam Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 261.
12. Masyarakat majemuk berarti suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lainnya dalam suatu kesatuan. Mengenai kemajemukan ini dapat dilihat dalam deskripsi Suwarsih Warnaen, "Streotip etnik di dalam suatu bangsa yang multietnik", dalam *Majalah Masyarakat Indonesia* I, 1974. hlm. 63.
13. Soejono, "Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Prasejarah Indonesia", dalam *Aspek-aspek Arkeologi Indonesia*, Nö. 5. (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1981), hlm. 15-16.
14. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia* I, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hlm. 23.
15. Soekmono, *op.cit.*, hlm. 61.
16. Harry Widianto, "Temuan Alat Paleolitik di Situs Mulyorejo" dalam *Bulletin Artepak*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 31.
17. Yusuf Martun, *Alat Batu Serpih-Bilah di Padang Lampe Barru*, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993), hlm. 58-59.
18. Soekmono, *op.cit.*, hlm. 32.
19. Lihat R.P. Soejono, "Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Prasejarah Indonesia" dalam *Aspek-aspek Arkeologi Indonesia*, No. 5. (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1981), hlm. 15-16.
20. Soekmono, *op.cit.*, hlm. 38.
21. Lihat isi karangan H.R. van Heekeren, 1957. "over Toala's en de Toala Cultuur", dalam *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift van Nederlandsch Indie*, hlm. 229-237.
22. Nur Mulyadi, *Tipe-tipe gua hunian prasejarah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan*, (Ujung Pandang : Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993).

23. Mursyida, *Lukisan Manusia di Dinding Gua-gua Prasejarah Kompleks Bellae Kabupaten Pangkajene Kepulauan*, (Ujung Pandang : Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993).
24. Harun Kadir, *Aspek Megalitik di Toraja Sulawesi Selatan*, Paper yang di sampaikan pada pertemuan ilmiah arkeologi I, (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1977), hlm. 89.
25. Lihat, Talib Rasak Liga, *Situs Megalitik Pangesorang di Kabupaten Maros*, (Ujung Pandang: skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993), hlm. 33-38.
26. Untuk lebih jelasnya lihat Andi Bastian, *Menhir Watu Mpogaa di Pamona Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah*, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1994).
27. Roswati, *Bangunan Teras Berundak Situs Ne'ku Mombong*, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1993).
28. Diman Suryanto, "Tradisi Megalitik di Asia Tenggara: Kajian Tentang Masa Lalu dan Kini" dalam *Kajian Arkeologi Indonesia: Metode dan Teori*, (Yogyakarta IAAI, 1989), hlm. 21.
29. Hariati Santiko, "Bangunan Berundak Teras Majapahit: Benarkah Pengaruh Punden Berundak Prasejarah" dalam *Kajian Arkeologi Indonesia*, (Yogyakarta: IAAI, 1989), hlm. 311.
30. Mengenai Jenis-jenis Dewata dapat dilihat dalam, Aminah P. Hamzah dan kawan-kawan, *Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1984), hlm. 118-120.
31. Keterangan yang lebih lengkap mengenai kepercayaan Toani Tolotang dapat di lihat pada buku M. As'ad El Hafidi, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 51-57.
32. M. As'ad El Hafidi. *op.cit*, hlm. 23-29.

BAB III

KEBUDAYAAN ABAD XIV--XVII

Kenneth R. Hall meyakini sebelum abad ke-14 dan permulaan abad ke-15, di Asia Tenggara telah berkembang lima jaringan perdagangan (*commercial zones*)¹. Salah satu di antaranya adalah jaringan perdagangan Laut Jawa, yang wilayahnya meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Sulawesi, pesisir barat dan timur Kalimantan, bagian selatan Sumatera, dan Jawa. Jaringan perdagangan ini berada dalam pengawasan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sementara dalam *Negarakertagama* yang ditulis oleh Prapanca sekitar tahun 1365 mengkisahkan perjalanan ekspedisi Majapahit menyinggahi pula sejumlah tempat di Sulawesi, seperti Bantaeng Luwu, Selayar dan Uda (?) dan kemudian sejumlah pulau yaitu Selayar, Buton, Banggai dan Makassar (?)².

Dua sumber yang telah diungkapkan itu ternyata belum memberikan keterangan yang memadai tentang kehidupan masyarakat di kawasan itu, khususnya kawasan Sulawesi. Sumber yang memberitakan keterangan yang memadai adalah sumber-sumber dari para pengembara Portugis, meskipun sejumlah keterangan masih sulit diidentifikasi, seperti keterangan tentang pulau-pulau Makassar *ilhas dos Macassar*. Wilayah yang para pengembara itu menamakan Pulau-pulau Makassar adalah pulau-pulau yang terletak di bagian utara Pulau Sumbawa. Ini tampak juga dalam pemberitaan Tome Pires yang mengkisahkan

kunjungan para pedagang dari Pulau-pulau Makassar, termasuk Kalimantan yang dikenal dengan sebutan *A grande ilha de Maguacer* (Pulau Makasar yang besar)³. Menurut Tome Pires penduduk dari kepulauan itu telah lama melakukan pelayaran niaga dengan Jawa, Kalimantan dan dengan pusat-pusat perdagangan antara Siam, Pahang hingga Pegu (Birma).

Berlandaskan diskripsi Tome Pires tentang pedagang-pedagang itu nampak bahwa keseluruhan mereka dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok pedagang Bugis dan Makassar, yaitu mereka yang datang berniaga dengan membawa beras yang putih dan sejumlah emas. Kelompok ini datang tidak bersama istri, mereka selalu menggunakan keris, dan konstruksi tubuh mereka mirip dengan orang Siam. Sementara kelompok kedua adalah orang-orang Bajo atau Sama; kelompok ini dinyatakan berlayar bersama istri dan anak, membawa tombak, melakukan perompakan dan memperdagangkan budak, orang rampasan mereka⁴.

Keterangan-keterangan itu memberikan petunjuk bahwa kehidupan kultural masyarakat di wilayah itu yang diberitakan hanyalah kehidupan kemaritiman. Oleh karena itu pembahasan menyangkut kehidupan budaya masyarakat di Sulawesi pada abad ke-14 hingga abad ke-17 diarahkan pada kehidupan kemaritiman. Dalam kaitan dengan objek perhatian itu, pembahasan kelak berawal pada munculnya kota-kota pantai dan perkembangan Kerajaan maritim di kawasan itu, mendahului pembahasan menyangkut keadaan sosial, ekonomi, politik dan kultural.

3.1 Kota-kota Pantai

Kapan sesungguhnya awal munculnya kota-kota pantai di Sulawesi sangat sulit ditetapkan. Meskipun demikian dapat dipastikan bahwa sejak abad ke-14 telah terdapat sejumlah pusat-pusat perdagangan di wilayah pesisiran Sulawesi. Dalam buku *Negarakertagama* terdapat sejumlah nama-nama dan tempat yang dapat diidentifikasi letaknya di pesisiran, seperti Luwu, Buton, Banggai dan Selayar, di samping Uda dan Makassar yang masih sulit diidentifikasi di mana letaknya pada wilayah pesisiran Pulau Sulawesi. Sementara dari naskah lokal masyarakat Sulawesi Selatan dijumpai pula sejumlah nama pusat perdagangan, seperti Gorontalo dan Tompo Tika yang terletak pada pesisir selatan

jazirah utara Pulau Sulawesi. Meskipun demikian kegiatan kemaritiman di daerah-daerah itu tidak diberitakan sehingga masih sulit untuk diidentifikasi dan diungkapkan.

Hall hanya berhasil mengungkapkan jalur pelayaran pedagang-pedagang dari Jawa yang memegang hegemoni pelayaran niaga pada jaringan perdagangan laut Jawa (abad ke-13 hingga abad ke-14). Pedagang-pedagang Jawa mengawali pelayaran niaga mereka ketika angin muson barat laut mulai bertiup yaitu pada bulan Nopember. Mereka berlayar ke arah timur menelusuri Kepulauan Nusa Tenggara untuk memasuki wilayah produksi rempah-rempah yaitu Maluku. Dari Maluku mereka melanjutkan pelayaran niaga sambil menunggu bertiupnya angin muson tenggara (bermula pada bulan Juni) untuk berlayar memasuki jaringan perdagangan Sulu melalui Selat Makassar. Ketika angin muson tenggara mereda (akhir bulan Juli) dan kembali bertiup angin muson timur laut. Mereka meninggalkan Jailolo (pusat perniagaan Sulu) berlayar menelusuri pesisir timur Kalimantan terus memasuki jaringan perdagangan Selat Malaka. Setelah itu mereka kembali menunggu hingga bertiup muson angin barat laut untuk berlayar pulang ke negeri mereka (Jawa) menelusuri pesisir timur Pulau Sumatera.

Tampaknya pemberitaan *Hall* ini didasarkan pada kenyataan munculnya kota-kota pelabuhan yang merupakan pusat-pusat perniagaan pada wilayah pesisiran itu yang mulai terungkap ketika pedagang Eropa, khususnya orang Portugis mulai terlibat dalam dunia niaga di kawasan jaringan perdagangan-jaringan perdagangan Asia Tenggara, khususnya setelah mereka berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511. Tome Pires yang pernah menetap di Malaka pada tahun 1516 bergiat mengumpulkan keterangan dari para pedagang tentang kegiatan perniagaan di Kawasan itu. Keterangan yang dikumpulkan itu tercatat pula kegiatan pelayaran niaga penduduk dari kawasan yang ketika itu dikenal dengan nama Pulau-pulau Makassar dan diketahuinya jalur pelayaran baru yang lebih singkat untuk memasuki Maluku yaitu jalur melalui Kepulauan itu⁵.

Keterangan itu memberikan dorongan kepada pedagang Portugis untuk mengalihkan jalur pelayaran mereka ke Maluku, selama ini menggunakan jalur pelayaran selatan melalui Pulau-pulau Makassar. Jalur pertama adalah memilih menelusuri pesisir utara Kalimantan untuk

memasuki kawasan jaringan perdagangan Sulu, kemudian memasuki pulau rempah-rempah. Dalam kegiatan pelayaran niaga itu sebagian armada niaga tersesat memaski wilayah Sulawesi Selatan, seperti armada niaga yang dipimpin oleh Jorge de Castro yang mendarat di Somba Opu⁶. Keterangan De Castro itu kemudian merubah pilihan jalur pelayaran pedagang Portugis. Mereka mulai menelusuri pelabuhan-pelabuhan pesisir barat Sulawesi dalam pelayaran mereka ke Maluku itu.

Dari catatan pelayaran niaga pedagang Portugis inilah mulai diperoleh keterangan tentang kota pelabuhan-kota pelabuhan di Sulawesi seperti: Qarasi, Tallo, Siang, Bacokiki, Suppa, Sidenreng, Napo (Balanipa), Kaili (Donggala) pada pesisir barat pulau Sulawesi dan Buton, Tomboku, Toli-toli dan Banggai pada pesisir timurnya, Menado pada pesisir utara dan Selayar⁷. Kota pelabuhan-kota pelabuhan lainnya, seperti Luwu, Bantaeng dan Tompotika nampak terabaikan, namun itu tidak berarti kota pelabuhan belum ada, karena naskah-naskah lokal yang lebih awal telah mencatat kehadiran kota pelabuhan itu.

Di antara kota-kota pelabuhan itu yang terpenting adalah Menado (*Ilha Vdama atau Menade*) yang terletak di wilayah Sulawesi Utara yang ketika itu lebih dikenal dengan nama Celebes (*Celebres*) regiam⁸. Kota pelabuhan itu dikenal dalam perdagangan kayu cendana, hal yang mendasari penamaannya dalam bahasa "*Vdama*". Kota pelabuhan ini juga merupakan pelabuhan singgah dari pedagang-pedagang yang datang dari utara seperti dari Sulu (kemungkinan juga dari Cina) dalam pelayaran ke Maluku dan pada pihak lain pedagang-pedagang dari Jawa dan Makassar yang membawa kayu cendana dari Pulau Sumba dan Timor. Komoditi itu pada umumnya diekspor ke Sulu, Cina dan ke Malaka. Dalam perkembangan kemudian kota pelabuhan ini dikunjungi pula oleh pedagang Portugis dalam perjalanan pelayaran mereka ke Maluku.

Kota pelabuhan lainnya yang terpenting adalah Siang atau Siau yang terletak pada pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi. Menurut *Antonio de Paiva*, seorang pedagang Portugis yang mengunjungi kota pelabuhan itu pada tahun 1542, bandar niaga ini sejak lama menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Melayu dan diperkirakan pedagang-pedagang itu mulai menetap sekitar tahun 1490. Migrasi pedagang Melayu semakin banyak ke pusat niaga ini ketika Portugis berhasil menduduki Malaka. Menurut Manoel Pinto, penduduk bandar

niaga itu berjumlah sekitar 40.000 orang pada tahun 1545, jumlah yang sangat banyak bagi kehidupan suatu bandar niaga ketika itu. Bahkan dinyatakan bahwa penguasa bandar ini memiliki pengaruh kekuasaan atas kerajaan Tallo dan Kerajaan Gowa⁹.

Usaha perluasan pengaruh kekuasaan terhadap Kerajaan-Kerajaan yang terletak di bagian selatan (Tallo dan Gowa) itu erat berkaitan dengan usaha pengawasan jalur pelayaran dan perlindungan terhadap kedudukan bandar niaganya. Semakin ramainya pelayaran niaga di kawasan itu telah mendorong Kerajaan Gowa yang berada pada pemerintahan Karaeng Tumaparissi Kalonna (1510-1546) bergiat untuk mengembangkan bandar niaganya (Somba Opu)¹⁰. Sehubungan dengan keinginan itu, maka langkah awal adalah memerangi Kerajaan tetangganya yaitu Kerajaan Tallo. Perang ini berakhir dengan dicapainya perjanjian perdamaian pada tahun 1528, yang merupakan ikrar bersama untuk membentuk satu kesatuan, dengan sumpah yang berbunyi: “barang siapa yang mengadudombakan Gowa dan Tallo dia akan dikutuk oleh Dewata” *ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo’ iamo nacalla rewata*¹¹. Kesatuan Kerajaan Gowa dan Tallo ini yang kemudian disebut Kerajaan Makassar, suatu bentuk kerajaan yang oleh penulis-penulis Belanda disebut *susters rijken* (Kerajaan bersaudara) atau yang lazim diterjemahkan dengan kata “Kerajaan kembar”.

Terbentuknya Kerajaan Makassar ini mengawali munculnya keinginan untuk memegang hegemoni kekuasaan di wilayah Sulawesi bagian selatan. Keinginan itu tampak dalam usaha yang dilakukan untuk menaklukkan Kerajaan-Kerajaan yang bergiat dalam usaha niaga, seperti: Siang, Bacokiki, Suppa, Sidenreng, Garassi, Ketingang, Perigi, Lembangang, Bulukumba dan Selayar, di samping menjalin hubungan persahabatan dengan sejumlah Kerajaan lain¹². Usaha itu berhasil mengalihkan kedudukan bandar niaga lain ke pelabuhan Somba Opu dan Tallo dan menampilkan penguasa dua Kerajaan itu tampil menguasai sumber pendapatan perdagangan (pajak) di kawasan itu.

Pada dasarnya semua kota pelabuhan di Sulawesi lebih banyak berkedudukan sebagai pelabuhan singgah dalam pelayaran pedagang-pedagang ke Maluku. Namun dalam perkembangan kemudian, setelah Gowa dan Tallo tampil, maka pelabuhan lain lambat-laun menyirna dan pelabuhan Somba Opu dan Tallo yang tampil sebagai pelabuhan singgah

dan pusat perniagaan di Sulawesi. Hal itu didukung pula dengan mengurangnya pemakaian jalur pelayaran orang Portugis melalui pesisir utara Kalimantan memasuki Menado baru kemudian ke Maluku dan meningkatnya pemakaian jalur pelayaran dari Malaka melalui Tanjungpura ke Makassar kemudian ke Maluku dan kembali melalui jalur yang sama. Keadaan itu pada gilirannya mendorong kota-kota pelabuhan lainnya giat menjalin hubungan niaga ke Makassar.

F.W. Stapel menyatakan bahwa perdagangan Makassar memiliki karakter yang menarik perhatian, karena negeri itu dapat mengembangkan diri dalam dunia niaga walaupun tidak menghasilkan komoditi dagang, kecuali beras dan ternak. Meskipun demikian pedagang Portugis dari Malaka dan Maluku selalu mengunjungi kota pelabuhan itu dan menjadikan negeri itu sebagai pelabuhan singgah. Selain itu yang menarik adalah transitonya dalam komoditi rempah-rempah dan kayu cendana. Menurut Stapel :

“Sebelum kedatangan orang Eropa, orang Makassar adalah pelaut yang ulung. Barang dagangan yang telah disebut itu, mereka memuat dalam perahu dan jung mereka dari Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dan membawa melalui Makassar ke pelabuhan yang terletak di bagian utara dan barat. Di samping itu orang Bugis, Melayu dan Jawa juga membawa produksi mereka untuk diperdagangkan di Makassar, terutama setelah Portugis merebut Malaka pada tahun 1511

...”¹³

Gambaran keadaan perdagangan Makassar pada permulaan abad ke 16 ini menunjukkan bahwa Makassar ketika itu telah berkedudukan sebagai pusat perdagangan terpenting, yang berkedudukan sebagai pelabuhan internasional dan pelabuhan transito, bukan hanya untuk kawasan Sulawesi tetapi juga kawasan timur Indonesia.

Dalam catatan Speelman yang dibuat pada tahun 1669 setelah Makassar diduduki oleh VOC disebutkan bahwa sebelum Makassar direbut, Kerajaan itu telah menjalin hubungan niaga dengan bandar niaga: Manggarai, Timor, Tanimbar, Alor, Bima, Buton, Tomboku, Seram, Mindanao, Sambuangan, Makao, Manila, Cebu, Kamboja, Siam, Patani, Bali, pelabuhan di pesisir utara Jawa, Batavia, Bantam, Palembang, Jambi, Johor, Malaka, Aceh, Banjarmasin, Sukadana, Pasir, Kutai, Berau dan lainnya. Sementara komoditi dagang yang dicatat antara lain: rempah-rempah, kayu cendana, budak, berjenis-jenis produksi dari India (karikam, draam, touria gadia, bethilles dan lainnya), produksi Cina

(porselin, sutra, emas, perhiasan emas, gong, dan lainnya), kayu sapan, rotan, lilin, parang, pedang, kapak, kain Selayar, kain Bima, sisik penyu dan mutiara¹⁴.

Kemajuan Makassar pada paruh kedua abad ke-17 itu dinyatakan oleh Anthony Reid sebagai “kisah kemajuan dan keberhasilan yang luar biasa dalam sejarah Indonesia”. Kemajuan dan keberhasilan yang dicapai itu sirna setelah Makassar berhasil direbut oleh VOC pada tahun 1669. Sejak itu dunia perdagangan di Sulawesi hanya berkembang pada kota-kota pelabuhan kecil, seperti Tomboku, Menado, Kali, Napo dan Suppa. Sementara kota-kota pelabuhan lain, seperti Tallo, Siang, Bacokiki, Garasi, Bantaeng dan Bulukumba yang disirnakkan oleh Kerajaan Makassar tidak dapat mengembangkan kedudukannya lagi karena wilayah itu termasuk wilayah yang diduduki oleh VOC berdasarkan perjanjian Bungaya yang dicapai pada tahun 1667.

3.2 *Kerajaan-kerajaan Maritim*

Alfred Thayer Mahan, dalam kajiannya tentang pengaruh kekuatan maritim dalam sejarah, menyatakan bahwa apabila keadaan pantai suatu negara memungkinkan penduduknya turun ke laut maka mereka akan lebih bergairah mencari hubungan ke luar melalui laut. Dorongan untuk menjalin hubungan dengan wilayah luar berkaitan dengan kecenderungan penduduknya untuk berdagang yang pada gilirannya akan melibatkan kebutuhan untuk memproduksi barang-badan dagangan¹⁶. Usaha untuk meningkatkan produksi berkaitan erat dengan permintaan akan komoditi itu sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan terjadi karena masyarakat membutuhkan komoditi yang tidak dihasilkan sendiri sementara dalam kaitan inilah Edward L. Poelinggomang menyatakan bahwa *trade is the oldest and most in every epoch because societies have sought goods not easily available at home...*¹⁷. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pajak perdagangan merupakan sumber yang terpenting bagi kesejahteraan elite politik dan para raja-raja sehingga banyak kekuasaan yang dikembangkan pada jalur perdagangan dan bergiat untuk tampil sebagai kekuatan yang mengawasi route perdagangan, baik itu dilakukan secara damai maupun melalui perang. Pemerintah yang melakukan tindakan politik seperti itu yang disebut kekuasaan maritim (Kerajaan maritim atau negara maritim), suatu

Kerajaan atau negara yang ingin mengawasi laut sebagai infra struktur dalam kegiatan perdagangan.

Keterangan masa lampau memberikan petunjuk telah berdirinya Kerajaan-kerajaan kecil dengan bentuk pemerintahan yang baik di Pulau Sulawesi sejak abad ke-14, namun hanya sebagian kecil yang dapat berkembang dan mampu membina kekuatan laut sehingga dapat menguasai wilayah maritim yang cukup luas. Di wilayah kepulauan bagian utara Sulawesi, Kepulauan Sangihe dan Talaud, terdapat keterangan tentang Kerajaan Siau yang terletak pada bagian selatan pulau Sangihe Besar menguasai beberapa daerah di Sulawesi Utara¹⁸. Luas kawasan maritim yang dikuasai ini memberikan petunjuk keberanian dan jiwa petualang pelautnya cukup besar, untuk melakukan ekspedisi kemaritiman ke daerah yang lebih jauh.

Sementara pada wilayah jazirah utara terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Kerajaan Limboto (Salah satu Kerajaan dari konfederasi Lima Pahalaa, Gorontalo), pernah melakukan ekspedisi perluasan kekuasaan lintas laut ke arah selatan, ke seberang pesisir Teluk Tomini. Ratu Tomini dinyatakan menguasai wilayah antara Tanjung Api hingga Sausu (Kerajaan Tengah) pada abad ke-14¹⁹. Andrian B. Lopian memperkirakan bahwa ekspansi kekuasaan itu berkaitan dengan perpindahan orang Boalemo dari Luwu ke Gorontalo.

Kedudukan kekuasaan maritim dari Kerajaan-kerajaan Siau dan Tomini itu tampaknya tidak terus dikembangkan, karena itu berita tentang kemajuan kegiatan maritim juga tidak banyak diungkapkan ketika pedagang Eropa memasuki kawasan ini. Suatu perkembangan baru terjadi pada abad ke-15, yaitu tampilnya beberapa kerajaan kecil di pesisir barat jazirah selatan dalam dunia kemaritiman. Kerajaan Mandar mulai tampil bergiat mengawasi jalur pelayaran ke arah utara, diberitakan bahwa Kaili dan Gorontalo berhasil di bawah pengaruh kekuasaannya. Gorontalo dalam perkembangan kemudian ketika Kerajaan Makassar semakin luas pengaruh kekuasaannya, diserahkan pengawasannya kepada Kerajaan Makassar. Sementara di pesisir bagian selatan tampil Kerajaan Siang memegang hegemoni ke arah kawasan selatan. Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dinyatakan berada dalam pengawasannya²⁰.

Kekuatan maritim di kawasan ini berubah ketika kerajaan Gowa-Tallo berhasil membentuk persekutuan pemerintahan pada tahun 1828. Hal itu disebabkan ambisi dari Kerajaan kembar itu untuk tampil memegang hegemoni kekuasaan di kawasan itu, melalui ekspansi atas Kerajaan-kerajaan pesisir, ke arah utara hingga Suppa dan ke selatan hingga Bulukumba. Usaha ini pada awalnya tidak jauh berbeda dengan pola umum yang digunakan oleh Kerajaan-kerajaan taklukan diwajibkan setiap tahun membayar upeti (sabukati).

Namun dalam perkembangan kemudian, setelah Kareang Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) menduduki tahta Kerajaan Makassar menggantikan Karaeng Tuniparissi Kalonna, ia menjalankan suatu kebijaksanaan baru untuk melakukan penaklukan kembali dari memaksa Kerajaan taklukan menyatakan ikrar "makkanama nu mammio" (aku bertitah dan kamu taati)²¹. Kebijaksanaan Tunipallangga Ulaweng ini bukan hanya mengarah pada penaklukan saja tetapi yang paling penting adalah melaksanakan pembersihan bandar niaga Kerajaan taklukan, dengan cara mengangkut barang dan orang dari wilayah itu ke Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu bertujuan menyapakan bandar niaga Kerajaan-kerajaan lain di wilayah itu dan menjadikan Makassar sebagai satu-satunya pusat perniagaan di kawasan itu. Kebijaksanaan itu berakibat perdagangan pedagang Jawa, Melayu dan lainnya yang sebelumnya telah menetap pada bandar niaga lain, seperti Siang, Bacokiki dan Suppa pindah mohon izin kepada raja Makassar untuk menetap di wilayah kota pelabuhannya²².

Dalam rangka mempertahankan hegemoni kekuasaannya di kawasan jalur pelayaran niaga utara ke dan dari Maluku, Kerajaan Makassar bergiat membenahi organisasi politik, ekonomi dan sosialnya. uncul jabatan-jabatan baru, seperti Tumakkajananggang (pimpinan urusan perlengkapan dan perang), dipisahkannya jabatan Tumailalang (Pati) dan Sahbandara (syahbandar), diciptakannya organisasi kerja seperti: pembuatan perahu, tali, larik, sumpitan, senjata, pandai besi, pandai emas, bangunan dan lainnya²³. Pembenahan organisasi politik dan ekonomi itu akhirnya menjadi Kerajaan ini tampil sebagai satu kekuatan maritim yang kuat dan besar di Kawasan Sulawesi bagian selatan.

Sementara Sulawesi bagian utara terjadi distorsi yang tidak memungkinkan Kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuatan laut

mengembangkan kekuasaannya pada periode yang sama dengan Kerajaan Makassar, karena daerah itu merupakan daerah ajang pertikaian antara Portugis dan Spanyol. Pertikaian antara dua bangsa Liberia itu terjadi karena Paus Alexander IV tidak menetapkan batas yang jelas di kawasan timur dalam membagi kawasan luar Eropa kepada dua kekuatan itu pada tahun 1494 (Perjanjian Tordesillas).

Portugal yang hadir di kawasan itu mendahului Spanyol telah berhasil memperluas pengaruhnya melalui penyebaran agama Kristen sekitar tahun 1563, Fr. Diogo de Magelhaes melaporkan bahwa ia telah berhasil membaptis (mengkristenkan) 1500 orang di Manado sedangkan di Kerajaan Siau Raja dan 2500 pengikutnya telah menerima Agama Kristen²⁴. Namun ketika Spanyol di bawah Miquel Lopez de Lagazpi berhasil menduduki Manila dan menjadikan negeri itu sebagai pusat kekuasaan Spanyol di Pilipina pada tahun 1571, ia mulai bergiat memperluas ke arah selatan memasuki kawasan laut Sulawesi. Tindakan itu yang berakibat terjadi pertikaian yang berlarut antara dua kekuatan itu yang pada gilirannya tidak memberikan peluang bagi kekuatan maritim di kawasan itu mengembangkan kedudukannya, Pertikaian itu akhirnya dapat diselesaikan dengan dicapainya ketetapan bahwa Kepulauan Pilipina masuk dalam “wilayah Spanyol” dan Kepulauan Maluku masuk dalam “wilayah Portugis”.

Penentuan wilayah pengaruh itu ternyata tidak menjamin ketentraman Portugis di Maluku, karena pulau rempah-rempah itu diincar pula oleh bangsa lain yaitu Belanda. Kehadiran Belanda di Maluku menghadirkan kembali perasaan permusuhan mereka di Eropa. Dalam pertarungan itu pedagang-pedagang Belanda yang terorganisasikan dalam Perkumpulan Dagang Hindia Timur (VOC = *Verenigde Oost Indie Compagnie*) berhasil tampil sebagai pemenang dan berusaha memonopoli perdagangan di Maluku dan terus mengusik kehadiran Spanyol di kawasan itu pada tahun 1614, berkat bantuan VOC berhasil menghalau Spanyol dari Siau dan menguasai negeri itu.

Kawasan Sulawesi Utara juga tidak terlupakan dari pertarungan antar Spanyol dan VOC. Tindakan kesewenangan yang dilakukan pihak Spanyol terhadap penduduk setempat mendorong mereka memohon bantuan pedagang-pedagang Belanda (VOC) untuk mengusir orang-orang Spanyol pada 1644. Pihak VOC tampaknya kurang menaruh

perhatian untuk menduduki wilayah itu sehingga setelah berhasil menghalau musuh, mereka meninggalkan daerah itu dan kembali memusatkan perhatian untuk melakukan monopoli rempah-rempah. Oleh karena itu Spanyol kembali berusaha menduduki Minahasa pada tahun 1651. Hal ini mengundang pihak Spanyol dari negeri itu pada tahun 1657 Peristiwa yang terakhir ini mendorong VOC mengawali pengawasan langsung atas daerah itu dengan mendirikan sebuah benteng pertahanan di Menado yang dinamakan "Fort Amsterdam". Kedudukan VOC di kawasan itu kemudian disahkan dengan dicapainya perjanjian pada 10 Januari 1679²⁵.

Permusuhan dan persaingan yang berlangsung antara Belanda pada satu pihak Portugis dan Spanyol pada pihak lain memberikan peluang yang besar kepada Kerajaan Makassar yang ketika itu menghadapi tantangan dari pihak VOC. Portugis dan Spanyol dalam mengimbangi lawan mereka, memberikan bantuan dan dukungan kepada Kerajaan Makassar dalam menghadapi ancaman VOC. Salah satu bantuan yang paling penting, di samping kerjasama, bantuan senjata dan amunisi, adalah pembenahan armada laut Kerajaan dengan memberikan instruktur dalam membangun kapal perang tipe gallei (model kapal perang Arab) setelah insiden "Kapal Eenckyuyzen" pada 28 April 1615²⁶. Itulah sebabnya dalam naskah lokal Makassar jenis kapal ini disebut gallei kapal Portugis²⁷. Pembangunan kapal perang itu selesai pada tahun 1620 dan diperlombakan pada tanggal 23 Maret 1620 di perairan Selat Makassar.

Berkat bantuan, dorongan dan pertimbangan dari dua bangsa Liberia itu dan bangsa Eropa lainnya (Inggris dan Denmark) yang telah memiliki loji Makassar, Kerajaan Makassar mulai memasuki era baru dalam usaha menguasai jalur pelayaran niaga ke Maluku. Bila sebelumnya lebih berpusat pada pengawasan atas jalur pelayaran utara, maka kini melangkah untuk mengawasi pula jalur pelayaran selatan, di samping membenahi kedudukannya dengan membangun benteng-benteng pertahanan dan perlindungan. Tindakan-tindakan militer yang dilakukan itu tercatat secara baik dalam buku harian raja-raja Gowa dan Tallo, yang disebut "*Lontarag Bilang*". Tindakan itu mulai diawali pada tahun 1616 dengan mengirim ekspedisi militer ke Bima, satu pelabuhan yang berada pada jalur pelayaran selatan ke Maluku. Setelah Bima dikuasai diusahakan selanjutnya untuk menaklukkan Kerajaan-kerajaan lain di

Pulau Sumbawa. Kerajaan Sumbawa dikuasai pada tahun 1618 dan kemudian dikirim ekspedisi yang ketiga kalinya pada tahun 1826 untuk menaklukkan kerajaan lainnya seperti Dompu dan Tambora²⁸. Setelah seluruh kerajaan di Pulau Sumbawa itu dikuasai dilakukan perluasan pengaruh kekuasaan ke Flores, Solor, Alor dan Timor.

Selanjutnya diusahakan juga memantapkan hegemoninya atas wilayah jalur pelayaran utara. Untuk itu dikirim ekspedisi militer ke Buton pada tahun 1626, kemudian menyusul Muna dan Kepulauan Sula pada tahun yang sama, Menado dan Tomini pada tahun 1634. Kerajaan Makassar tidak melancarkan ekspedisi terhadap Gorontalo, karena wilayah koloni Mandar itu diserahkan pengawasannya secara damai kepada Makassar pada tahun 1638. Selain memperkuat hegemoninya di kawasan bagian timur, dilakukan juga perluasan pengaruh kekuasaan atas Kutai pada pesisir timur Kalimantan dan Brunei pada pesisir utara Kalimantan²⁹.

Selain itu diusahakan pula menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan penguasa-penguasa di Maluku serta bantuan militer bila diperlukan. Kejadian-kejadian itu tercatat dengan baik pada catatan harian kerajaan, antara lain : Kunjungan utusan dari Maluku ke Makassar pada 24 Agustus 1632 dan pengiriman bantuan militer kepada Hitu dalam melakukan perlawanan terhadap VOC pada tahun 1642. Pembinaan hubungan baik itu menyebabkan pihak penguasa Maluku memberikan izin bagi Makassar untuk mendirikan lojinya di negeri mereka, seperti pendirian loji di Banda pada tahun 1607³⁰.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Makassar itu akhirnya berhasil menempatkan Kerajaan itu sebagai suatu kerajaan maritim yang terkuat dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Perluasan pengaruh dan keunggulan kekuatan armadanya berhasil menggoncangkan keinginan VOC untuk bergiat mengancam dan menentang kerajaan itu yang selalu bergiat menghapuskan monopoli rempah-rempah VOC. Usaha itu dilaksanakan dengan cara memberikan perlindungan militer kepada para pedagang untuk melakukan transaksi di Maluku. Ini jelas diungkapkan dalam salah satu catatan harian pada tahun 1624 yang dikutip oleh Jakob Cornelis Van Leur sebagai berikut :

Semua pedagang Melayu dan asing lainnya, sekitar lebih dari enam ratus orang mempersiapkan diri mereka untuk pergi lagi mengikuti awal datangnya muson barat, kebanyakan mereka dengan perahu-perahu kecil (biasa untuk perdagangan rempah-rempah) ke Amboina dan daerah sekitarnya dengan modal besar yang dapat mereka bawah bersama, sebagian berupa beras, tetapi kebanyakan berupa alat-alat tukar; berdasarkan keuntungan tahun lalu mendorong ketekunan dan semangat dengan harapan yang besar dapat memperoleh lebih dari tahun ini; (dikatakan bahwa) raja, untuk bagiannya ingin mengirim dua orang pimpinan di antara mereka dengan tanggung jawab utama jika seandainya penduduk Amboina dan sekitarnya membutuhkan bantuan atau pembantu mereka akan melakukan hal itu sama seperti dulu, sesuai dengan kemampuan mereka ...³¹.

Kutipan ini memberikan petunjuk bahwa Kerajaan Makassar memberikan perlindungan militer kepada para pedagang dari berbagai negeri yang ingin melakukan kegiatan niaga di Maluku, suatu sikap yang bukan hanya menunjukkan keberanian menentang Belanda tetapi juga merupakan sikap penolakan terhadap kebijaksanaan monopoli VOC dan pertanda keunggulan kekuatan maritimnya. Faktor-faktor ini menyebabkan sejumlah Kerajaan di Kepulauan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan perniagaan di Maluku berusaha menjalin hubungan politik dan persahabatan dengan Makassar, seperti Kerajaan Mataram dan Aceh³². Demikian juga dengan penguasa negara-negara asing lainnya, seperti Gubernur Spanyol di Manila, Portugis di India (Goa), Penguasa Keling di Koromandel, Ratu Inggris, Raja Portugal, Raja Katalia (Spanyol) dan Mufti di Mekah³³. Perluasan hubungan dan jaringan politik itu merupakan gambaran perluasan cakrawala pemikiran sebagai hasil keterlibatan Kerajaan ini dalam dunia perdagangan Internasional dan juga penerimaan Islam. Pada sisi lain hubungan diplomasi ini merupakan langkah untuk menempatkan diri sebagai Kerajaan yang memiliki status yang sama dan diakui di antara kekuasaan-kekuasaan yang dipandang kuat dan besar pada waktu itu.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Makassar ini akhirnya berhasil menempatkan Kerajaan itu sebagai satu-satunya Kerajaan yang memiliki emporium kemaritiman di kawasan Sulawesi pada khususnya dan kawasan timur Indonesia pada umumnya. Langkah-langkah dalam membina kedudukannya sebagai kekuatan maritim dan kemajuan yang dicapai itu yang telah mendasari sejumlah ilmuwan yang bergiat mengkaji sejarah daerah ini, seperti Anthony Reid dan Heather Sutherland, menyatakan bahwa, sejarah kerajaan Makassar pada periode akhir abad ke-16 dan paruh pertama abad ke-17 merupakan kisah keberhasilan yang luar biasa dalam sejarah Indonesia.

Namun demikian, emporium kemaritiman yang dicapai oleh kerajaan ini runtuh setelah Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666-1669. Perjanjian Bungaya yang merupakan akhir penyelesaian konflik antara Kerajaan itu pada satu pihak, VOC dan Arung Palakka pada pihak lain, memindahkan mahkota emporium Kerajaan itu kepada VOC. Peristiwa itu mengawali VOC membenahi diri dan memantapkan pelaksanaan monopoli perdagangan di Maluku dan mengambil alih hegemoni kerajaan Makassar. Keruntuhan emporium Kerajaan itu juga merupakan akhir dari pertumbuhan kekuatan maritim di kawasan Sulawesi pada khususnya dan kawasan timur Indonesia pada umumnya.

3.3 *Birokrasi Pemerintahan*

Pulau Sulawesi terdapat banyak kesatuan pemerintahan yang berbentuk kerajaan sekitar abad ke-14, bahkan ada pula yang baru membentuk pemerintahan Kerajaan pada periode kemudian. Jauh sebelumnya masih merupakan kesatuan-kesatuan adat yang diketuai oleh seorang tetua adat, yang pada masyarakat di Sulawesi Selatan dikenal dengan kelompok *Anang* atau *kaum*. Kelompok-kelompok itu kemudian dalam perkembangannya membentuk satu konfederasi dan akhirnya menjadi satu-kesatuan dalam bentuk pemerintahan Kerajaan. Sebagai contoh dapat disebut Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Utara yang dikenal dengan sebutan Lima Pahalaa (Lima Kerajaan) merupakan konfederasi dari: Gorontalo, Limboto, Boalemo, Atinggola, dan Bone³⁴. Di Sulawesi Selatan dapat misalnya Kerajaan Gowa yang terdiri dari sembilan wilayah Giarang yaitu : Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agangjene, Bisei, Kalling dan Sero³⁵.

Terbentuknya satu kesatuan pemerintahan dari bentuk konfederasi itu terjadi mengikuti tradisi politik masing-masing. Di Sulawesi Selatan sejumlah besar Kerajaan terbentuk melalui konsep *tomanurung* untuk melebur bentuk konfederasi menjadi satu kesatuan pemerintahan berbentuk kerajaan dengan mengangkat dan menobatkan tokoh awal yang diberi predikat Tomanurung itu sebagai raja pertama. Hal itu terjadi bagi kerajaan-kerajaan seperti: Gowa, Bone, Soppeng, Marusu, Bantaeng, Sinjai dan lainnya. Sementara yang lainnya merupakan proses dari kedudukan sebagai ketua konfederasi yang kemudian menjadi jabatan

pewarisan sebagai kelompok memegang kendali politik utama konfederasi itu sehingga meleburnya menjadi bentuk kerajaan. Model ini berlaku untuk kerajaan Jeneponto (berawal dari konfederasi Battempola dan Laikang) dan Kerajaan Wajo (berasal dari konfederasi Battempola, Talo'tenreng dan Tua). Hal yang sama juga dengan Kerajaan Gorontalo.

Proses pembentukan Kerajaan-kerajaan di Sulawesi seperti ini menyebabkan kedudukan raja sebagai pemegang kendali kekuasaan pada umumnya didampingi oleh satu dewan hadat yang anggota-anggotanya adalah kepala pemerintahan kaum atau Kerajaan-kerajaan kecil itu. Dewan hadat ini pada dasarnya merupakan lembaga legislatif, atau lembaga penasihat raja dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan, baik politik dan ekonomi maupun sosial dan budaya. Namun terjadi suksesi. Namun terlepas dari anggota dewan hadat, masing-masing mereka adalah pimpinan eksekutif (penguasa lokal) di wilayah kesatuannya. Selain itu pada beberapa kerajaan anggota dewan hadat itu berperan sebagai kepala bidang kegiatan kenegaraan (setara menteri negara), seperti yang berlaku di kerajaan Bone dan sejumlah kerajaan di Sulawesi Utara.

Raja dan dewan hadat merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang umum dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi, dengan penyebutan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing sebagai contoh: Kerajaan Gowa menyebut rajanya dengan sebutan *Sombayya ri Gowa* (yang disembah di Gowa), Kerajaan Luwu menyebutnya *Payungnge ri Luwu* (yang dipayungi di Luwu), Kerajaan Bone menyebut rajanya dengan *Arung Mangkaue ri Bone*. Wajo menyebutnya *Arung Matowae ri Wajo*. Soppeng dan Suppa menggunakan kata *Datu*, Sawitto dan Sidenreng menggunakan kata *Addatuang*. Mandar menamakan *Maradia*. Demikian pula dengan dewan hadatnya. Kerajaan Gowa dengan *Batte Salapang* sementara Bone dengan nama *Arung Pitue*. Pada dasarnya tiap kerajaan dengan sebutannya tersendiri, namun dalam banyak hal terdapat penyebutan jumlah berdasarkan jumlah kelompok kaum atau Kerajaan kecil bekas konfederasi.

Sementara pada tingkat daerah (persekutuan kaum datu Kerajaan bawahan yang kecil) terdapat jabatan kepala kaum, masing-masing dengan sebutan yang berbeda, ada yang menggunakan sebutan

marsaoleh, jogugu, kare, gallarang, Karaeng, matoa dan lainnya. Kepala-kepala kaum pada gilirannya membawahi kepala-kepala kerabat yang dipandang sebagai ketua kerabat yang menempati wilayah yang terkecil yang disebut *kampong* (kampung), *wanua* atau *banua*. Mereka ini yang secara langsung berhubungan dengan kerabat mereka yang merupakan rakyat dari kerajaan itu.

Dalam menata kehidupan politik di Kerajaan, masing-masing masih memiliki sejumlah lembaga dengan jabatan masing-masing struktur organisasi pemerintahan masing-masing berkembang sesuai dengan lingkungan, kemajuan dan kebutuhan kehidupan politik mereka. Pada Kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah perairan, seperti Kerajaan-kerajaan di Sangihe-Talaud (Kerajaan Tabukan, Kendahe, Tahuna, Siau dan Tagulandang) mengenai jabatan *kapitan laut*. Jabatan ini di wilayah itu bukan hanya menunjuk pada kedudukannya sebagai raja laut, orang yang memiliki kekuasaan dalam kegiatan armada di laut tetapi juga mengurus masalah ketertiban dan kepolisian, dan kadang kala menunjuk pula pada kegiatan sebagai bajak laut³⁶. Pada umumnya jabatan ini diembankan kepada seorang anggota keluarga raja.

Di antara Kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang berkembang pesat dan memiliki birokrasi pemerintahan yang kompleks dan cukup memadai pada abad ke-17 adalah Kerajaan Makassar (Kerajaan kembar Gowa-Tallo). Sementara Kerajaan-kerajaan lain pada umumnya memiliki bentuk dan corak seperti yang telah diungkapkan itu. Namun demikian sebagai bahan rujukan diungkapkan dan diutarakan birokrasi pemerintahan Kerajaan Bone sebagai bagian dari bentuk birokrasi Kerajaan agraris dan Kerajaan Makassar sebagai rujukan birokrasi kerajaan maritim di Sulawesi.

Bone sebelum terbentuknya kerajaan terdapat konfederasi pemerintahan yang dikenal dengan nama *kawerang*, yaitu ikatan dari tujuh wanua (negeri), yaitu *wanua* : Ujung, Tibojong, Ta, Tanete ri Atang, Tanete ri Awang, Ponceng dan Mecege. Bentuk konfederasi ini kemudian berubah setelah mereka menemukan seorang tokoh yang dipandang dapat mempersatukan semua pihak, tokoh yang disebut Tomanurunge. Sejak itu tokoh itu dinobatkan menjadi Raja Bone *arung Mangkaue ri Bone* dan bentuk *kawerang* itu berubah menjadi *Tana Bone* atau Kerajaan Bone. Pimpinan wanua selanjutnya dijadikan dewan hadat kerajaan yang

disebut Ade Pitu'e. Lembaga ini bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat Raja tetapi juga sebagai lembaga eksekutif, karena masing-masing anggota dewan hadat itu melaksanakan tugas sebagai menteri kerajaan. Arung Macege menangani urusan pemerintahan umum, Arung Penceng menangani urusan keamanan dan pertahanan, Arung Tibojong menangani urusan peradilan, Arung Tanete Ri Attang menangani urusan pembangunan dan pekerjaan umum, Arung Tanete Ri Awang memegang jabatan menteri urusan keuangan dan ekonomi, Arung Ta' memegang urusan pengajaran dan kerohanian³⁷.

Untuk menangani dewan hadat *Ade Pitue* diangkat seorang kerabat Raja untuk menjadi ketua dengan jabatan *To'marilaleng*. Pejabat ini merupakan saluran penyampaian kehendak raja kepada rakyat, karena itu pejabat ini sering disebut *To'mabicara* atau *Pabbicara*. Oleh karena anggota hadat dalam kedudukannya juga menjadi dewan menteri, maka pejabat ini juga dalam penyelenggaraan kenegaraan berfungsi sebagai pimpinan dewan pemerintahan, atau sebagai perdana menteri dalam mengkoordinasikan anggota-anggota ade pitue dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan diangkat seorang pejabat yang disebut *Petta Ponggwae*. Pejabat ini berada dalam pengawasan langsung Raja dan umumnya dijabat oleh salah seorang kerabat dekat raja, dan umumnya dijabat oleh seorang kerabat dekat raja. Ia membawahi pimpinan angkatan perang (panglima) yang disebut *dulung*, yaitu *dulung ajang ale* panglima yang mengawasi wilayah perbatasan. Tiap-tiap *dulung* terdapat pejabat yang memimpin pasukan, yang disebut *penghulu jowa* atau *anre guru jowa*.

Urusan-urusan keagamaan diembankan kepada seorang pejabat yang disebut *penghulu bissu*. Jabatan ini pada dasarnya berkaitan dengan urusan kerohanian tradisional. Karena itu kemudian tidak difungsikan, ketika Kerajaan Bone menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan urusan keagamaan disesuaikan dengan istilah keagamaan Islam, sehingga pejabat urusan keagamaan lebih dikenal dengan istilah *Kadhi* (*Kalli*). Pejabat ini juga langsung dalam pengawasan raja.

Birokrasi pemerintahan Kerajaan Makassar menunjukkan tendensi yang sama namun bentuk penataan yang berbeda, karena kerajaan ini merupakan kerajaan kembar, meskipun dari segi asal usul, kehadiran

Kerajaan Tallo merupakan perpecahan dari Gowa. Oleh karena itu cikal bakal birokrasi awal selalu merujuk kepada Gowa. Kerajaan ini juga terbentuk setelah diketemukannya seorang tokoh yang dipandang mampu mempersatukan dan menentramkan perpecahan-perpecahan yang dapat terjadi dari keanggotan konfederasi Gowa yang disebut *Kasuwiyang Salapang*, tokoh dikenal dengan nama Tumanurung. Tokoh itu kemudian dilantik menjadi *Sombayya ri Gowa* (yang disembah di Gowa) dan menggantikan kedudukan ketua konfederasi yang disebut *paccalaya*.³⁸

Dewan hadat konfederasi tetap dipertahankan tetapi mengenakan nama baru yaitu *Batte Salapang* (sembilang panji). Anggota dewan hadat ini lebih berfungsi sebagai dewan penasehat raja dan dewan pemilih calon raja dari keturunan raja-raja, anggota dewan ini melakukan pertemuan di istana kerajaan. Dalam kegiatan sehari-hari anggota dewan hadat ini adalah penguasa di wilayah gallarang dan tidak terlibat langsung dalam urusan kenegaraan. Urusan kenegaraan diembankan kepada sanak keluarga raja, dengan jabatan yang setaraf menteri sekarang. Pada awal perkembangannya hanya dikenal dua orang pejabat yaitu Tamailalang Gowa dan Tumailalang Lolo. Pejabat yang disebutkan pertama mengepalai lembaga adat tertinggi (*bate salapang*) dan menjadi saluran komunikasi antara raja dan rakyat melalui dewan hadat, sementara pejabat yang disebutkan terakhir berfungsi sebagai saluran informasi dari dewan hadat dan rakyat kepada raja³⁹. Urusan keagamaan dan upacara kenegaraan diemban oleh seorang pajabat yang disebut *Alakaya*, pejabat ini juga yang menangani ornamen kerajaan. Ketika Kerajaan Makassar menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan, kegiatan kerohanian dan upacara yang disesuaikan dengan ajaran keagamaan itu diembankan kepada pejabat baru yang disebut daengta kaliya (kadhi). Sementara urusan pajak diembankan kepada anrong guru sussung. Pejabat ini tidak melakukan kegiatan pemungutan pajak perdagangan, melainkan urusan perpajakan lainnya, karena urusan ini diembankan kepada seorang pejabat yang disebut sahbanara (syahbandar). Pada awal pengadaan jabatan ini selalu dirangkap oleh tu'mabicara lolo, namun kemudian dipisahkan dan diembankan kepada pejabat khusus.

Dalam perkembangan kemudian, setelah kerajaan Gowa dan Tallo membentuk persekutuan sebagai satu kesatuan maka dibentuklah jabatan *Tu'mabicara Buta*, yang kedudukannya sebagai mahapati. Jabatan ini

selalu dijabat oleh raja Tallo, sama seperti kedudukan raja Gowa sebagai raja Makassar. Pejabat tu'mabicara buta ini selalu mendampingi raja dan sewaktu-waktu berhak sebagai pengganti raja, pejabat ini juga berkewajiban mendidik putera-puteri raja agar mengerti dan menghayati adat-istiadat dan tata cara kerajaan. Pejabat tinggi kerajaan lainnya adalah *Tukkajananggang*. Pejabat ini tidak hanya menangani urusan keamanan dan pertahanan, tetapi juga urusan-urusan sipil, sebagai pati yang menangani urusan perlengkapan. Dalam kedudukan ini ia membawahi sejumlah pejabat pelaksana (sebanyak 20 pejabat), mulai dari pejabat pesuruh kerajaan (*anrong guru suro*) hingga kepala perlengkapan istana (*janang pakes*)⁴⁰. Dalam urusan pertahanan dan keamanan ia membawahi sejumlah pejabat tinggi angkatan perang, seperti panglima perang (*karaeng ri pabbundukang*) yaitu pejabat yang menangani urusan perang dan ekspansif, panglima perang daerah (*Anrong guru tukkajananggang*) yang menangani urusan pertahanan wilayah panglima tawanan perang, dan kepala pasukan pengawal raja.

Gambaran birokrasi pemerintahan dua kerajaan di Sulawesi ini memberikan indikasi pola yang sama dengan variasi berdasarkan perkembangan masing-masing. Tidak dapat disangkal bahwa setiap kerajaan memiliki dewan hadat, para pajabat pati, dan pejabat urusan keamanan dan pertahanan. Jabatan terakhir ini pada kerajaan-kerajaan tertentu hanya diadakan bila situasi membutuhkan, seperti bila akan terjadi perang, sementara dalam aman dan damai, peranan itu dipandang merupakan tanggung jawab kelompok "orang berani" (*tubarani*) yang berada di istana kerajaan dan pada para penguasa lokal.

3.4 Pola-pola Ekonomi

Alfred Thayer seperti telah diutarakan terdahulu memandang faktor geografi pantai memungkinkan munculnya kecenderungan masyarakatnya menjalin hubungan dengan masyarakat luar dan meningkatkan produksinya. Sulawesi sebagai sebuah pulau yang dikelilingi dengan laut dan berdasarkan gambaran sejarah memiliki sejumlah besar kota-kota pantai, dan beberapa kerajaan yang bergiat mengembangkan diri untuk berkembang dan tampil sebagai kerajaan maritim maka hal itu memberikan petunjuk yang kuat akan adanya kehidupan ekonomi yang mengarah pada pelayaran perdagangan. Meskipun demikian hak itu tidak

sepatutnya langsung mengarahkan perhatian untuk menguraikan kegiatan pelayaran perdagangan, karena proses ke arah itu berpangkal pada kegiatan ekonomi lokal yang memungkinkan adanya akumulasi produksi bagi kegiatan pelayaran niaga. Oleh karena itu, sebelum dijelaskan pola-pola perdagangan interinsuler dan antar jaringan perdagangan, terdahulu diutarakan pola-pola ekonomi lokal.

Pada umumnya raja, pada semua kerajaan di Indonesia, adalah penguasa yang memegang kendali pengawasan atas tanah. Penduduk yang ingin menggunakan tanah sebagai lahan pertanian harus mendapat izin raja dan sebagai imbalan atas penggunaan tanah itu penduduk menyerahkan sebagian dari produksinya sebagai tanda kesetiaan. Pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan penyerahan itu disebut *kasuwiyang* (Bugis) atau *kasuwiyang* (Makassar). Penyerahan itu pada dasarnya tidak hanya bernilai ekonomi bagi pemegang kendali kekuasaan tetapi juga bernilai religius bagi kerajaan sehingga dipandang sebagai “pengabdian” pada pemegang kendali kekuasaan dan sekaligus kepada “yang empunya kekuasaan”. Pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi, sama seperti di Sulawesi Selatan yang diungkapkan Mukhlis, regalia kerajaan sesungguhnya menunjuk kepada kekuasaan pada masa lampau dan kekuatan yang diterima dari dewa-dewa yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk memerintah sesamanya⁴¹. Itulah sebabnya penyerahan yang diterima oleh raja dipandang juga sebagai pemenuhan kewajiban kepada dewata,

Sehubungan dengan kecenderungan itu, jelas bahwa akumulasi produksi berada dalam tangan raja, karena setiap petani merasa berkewajiban menyerahkan produksi mereka. Tambahan pula para penguasa senantiasa memiliki areal tanah yang sumber di negerinya masing-masing, yang secara tradisional dipandang diperuntukkan bagi regalia mereka, walaupun produksinya merupakan sumber pendapatan pemegang kendali kekuasaan. Hal-hal ini memberikan indikasi bahwa raja dan penguasa lokal merupakan tempat sumber kesejahteraan raja dan elit politik kerajaan. Selain produksi penduduk penguasa masih memperoleh sumber pendapatan lain berupa pajak-pajak: pasar, judi, produksi hutan, dan terutama adalah pajak perdagangan.

Akumulasi produksi itu pada raja dan penguasa lokal itu menyebabkan kerabat mereka tampil sebagai pihak yang bergiat

memasarkan kelebihan produksi, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan memanfaatkan tenaga penduduk. Itulah sebabnya pada tradisi pelayaran niaga pihak lain, kegiatan usaha penguasa senantiasa didahulukan, sebagai hak istimewanya. Misalnya bila ada kapal dari raja yang ingin berlayar maka kapal itu yang terdahulu dimuati sebelum kapal milik pedagang lainnya⁴².

Selain itu juga penduduk yang memiliki kelebihan produksi ikut memasarkan produksi mereka, baik itu dilakukan sendiri maupun ikut dalam pelayaran niaga pihak lain. Itulah sebabnya dalam hukum pelayaran Amanna Gappa dijumpai istilah yang membedakan kelasi perahu dagang, kelasi tetap, kelasi bebas, kelasi penumpang dan orang yang menumpang. Kelompok yang ikut pelayaran niaga yang kembali ke tempat itu disebut kelasi bebas sementara dua yang disebutkan terakhir hanya ikut sampai ke tempat tujuan tertentu dari pelayaran niaga itu⁴³.

Bila diperhatikan pemberitaan Tome Pires, maka dapat dipastikan bahwa hingga permulaan abad ke-16 pelayaran niaga penduduk dari Pulau Sulawesi (*Ilhas dos Macassar*) masih berkisar pada pemasaran produksi pertanian dan pertambangan sendiri (beras dan emas). Tak ada keterangan yang memberikan petunjuk bahwa mereka telah terlibat dalam kegiatan perdagangan komoditi yang terpenting ketika itu (rempah-rempah dan kayu cendana). Meskipun demikian, berdasarkan keterangan tentang daerah jangkauan pelayaran niaga mereka tampak bahwa mereka bukan hanya melakukan pelayaran niaga interinsuler saja (dalam kawasan satu jaringan perdagangan saja). Menurut Hall wilayah mereka masuk jaringan perdagangan laut Jawa - tetapi juga telah melakukan pertukaran eksternal dengan melakukan pelayaran niaga ke wilayah jaringan perdagangan lain, khususnya jaringan perdagangan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka⁴⁴.

Kajian Hall memberikan petunjuk bahwa pola perdagangan Asia Tenggara sebelum datangnya bangsa Eropa berlandaskan pada prinsip perdagangan bebas. Para pedagang diberikan kebebasan melakukan pelayaran niaga ke pusat-pusat perdagangan wilayah kekuasaan lain tanpa dibatasi, sementara kerajaan-kerajaan lain juga tidak membatasi asal kerajaan, bangsa dan ras dari pedagang yang boleh berniaga di bandar niaganya. Semua pedagang boleh berdagang dan memperdagangkan komoditi mereka. Namun demikian dalam melakukan kunjungan niaga

ke kerajaan lain, para pedagang merasa berkewajiban memberikan hadiah kepada penguasa setempat, selain membayar pajak perdagangan. Hal itu pada umumnya dilakukan sebelum mereka melakukan kegiatan transaksi. Itulah sebabnya dalam hukum pelayaran Amanna Gappa, hal itu perlu diatur, dengan maksud agar tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan di antara sesama anggota dalam satuan pelayaran niaga. Menurut aturan pemberian hadiah itu harus atas persetujuan nakhoda dan semua kelasi. Itulah sebabnya dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa bila nakhoda memberikan hadiah kepada raja tanpa persetujuan semua kelasi maka persembahan itu dipandang bersifat pribadi⁴⁵. Van der Chijs bahkan menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan pedagang-pedagang Bugis dan Makassar dalam menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, khususnya di Maluku, yaitu pedagang-pedagang itu tahu betul bagaimana memberikan hadiah kepada penguasa dan ulama sehingga kegiatan itu dapat memberikan keuntungan yang besar bagi mereka di negeri itu.

Pelayaran niaga interinsuler pedagang dan pelaut dari Sulawesi pada periode sebelum permulaan abad ke-16 tampaknya terpusat ke arah barat. Perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana ketika itu masih dikuasai oleh pedagang Jawa dan Melayu. Pedagang-pedagang ini menyatakan bahwa: "Tuhan telah menciptakan Maluku untuk rempah-rempah dan Timur untuk kayu cendana". Karena itu, dengan tidak adanya pemberitaan tentang pemasaran produksi itu dari pedagang Sulawesi, sudah dapat dipastikan bahwa mereka belum melakukan pelayaran interinsuler ke dua pusat produksi komoditi penting itu.

Keterlibatan mereka dalam perdagangan komoditi itu baru mulai terberitakan sejak paruh kedua abad ke-16. Hal itu memberikan petunjuk bahwa keterlibatan mereka itu berkaitan dengan pemakaian jalur baru pelayaran ke Maluku oleh pedagang-pedagang Melayu, yang bila ditelusuri pemberitaan Tome Pires tampak baru dimulai sekitar akhir abad ke-15, jalur pelayaran dari Malaka melalui Tanjungpura memasuki *Ilhas dos Macassar* terus ke Buton dan berlayar memasuki perairan Maluku. Diberitakan pula bahwa dari *Ilhas dos Macassar* kita dapat berlayar ke Madura dan ke arah utara⁴⁷. Itulah sebabnya sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa keterlibatan pelaut dan pedagang dari Sulawesi dalam dunia niaga rempah-rempah berkat kehadiran pedagang

Melayu, Kehadiran pedagang Melayu itu sesungguhnya membuka cakrawala baru bagi keterlibatan dalam dunia niaga. Bila sebelumnya komoditi yang diperdagangkan adalah produksi dalam negeri maka dalam perkembangan kemudian mereka terlibat juga dalam perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana, komoditi yang bukan berasal dari negeri sendiri.

Produksi yang diperoleh dari luar itu tampaknya diperdagangkan di pusat perniagaan sendiri. Itulah sebabnya para pedagang khususnya pedagang-pedagang Portugis, memandang tempat mereka memperoleh produksi itu merupakan daerah penghasil. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa Suppa dan Menado menghasilkan cendana, komoditi yang mereka peroleh di sana, tetapi sesungguhnya komoditi itu sendiri dibawa oleh pedagang mereka dan dipasarkan di pusat perniagaan sendiri.

Pola perdagangan itu tampaknya merupakan ciri lokal sehingga terus dipertahankan. Hal itu dilaksanakan dengan tujuan dapat memajukan bandar niaga sendiri. Gambaran Stapel tentang perdagangan bandar niaga Makassar pada akhir abad ke-16 jelas mengikuti pola ini, ia mengungkapkan :

"Perdagangan Makassar memiliki karakter yang menarik perhatian: negeri itu sendiri kurang atau tidak menghasilkan produksi ekspor, kecuali tumbuh padi berlimpah dan bermutu baik dan murah, juga terdapat ternak (bahkan babi sebelum tahun 1603). Orang Portugis dari Malaka dan Maluku. Tetapi yang lebih penting, Makassar adalah perdagangan transitonya dalam rempah-rempah dan kayu cendana. Sebelum kedatangan orang Eropa, orang Makassar adalah pelaut ulung. Barang dagangan yang baru disebutkan itu mereka muat dalam perahu dan jung mereka dari Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil dan membawa melalui Makasar ke pelabuhan-pelabuhan yang terletak di bagian utara dan barat. Di samping itu orang-orang Bugis, Melayu dan Jawa juga membawa produksi mereka untuk diperdagangkan di Makassar, terutama setelah Portugis merebut Malaka pada tahun 1511..."⁴⁸

Karakter perdagangan Makassar yang diungkapkan oleh Stapel ini tampaknya merupakan pola atau konfigurasi nilai yang dianut dan dipertahankan dalam bidang perdagangan penduduk dari Sulawesi. Hal itu dapat dibuktikan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh H.J. Friedericy menyangkut pelayaran laut dan pedagang dari Bone pada permulaan abad ke-20 dan L. van Voeren menyangkut pelayaran niaga pedagang dari Mandar dan Pare-pare pada periode yang sama. Hasil penelitian itu memberikan petunjuk bahwa kegiatan pelayaran niaga penduduk ketika ingin berangkat dari negeri mereka, mereka memuat produksi dari negeri mereka dengan tujuan pelayaran ke arah barat, ke

Singapura, Pulau Pinang atau ke Palembang. Setelah memperdagangkan produksi mereka dan membeli produksi yang diperlukan bagi kegiatan pelayaran niaga kelak ke Nusa Tenggara dan Maluku, mereka berlayar balik namun tidak kembali ke negeri asal mereka. Mereka menyinggahi pelabuhan lain di sekitar pesisir barat Sulawesi untuk menukarkan sebagian barang dagangan yang diperoleh dari bandar niaga sebelumnya dengan produksi penduduk, kemudian melanjutkan pelayaran ke arah timur dan selatan, memasuki Kepulauan Maluku atau kepulauan Nusa Tenggara. Di wilayah itu mereka memperdagangkan seluruh komoditi mereka dan membeli produksi penduduk kemudian berlayar pulang. Produksi yang diperoleh itu dijual di Makassar atau pelabuhan yang besar lainnya di wilayah Sulawesi, seperti Pare-pare dan Menado serta membeli barang-barang kebutuhan mereka dan keluarga untuk dibawa pulang ke tempat asal mereka.

Keterangan ini, bila dipandang pula merupakan pola niaga yang telah lama dianut sebelum kedatangan bangsa Eropa, memberikan alasan untuk dapat menolak anggapan bahwa pelaut dan pedagang Sulawesi sebelum paruh abad ke-16 belum terlibat dalam dunia perniagaan rempah-rempah dan kayu cendana. Terdapat kemungkinan keterlibatan mereka namun tidak memasarkan produksi itu ke bandar niaga di bagian barat. Mereka memperdagangkan komoditi itu di bandar niaga kerajaan mereka sendiri atau yang lainnya di Sulawesi. Hal yang menguatkannya adalah pernyataan pedagang Portugis tentang produksi kayu cendana dari Menado dan Suppa walaupun produksi itu bukan produksi daerah itu, juga Stapel menyatakan bahwa sebelum bangsa Eropa datang, pendudukan Makassar adalah pelaut dan pedagang ulung. Meskipun demikian hal itu masih mengundang perhatian bagi penelitian yang lebih cermat untuk menentukan wilayah pelayaran niaga mereka sebelum periode kedatangan bangsa Eropa dalam wilayah perniagaan Asia Tenggara.

Keterlibatan bangsa Eropa dalam dunia perdagangan Asia Tenggara dipandang sebagai penyebab terjadinya distorsi kehidupan perdagangan bebas di Asia Tenggara pada umumnya dan Sulawesi pada khususnya. Hal itu disebabkan karena pedagang Eropa bertekad untuk memonopoli perdagangan, baik itu Portugis dan Spanyol, maupun Belanda. Keinginan itu menyebabkan mereka bertekad membatasi pelayaran bebas yang

selama itu dilakukan oleh penduduk, baik pelayaran niaga antar jaringan perniagaan. Itu berarti mereka berpegang pada prinsip laut tertutup (*mare closum*), prinsip yang bertentangan dengan prinsip kerajaan di Asia Tenggara. Umumnya mereka menganut prinsip laut terbuka (*mare liberium*). Sebagai contoh dapat diutarakan pernyataan raja Makassar I Mangandari Daeng Manrabia Sultan Alauddin (1593-1639) kepada utusan VOC yang datang dengan kapal De Eendrach ke Makassar pada 10 Desember 1616 untuk mendesak agar ia melarang pedagang-pedagang dari Makassar untuk tidak melakukan pelayaran niaga ke Maluku. Ia menjawab dengan menyatakan: “Tuhan telah menjadikan bumi dan laut, bumi telah dibagikan di antara umat manusia dan laut diberikan secara bebas”⁵⁰. Jawaban itu bukan hanya menunjukkan bahwa Kerajaan Makassar saja yang menganut prinsip *mare liberium* tetapi semua kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam dunia niaga di Asia Tenggara, karena itu ia (Raja Makassar) menyatakan “tidak pernah terdengar” adanya larangan pelayaran niaga.

Berdasarkan gambaran karakter pelayaran niaga yang dipaparkan itu, dapat disimpulkan bahwa pola perdagangan di Sulawesi khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya adalah perdagangan bebas. Pola perdagangan itu berlangsung tanpa campur tangan pemerintah kendali politik pada kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara menganut prinsip *mare liberium*. Itu berarti laut dipandang dipandang sebagai lalu lintas umum (*infra struktur*) bagi setiap manusia. Campur tangan bangsa Eropa berakibat pola perdagangan bebas dan prinsip *mare liberium* yang dianut mengalami distorsi. Demikian kecenderungan pelaksanaan monopoli, baik bersifat total maupun parsial yang berkembang di daerah ini merupakan bekas pengaruh kebijaksanaan perdagangan bangsa Eropa.

3.5 Kehidupan Sosial dan Politik

Masyarakat Sulawesi termasuk masyarakat yang heterogen, karena terdiri dari beberapa kelompok etnis dengan kebudayaannya masing-masing yang walaupun tampak banyak perbedaan, namun dalam hal-hal tertentu bahkan berhubungan dengan inti kebudayaan, menampakkan kemiripan kalau bukan dinyatakan kesamaan. Secara historis, pembentukan masyarakat di kawasan ini berpangkal dari kehidupan keluarga, sehingga tidak jarang dijumpai penjelasan hubungan genealogi antara satu anggota masyarakat dengan kampung atau desa tetangganya.

Terbentuknya pemukiman-pemukiman baru itu sering dipandang sebagai perluasan wilayah pemukiman kelompok kaumnya. Perluasan itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena lahan mata pencahariannya jauh, padatnya jumlah penduduk dalam pemukiman awal, persebaran karena wabah dan konflik internal. Pada dasarnya perpindahan karena faktor yang disebutkan terakhir itu memberikan kesempatan pada munculnya satu kesatuan baru yang terlepas dari pengaruh daerah awal. Hal ini dalam sejarah masyarakat di Sulawesi sangat jelas. Sebagai contoh terbentuknya kesatuan pemerintahan di Kerajaan Sidenreng sebagai akibat berpindahnya sejumlah keluarga penguasa bersama pengikutnya akibat perpecahan yang terjadi di Tana Toraja. Akibat perpecahan yang terjadi di Toraja juga merupakan faktor penyebab berpindahnya sebagian penduduk ke Poso dan membangun pemukiman di sana.

Perpindahan karena faktor-faktor lainnya juga tampak di daerah ini, yang pada umumnya bermuara pada kerajaan Luwu. Sebagian kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara memiliki cerita lisan yang selalu menghubungkan cikal bakalnya pada Kerajaan Luwu. Hal ini menyebabkan munculnya sejumlah pendapat yang menempatkan kerajaan itu sebagai super state bagi kerajaan-kerajaan lain. Ada yang memandang secara langsung dalam kaitannya dengan pengaruh kekuasaan dan adapula yang mengarahkan perhatian dalam hubungan dengan pengaruh kesusastaan klasik "*I Galigo*" atau "*La Galigo*", atau "*I La Galigo*" yang kini lebih umum ditulis "*Lagaligo*"⁵¹. Usaha untuk memastikan pengaruh kekuasaan hingga kini belum terjawab dengan baik, seperti apa yang dilakukan oleh H.E. Engelhard dalam mengkaji Sejarah Selayar⁵².

Kesusastaan Lagaligo merupakan satu hasil kesusastaan terbesar di dunia untuk masa itu. Naskah-naskah kesusastaan itu hanya dapat dijumpai dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, namun penuturan hasil sastra itu secara lisan (tradisi lisan) dapat dijumpai pada sejumlah besar masyarakat di Sulawesi. Hal itu terbukti ketika dilakukan seminar hasil kesusastaan itu di Palu, Sulawesi Tengah. Itu berarti kesusastaan Lagaligo bukan milik Luwu atau masyarakat Sulawesi Selatan tetapi merupakan milik masyarakat Sulawesi.

Kesusastraan Lagaligo ini dapat diketahui dengan baik berkat kerja dan karya seorang ilmuwan Belanda R.A. Kern⁵³. Pada dasarnya kesusastraan ini memuat berbagai hal yang bersifat mitos, namun di balik mitos itu terdapat hal-hal yang nyata menyangkut perang-perang yang terjadi antara kerajaan dan gambaran inti budaya masyarakat. Itulah sebabnya H.J. Friedericy yang mengkaji stratifikasi sosial masyarakat dengan menggunakan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Kesusastraan Lagaligo merupakan materialnya yang penting. Berdasarkan kajian itu ia sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat di daerah itu, khususnya Sulawesi Selatan, mengenal pelapisan sosial atas strata bangsawan (*Ana'karaeng*/Makassar, *Anakarung*/Bugis) dan rakyat yang umumnya dikenal dengan strata *Tomaradeka* (secara harfiah berarti "orang merdeka")⁵⁴.

Dalam kehidupan sosial, kelompok bangsawan dipandang sebagai kelas yang terpenting dan terutama; dalam kalangan strata inilah yang selalu dipilih menduduki jabatan politik, sehingga sering dipandang sebagai lapisan sosial yang memerintah. Namun dalam banyak hal yang menjadi pemegang kendali kekuasaan umumnya adalah keturunan dari mereka yang menjabat kedudukan itu. Bila tidak ada calon yang memadai dari keturunan langsungnya untuk kedudukan itu barulah dicari pada kelompok lapisan sosial itu.

Penempatan itu berhubungan dengan anggapan masyarakat, bahwa mereka merupakan lapisan masyarakat yang memiliki garis keturunan para dewa. Itulah sebabnya mereka dipandang memiliki darah putih (di Eropa disebut darah biru). Anggapan ini pula yang mendasari budaya politik mereka sehingga dalam riwayat ketidak-hadiran keturunan para dewa, mereka mendapat seorang pemimpin dan memberikan legitimasi sebagai anugerah dewata sehingga dikenakan istilah "*Tumanurung*" (secara harfiah berarti "orang yang diturunkan"), meskipun ciri yang ditampilkan pada tokoh itu adalah: orang yang tidak diketahui dari mana datangnya dan orang yang tidak menyebutkan siapa namanya⁵⁵. ciri ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat daerah ini menghendaki pemimpin yang memandang jabatan bukan sebagai pemegang kendali kekuasaan adalah jabatan tamu (bukan warisan), karena itu patut mentaati etika pemerintahan yang termuat dalam kontrak pemerintahan. Dalam melaksanakan pemerintahan harus bersikap tidak mengkotak-

kotakkan masyarakat menurut daerah asalnya dan tidak menonjolkan diri sendiri sebagai orang yang terutama dan utama.

Sementara lapisan sosial *Tomaradeka* pada dasarnya merupakan rakyat dari satu kesatuan pemerintahan. Mereka merupakan subjek dari pemegang kendali kekuasaan namun tidak sepenuhnya tunduk pada titah raja. hal itu tampak dalam kontrak pemerintahan yang diikrarkan oleh raja ketika menerima jabatan. Sebagai contoh kami kutip kontrak pemerintahan kerajaan Gowa :

- "Bahwasanya kami telah menjadikan engkau Raja kami dan kami menjadikan abdimu;
- Bahwa engkau menjadi sampiran tempat kami bergantung dan kami menjadi labu (tempat air) yang bergantung kepadamu;
- Bahwa apabila sampiran itu patah, lalu tidak terpecah berantakan labu itu, maka hianatlah kami;
- Bahwa kami tidak tertikam oleh senjatamu, sebaliknya engkaupun tak terbunuh oleh senjata kami;
- Bahwa hanyalah dewata yang membunuh kami dan dewata jugalah yang membunuhmu'
- Bertitahlah engkau dan kami mentaatinya, akan tetapi apabila kami telah menjinjing, tidaklah kami akan memikul lagi dan apabila kami telah memikul tidaklah kami menjinjing lagi'
- Angin engkau dan kami daun kayu, akan tetapi hanyalah daun kayu kering yang engkau luruhkan;
- Airlah engkau dan kami batang kayu hanyut, akan tetapi hanya banjir saja yang dapat menghanyutkannya;
- Terhadap anak dan istri kami yang tak disukai oleh negara maka kamipun tidak menyukainya;
- Bahwa engkau kami jadikan raja atas diri kami tetapi harta benda kami bukanlah engkau merajainya;
- Bahwa engkau pantang mengambil ayam kami dari tenggeramannya, pantang engkau mengambil telur dari keranjang kami;
- Bahwa apabila engkau menghendaki barang sesuatu dari kami, engkau membelinya yang patut engkau beli, engkau pertukarkan yang patut engkau pertukarkan, engkau meminta barang yang patut engkau minta, maka kami memberimu, pantang engkau meniadakan barang kami;
- Bahwa raja tak menetapkan sesuatu keputusan tentang masalah dalam negeri tanpa Gallarang dan Gallarang tak menetapkan sesuatu tentang peperangan tanpa raja."⁵⁶

Kontrak pemerintahan ini jelas mengatur tatanan hubungan antara pemegang kendali kekuasaan dan rakyat. Meskipun rakyat menyatakan diri sebagai abdi Raja namun memiliki hak-hak yang bebas tanpa campur tangan penguasa, demikian pula penguasa. Terdapat batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu berarti Raja tidak memiliki hak atas kekuasaan mutlak

Kontrak kenegaraan ini juga memberikan keterangan tentang pelaksanaan keadilan bagi kesucian adat tata kelakuan untuk tetap menjamin ketaatan rakyat demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Ketegasan dari pelaksana hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan adat dipandang sebagai faktor terpenting. Penyalahgunaan kekuasaan dan pelaksanaan sewenang-wenang dari penguasa dan pelaksana hukum akan mendatangkan bencana karena rakyat ketiadaan perlindungan bagi keadilan untuk menjamin keserasian yang dapat berakibat rakyat meninggalkan negeri mereka dan berpindah ke negeri lain. Itulah sebabnya sering kita dengar pengeluhan masyarakat bila terjadi bencana, dengan mempertanyakan apa kesalahan negeri ini; perkataan "kesalahan negeri ini" menunjuk pada ketaatan pelaksana pemerintahan pada etika politik tradisional dan pada penanganan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya.

CATATAN

1. Kenneth R. Hall, *Maritime trade and state development in early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985, hlm.24.
2. Th. Q. Th. Pigesud, *Java in the fourteenth century. A. Study in cultural history* (The Hague: Martnus Nijhoff, 1960. Vol II). Hlm. 17. Anthony Reid, "The rise of Makassar", dalam : RIMA, (1983, vol. 17), lm. 122.
3. Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires* (London: Robert Maclehose & Co. 1994), hlm. 226.
4. Ibid, hlm. 226, Anthony Reid, *op.cit.* hlm. 127.
5. Armando Cortesao, *op.cit.* hlm. 226-227.
6. P.A. Tiele, "*De Eropean in den Maleischen Archipel*", dalam: BKI (1880, No. 28, vol. I), hlm. 419.
7. P.A. Tiele, *op.cit.* (vol. IV), hlm. 395-482.
8. Armando Caortesao, *op.cit.*, hlm. 222, catatan kaki. Pulau Sulawesi ini dalam peta yang dibuat oleh Eredia dinamakan Macassar. Pulau itu selanjutnya dibagi lagi atas tiga bagian, yaitu : Macassar regiam meliputi jazirah selatan, Bugvia regiam meliputi wilayah Sulawesi tengah dan jazirah utara disebut Celebes regiam. Penamaan ini kemudian berubah dalam peta Berthelot yang menyebut pulau itu dengan nama Celebes dan hanya jazirah selatan yang disebut Macassar. Penjelasan ini baca: Ibid. hlm. 226, catatan kaki.

9. Ch. Pelras, "*Sumber kepustakaan Eropa Barat mengenai Sulawesi Selatan*", dalam: Buku Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Makassar: 1973), hlm. 47; Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm. 19.
10. H.D. Mangemba, *Kota Makassar dalam lintasan sejarah* (Makassar: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Unhas, 1972), hlm. 1; W. Donald McTaggart, "*Kebijaksanaan pembangunan kota di Indonesia: kasus Ujungpandang, Sulawesi Selatan*", dalam: Masyarakat Indonesia (Thn. III, 1976, No. 1), hlm. 72-73; Anthony Reid, *op.cit*, hlm. 131-134.
11. G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *Sedjarah Gowa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara), hlm. 8-9; F.W. Stapel, *het Bongaa's verdrag* (disertasi, Leiden: Rijksuniversiteit Laiden, 1939), hlm. 2; Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 24.
12. Baca: G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *op.cit*, hlm. 18-19; Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 12; Anthony Reid, *op.cit*, hlm. 131-134.
13. F.W. Stapel, *op.cit*, hlm. 9.
14. J. Nòorduyn, "*De handelrelatie van het Makassarsche rijk volgens een notitie Cornelis Speelman uit 1670*", dalam: *Nederlandsche Historische Bronnen* (No. 3), hlm. 103-118.
15. Anthony Reid, *op.cit*, hlm. 117.
16. J.C. van Leur "*Mahan op den Indischen Lessenaar*", dalam: KT (Vol. XXX, 1941), hlm. 576.
17. Edward L. Poelinggomang, "*the Dutch trade policy and its impact on Makassars trade*", dalam: RIMA (Vol. 22, 1993), hlm. 81.
18. A.B. Lapien, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad XIX* (disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987), hlm. 129.
19. *Ibid*, hlm. 130
20. Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 19; Ch. Pelras, *op.cit*, hlm. 47.

21. G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *op.cit*, hlm. 25; Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 24-25; Edward L. Poelinggomang, *Proteksi dan perdagangan bebas : kajian tentang perdagangan Makassar pada abad ke-19* (Amsterdam: Centrale Huisdrukkerij VU, 1991), hlm.26.
22. *Ibid*, hlm. 27.
23. G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *op.cit*, hlm. 23-29; Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 25-26; Anthony Reid, *op.cit*, hlm. 137-138.
24. A.B.. Lapian, *op.cit*, hlm. 133.
25. *Ibid*, hlm. 135-136.
26. Baca: Edward L. Poelinggomang, *op.cit*, hlm. 32-34.
27. Kamaruddin, dkk, Pengkajian (transliterasi dan terjemahan) Lontaraq Bilang Raja Goa dan Tallok (Ujungpandang: Depdikbud, 1986), hlm. 88; Baharuddin Lopa, Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan (penggalan dari bumi Indonesia sendiri), (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 168.
28. Edward L. Poelinggomang, *op.cit*, hlm. 33-34.
29. *Ibid*, hlm. 34; "Bijdragen tot de eschiedenis van Celebes", dalam: TNI (Vol. 16, 1854, No. 2), hlm. 152
30. Anthony Reid, *op.cit*, hlm. 138-139; Ch. Pelras, *op.cit*, hlm. 63. Menurut catatan Speelman, Kerajaan Makassar memiliki juga Loji di Manila dan Makao; J. noorduyn, *op.cit*, hlm. 106.
31. Edward L. Poelinggomang, *op.cit*, hlm. 36; dikutip dari J.C. van Leur, Indonesian trade and society (Dordrecht: Foris Publication, 1983), hlm. 195-196.
32. G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *op.cit*, hlm. 64; Kamaruddin, dkk, *op.cit*, hlm. 94, 98.
33. G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *op.cit*, hlm. 69; Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 38.
34. A.B. Lapian, *op.cit*, hlm. 348.
35. Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa* (Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983), hlm. 1.

36. A.B. Lopian, *op.cit*, hlm. 346.
37. Mattulada, *Latoa: suatu lukisan analisis antropologi politik orang Bugis* (desertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), hlm. 378; Marwati Djonet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ed., *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm. 39-40.
38. Abd. Razak Daeng Patunru, *op.cit*, hlm. 2-3.
39. Mukhlis, "*Struktur birokrasi Kerajaan Goa zaman pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669)*" (skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 1975), hlm. 83-84, Marwati Djonet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ed., *op.cit*, hlm. 41-42.
40. Baca : Mukhlis, *op.cit*, hlm. 95-100.
41. Mukhlis. "*Landasan kulturasi dalam pranata sosial Bugis-Makassar*", dalam : Mukhlis, ed. *Dinamika Bugis-Makassar* (Jakarta: P.T. Sinar Krida, 1986), hlm. 8-9.
42. Baca:, Ph.O.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa* (Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977).
43. *Ibid*, hlm. 53.
44. Baca: Armando Cortesao, *op.cit*, hlm. 226-227.
45. Ph.O.L. Tobing, *op.cit*, hlm. 31.
46. J.C. van Leur, *op.cit*, hlm. 134.
47. Armando Cortesao, *op.cit*. hlm. 226; Anthony Reid, *op.cit*, hlm. 127.
48. F.W. Stapel, *op.cit*, hlm. 8; Edward L. Poelinggomang, *op.cit*, hlm. 31.
49. H.J. Friedericy, "*Aantekeningen over adat en adatrechn bij Bonesche pauwvaar*", dalam: KT (thn.XX, 1931), hlm. 65-91; L. van Voeren, "*De Parauwvaar van Celebes*", dalam: KS (thn I, 1917, No. 1), hlm. 329-339.
50. F.W. Stapel, *op.cit*, hlm. 14; Leonard Y. Andaya, *op.cit*, hlm. 45; Edward L. Poelinggomang, *op.cit*, hlm. 32-33.

51. "I" dan "La" pada kata Galigo ini sering diartikan pada gelar kebangsawanan. Dahulu para bangsawan Makassar mengenakan gelar "I" sementara bangsawan Bugis gelar "La". Namun kini lebih banyak digunakan gelar "Andi". Penggunaan kata "I" dan "La" pada kata Galigo itu memberikan makna bahwa kesusasteraan itu milik orang Makassar dan Bugis, yang wilayahnya berdasarkan penetapan bangsa Portugis dahulu meliputi Sulawesi bagian selatan (Makassar) dan Sulawesi bagian tengah (Bugis).
52. H.E.D. Engelhard, "*Mededelingen over hat eiland Seleijer*", dalam BKI (1884, No. 8, No. 3), hlm. 398-400.
53. R.A. Kern, *Catalogus bij de Boeginesche, tot den I La GaligoCyclus behoorende handschriften der Laidische Universiteitsbibliotheek alsmede van de andere Europeesche bibliotheek* (Leiden: Universiteitsbibliotheek, 1939).
54. H.J. Friedericy, "*De sranden bij de Boegineschen en Makassaren*", dalam: BKI (1933, No. 80), hlm. 447-602.
55. Sebagai contoh lihat sejarah Kerajaan Gowa. Baca: Abd. Razak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 2.
56. Mukhlis, *op.cit.*, hlm. 14-15.

BAB IV

KEBUDAYAAN ABAD XVII -- XIX

Jazirah selatan Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan) di masa lampau sampai awal abad ke-20, memiliki peran yang sangat dominan bila dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari pulau itu, dalam bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan. Seperti telah diketahui bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Gowa pada pertengahan abad ke-17 meliputi seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur dan Utara, dan sebagian dari Nusa Tenggara dan Maluku. Dalam bidang ekonomi tampak dengan adanya aktivitas pelayaran dan perdagangan suku Bugis dan Makassar selama abad ke-16, sampai awal abad ke-20. Wilayah pelayaran mereka meliputi hampir seluruh Nusantara. Peranan suku Bugis dalam bidang politik dan ekonomi di dunia Melayu (semenanjung Malaka, Sumatera Timur dan Tengah di Kepulauan Riau) dan Kalimantan Barat sangat besar. Suku Bugis dan Makassar secara tradisional telah terlayar ke Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, bahkan ke Menege di Benua Australia Utara untuk mengumpulkan hasil-hasil laut. Dalam bidang kebudayaan dapat dikemukakan misalnya mitologi dan kepercayaan tentang Sawerigading yang berkembang di Kerajaan Luwu dapat ditemui di Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah dan beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Bila di Sulawesi Tengah (termasuk Toraja) dan Sulawesi Utara kebudayaan menyangkut sistem religi megalitik langsung bersentuhan dengan kebudayaan barat, maka di Sulawesi Selatan lebih bervariasi. Agama Katolik pernah berkembang di Suppa dan Siang, dibawa oleh Portugis

pada abad ke-16. Akan tetapi, selanjutnya sejak awal abad ke-17, Agama Islam lebih dominan. Sulawesi Selatan justru berperan lebih aktif dalam proses Islamisasi.

Suku Bugis dan Makassar beruntung menempati wilayah dengan kondisi geografis yang memiliki banyak teluk dengan laut yang tenang yang kaya akan hasil laut. Letak yang strategis untuk pelayaran, memungkinkan mereka menggunakan angin muson yang berpindah arah di sepanjang tahun, untuk mencapai seluruh Nusantara penghidupan mereka bila tidak meramu hasil hutan dan bercocok tanam dengan sistem ladang adalah maritim (menangkap ikan, mengumpulkan hasil laut dan melakukan pelayaran niaga). Penduduk tidak sepenuhnya merasa terikat pada tanah di kampung halamannya. Penduduk akan pindah ke tempat lainnya mencari penguasa baru, bila di kampung halamannya diperlakukan semena-mena.

Pada abad ke-16 konflik-konflik kepentingan di bidang ekonomi meningkat sebagai akibat jumlah penduduk semakin banyak. Daya dukung ekonomis dengan sistem eksploitasi tradisional dirasakan menurun. *Perlu penataan prasarana politik. Proses integrasi politik terjadi sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak.* Namun persoalannya adalah siapa yang berhak memimpin di kalangan mereka. Perkembangan ini terjadi di sebahagian besar wilayah Sulawesi pada abad ke-16, ketika tersentuh oleh kehidupan yang bersifat komersial. Masyarakat dengan ekonomi subsistensi bergeser menjadi masyarakat dengan ekonomi perdagangan. Para pedagang Melayu, Jawa, Cina dan lain-lain datang ke Sulawesi. Integrasi politik terjadi dalam bentuk munculnya berbagai kerajaan. Letak Sulawesi Selatan yang strategis menghubungkan pusat-pusat perdagangan di Malaka dan pantai utara Jawa dengan Maluku (penghasil rempah-rempah); telah berkembang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Di sini muncul kerajaan-kerajaan kecil dalam jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari pulau ini. Konflik di antara kerajaan-kerajaan itu seringkali diakhiri dengan terbentuknya sebuah kerajaan besar, akan tetapi tidak jarang konflik diakhiri dengan pembentukan aliansi.

Demikianlah pertentangan antara kerajaan-kerajaan kecil telah menjadi penyebab bagi munculnya Kerajaan Gowa dan juga Kerajaan

Bone. Pertentangan antara kerajaan-kerajaan kecil Napo, Samasundu, Moso dan Toda todang telah mendorong bagi timbulnya persekutuan Pitu Baban Binanga itu menjadi kerajaan Mandar. Kehadiran Pitu Baban Binanga itu menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan kecil di pedalaman Mandar, yang selanjutnya membentuk persekutuan yang dikenal dengan nama Pitu Uluna Salu. Ancaman dan klaim kekuasaan Luwu dan Gowa telah memaksa kerajaan-kerajaan di antara kedua kerajaan itu untuk membentuk persekutuan Tellu Limpue yang terdiri atas Kerajaan-kerajaan Bulu, Tondong dan Lamatti. Ancaman Gowa dan Luwu itu di masa selanjutnya telah mendorong terbentuknya aliansi antara Bone, Wajo dan Soppeng.

4.1 *Kebudayaan Agraris*

Perjanjian Bungaya tidak hanya merugikan para pedagang dan pelaut Gowa, melainkan juga Wajo, Lamuru, Tosora dan Mandar. Oleh karena itu pada tahun 1671 mereka bangkit kembali melakukan perlawanan, tetapi dapat dibinasakan oleh pasukan gabungan Bone dan VOC. Dengan demikian masyarakat Sulawesi Selatan dihadapkan pada dua alternatif pilihan yaitu merantau atau tetap tinggal di tanah kelahirannya sebagai petani. Para pelaut dan pedagang pada umumnya memilih alternatif yang pertama, sehingga banyak kisah-kisah petualangan mereka di kawasan barat dan selatan nusantara. Namun dapat diperkirakan bahwa sebagian dari mereka memilih alternatif kedua. Hal ini berarti Sulawesi Selatan berkembang menjadi agraris. Perkembangan ini juga merupakan akibat, meski tidak secara langsung, Bone sebagai pihak yang menang dalam perang lebih berorientasi dan berbasis pada kehidupan agraris¹.

Perlu dikemukakan bahwa kehidupan agraris setelah perjanjian Bungaya berbeda dengan masa sebelumnya. Bila dahulu mereka bercocok tanam selain memenuhi kebutuhan sendiri juga untuk kepentingan ekspor, maka sesudah itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sulawesi Selatan kembali pada tingkat ekonomi subsistensi.

Kekalahan Gowa akibat ekspansi militer VOC yang dibantu Bone, Soppeng dan Toangke, berarti kehancuran Sulawesi sebagai suatu kesatuan politik. Sebelum ekspansi Belanda, sesungguhnya Gowa telah berhasil menempatkan seluruh Sulawesi beserta seluruh pulau-pulau di sekitarnya dan beberapa wilayah di sekitar Sumbawa berada di bawah

kekuasaannya. Setelah kekalahan itu Sulawesi kembali terdiri dari unit-unit sosial dan politik yang relatif kecil, berdiri sendiri-sendiri mengatur kepentingannya. Belanda yang memegang hegemoni politik pada masa itu tidak melakukan pengecualian di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara dan juga di Toraja. Akibatnya unit-unit sosial dan politik otonom baik dalam bentuk wanua, kaum maupun pada tingkat yang tertinggi yaitu negara atau kerajaan mengembangkan sistem sosial dan kebudayaan sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya pola-pola kebudayaan agraris. Baru, pada tahun 1905 Belanda berhasil membangun aparatur birokrasi pemerintahan yang efektif di seluruh Sulawesi.

Kebudayaan agraris misalnya menyangkut pola pemilikan tanah, sistem pewarisan dan organisasi kerja serta sistem bagi hasil lebih banyak merupakan hasil inovasi dan perkembangan kreativitas lokal. Persamaan-persamaan yang dikemukakan sudah terdapat pada masa pra kolonial. Kebijakan Belanda mencari kebebasan bagi praktek-praktek hukum adat setempat. Dengan demikian, meskipun terdapat pola-pola tertentu, kehidupan agraris di Sulawesi sangat bervariasi. Pada masyarakat yang memelihara isolasinya dari pengaturan dengan pihak luar, dengan teknologi bercocok tanam yang relatif belum berkembang, anggotanya terikat oleh hubungan kekerabatan.

Tanah adalah milik bersama warga desa, yang dalam penggunaannya diatur oleh sesepuh atau ketua suku yang dalam pemerintahan berperan sebagai primus inter pares. Sesepuh desa tidak berkuasa secara mutlak dan bukan seorang yang lalim. Setiap desa yang terdiri dari suatu suku mempunyai wilayah yang sangat luas. Di dalamnya tidak diperkenankan orang-orang bukan warga suka menebang kayu dan mengumpulkan hasil hutan. Penghidupan suku ini terutama adalah berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Pola penghidupan ini masih banyak dapat ditemukan pada abad ke-19, seperti misalnya pada suku-suku Minahasa Tondano di Sulawesi Utara dan di Toraja pada suku Bare. Klaim atas batas suatu wilayah yang sangat luas semata-mata karena basis mata pencaharian mereka dari berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan hasil hutan. Kepada desa (walak di Minahasa), karena perlindungan dan kepemimpinannya, maka rakyat secara sukarela menyerahkan sebagian dari pendapatan mereka seperti misalnya dari upah yang diperoleh dari pembukaan hutan, penggarapan dan panen padi tegalan, pembangunan

rumah pada perkawinan dan perceraian². Pada tahun 1850 penduduk dibebaskan dari pekerjaan wajib di kebun-kebun kepala desa, sebagai gantinya adalah penyerahan wajib dari sejumlah padi tertentu.

Di Poso, Sulawesi Tengah, penggarapan sawah dilakukan oleh seluruh penduduk desa. Oleh karena tanah adalah milik desa, maka jika seseorang meninggalkan sawahnya dan pindah ke desa lain, orang lain dapat menggunakannya tanpa ganti rugi. Hal serupa juga terjadi pada orang-orang Bare di Toraja. Mereka secara timbal balik menggarap sawah-sawah seluruh warga desa.³

Perubahan menyangkut pemilikan dan organisasi kerja pengolahan tanah berkaitan dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat. Di bidang ekonomi terjadi proses spesialisasi dan spesifikasi pekerjaan yang tidak hanya terbatas pada sektor pertanian saja. Lapangan pekerjaan seperti pertukangan, kerajinan, jasa transportasi dan lain-lain berkembang. Seseorang dapat memperoleh bahan makanan meskipun tidak bekerja pada sektor pertanian. Hal ini berarti terjadi proses komersialisasi. Produksi dilakukan semata-mata tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Faktor pendorong yang utama dari perubahan ini adalah perkembangan teknologi bercocok tanam yakni dari sistem penanaman padi di ladang ke sistem penanaman di sawah dengan pengairan yang teratur. Sistem sawah memungkinkan beberapa kali panen dan lebih menjamin kehidupan padi. Akibat penemuan teknologi ini bahan makanan meningkat, terdapat surplus yang dapat memenuhi kebutuhan bahan makan bagi sejumlah orang yang hidup di luar sektor pertanian. Surplus bahan makan memungkinkan peningkatan jumlah penduduk yang pada gilirannya memperkuat kemampuan masyarakat dalam menggarap sawah.

Peningkatan jumlah penduduk telah mendorong adanya kebutuhan penataan-penataan hubungan sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi dan menjamin segala kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu berkembanglah sekelompok orang yang mengatur kehidupan bersama. Komunitas politik yang teratur terbentuk. Sekelompok orang ini merupakan lapisan sosial yang memegang kekuasaan pemerintahan. Dibandingkan dengan daerah lain, rupanya di Sulawesi Selatan akhirnya mempengaruhi pola-pola yang ada di bagian lainnya seperti misalnya di Gorontalo dan Bolang Mangondow di Sulawesi Utara.

Di Sulawesi Selatan kelompok pemegang kekuasaan itu memperoleh landasan otoritas kekuasaannya yang bersumber pada mitologi I Lagaligo. Mitologi ini bagi orang Bugis dan Makassar pada masa lampau tidak hanya sekedar sebagai suatu karya kesusasteraan saja, tetapi juga diterima sebagai suatu kepercayaan dan merupakan realitas sejarah yang masih terus berlangsung.⁴ Menurut mitologi ini raja-raja yang memerintah adalah keturunan para dewa dari dunia atas dan para dewa dari dunia bawah. Para dewa itu memiliki atribut kebesaran seperti berjubah dan menggunakan payung kebesaran berwarna kuning keemasan, memiliki tempat duduk berupa batu datar dan memiliki pengawal yang berpakaian jubah serba putih. Kedatangan mereka ditandai dengan adanya hujan lebat, disertai dengan adanya kilat dan petir, bumi berguncang dan lain-lain. Kehadiran para dewa dari dunia bawah dapat terjadi melalui bambu petung, buih air (biasanya dari lautan) dan sebagainya. Kehadiran kembali para dewa di atas dunia ini, pada masa setelah jaman I Lagaligo, merupakan realisasi dari janji Datu Patotoe yang akan mengirimkan utusan-utusannya (manurung-manurung yang berdarah putih) dari waktu ke waktu dengan diam-diam dan secara rahasia ke bumi, tempat kediaman manusia⁵.

Bertolak dari janji Datu Patotoe itu kemudian di Sulawesi Selatan banyak muncul mitologi tentang To Manurung yang merupakan awal bagi keberadaan suatu kerajaan. Hampir seluruh kerajaan besar memiliki mitologi To Manurung. Keturunan mereka merupakan inti dari lapisan sosial paling atas yakni anakrung atau anakaraeng dan Todiang⁶.

Menurut mitologi I Lagaligo, bumi (dunia tengah) diciptakan oleh sang pencipta (Datu Patotoe) dan para menurung adalah keturunannya, yang memerintah di atas dunia sebagai raja. Oleh karena itu adalah suatu hal yang patut bila raja memiliki hak atas dunia ini melebihi daripada rakyat biasa. Meskipun demikian tidak semua keturunan To Manurung dapat menjadi raja. Seorang yang memerintah suatu kerajaan harus dapat membuktikan dirinya mendapat restu para dewa dengan memiliki ornamen yang dipandang sebagai titisan dewa. Ornamen ini disebut dengan gaung yang merupakan inti dari keseluruhan benda-benda pusaka kerajaan yang dinamai dengan kalompoang. Penemu kalompoang dipandang telah mendapat tutunan dewa. Benda-benda ini dipuja dan disembah sebagai pelindung jiwa masyarakat dan sebagai lambang

kehadiran sang pencipta dalam kehidupan masyarakat. Untuk setiap kesatuan bidang pemerintahan memiliki bentuk yang berbeda-beda, benda intinya ada yang berwujud sepotong kayu, gambar, sepotong besi, umbian kering dan kebanyakan berupa sebuah batu. Kalompoang adalah nama yang lazim untuk suku Makassar, sedangkan di kalangan orang Bugis adalah Arajang. Di antara benda-benda itu ada yang menyangkut sebidang tanah tertentu, yakni tanah kerajaan yang di Gowa disebut dengan Butta Kalompoang. Raja sebagai pemegang kendali pemerintahan dengan gaugang melaksanakan kekuasaan atas Tanah Kalompoang.

Sebagian tanah butta kalompoang atau galung arajang berupa sawah kerajaan yang subur. pengolahan sawah ini menjadi tanggung jawab rakyat yang hasilnya diserahkan kepada pemegang kalompoang. Pada setiap musim tanam tiba, sebelum rakyat (petani yang biasanya disebut dengan golongan *to maradeka* atau *to sama*) menggarap tanah sendiri, terlebih dahulu mengikuti upacara ritual *aliliri* atau *appalili* yang dipimpin raja atau pejabat yang ditunjuk raja dan setelah mengabdikan diri pada raja dengan mengolah sawah kalompoang. Mereka yang tidak turut mengerjakan tugas ini harus membayar pajak yang dapat dibayarkan dalam bentuk natura atau uang senilai dengan harga 10% dari hasil sawah yang digarapnya⁷.

Di Batoporo (Mandar) sebelum mengerjakan sawah, penduduk terlebih dahulu pergi ke Patolasang atau pusat tanah, untuk melakukan upacara ritual yang dipimpin oleh *maradia*. Setelah itu mereka masing-masing menyelenggarakan upacara ritual yang dipimpin oleh seorang *kali* atau *pendeta*.

Di daerah Segeri terdapat ornament kalompoang berupa bajak yang dibungkus dengan kain putih, ditempatkan dalam sebuah rumah di tengah sawah. Raja menyerahkan pemeliharaan bajak ini kepada kepala daerah setempat yang bergelar *Anreguru*, yang setiap hari, siang dan malam menyediakan sesaji. *Anreguru*, sehubungan dengan tugas tersebut berhak memungut pajak atas padi, barang-barang dagangan di pasar dan perahu-perahu yang lewat di Segiri⁸.

Raja sesungguhnya, karena memiliki kalompoang, adalah pemilik tanah di seluruh negeri. Raja kemudian meminjamkan (menyerahkan) sebidang tanah kepada para pejabat, pengikut atau para kerabatnya atau

siapa saja yang dipandang telah berjasa kepada kerajaan. Penyerahan ini termasuk juga cacahnya (ana'anang atau taunna) yang sekaligus berkedudukan sebagai penggarap tanah itu. Inilah sebab utama tanah di Sulawesi Selatan tidak lazim diperjual belikan. Sebaliknya penggarap tanah dibebani sejumlah pajak tertentu jika dalam bentuk sawah, jumlah itu meliputi 10% dari produksi sawah, yang diberikan kepada pemilik kalompoang. Kewajiban berupa penyerahan tenaga kerja atau hasil produksi kepada pemegang kalompoang itu disebut dengan kasuwiyang.

Apabila pemilik tanah bukan pemegang kalompoang maka pengolahan tanah dilakukan dengan sistem yang lazim disebut dengan tesarang. Tanah-tanah ini dalam penggarapan dibagi dua. Sebagian tanah, hasilnya untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk petani penggarap. Hasil yang diperoleh petani masih dikurangi sedikitnya dua persen sebagai suatu kewajiban sima⁹.

Raja, selain memperoleh penghasilan dari sebagian yang diterima para pembantunya, pejabat pemerintahan sampai pada para kepala desa dan kerabat raja juga menerima penyerahan tenaga kerja petani. Selain itu raja berhak memungut pajak atas hasil hutan yang berada dalam wilayah kekuasaannya.

Perlu dikemukakan bahwa kerajaan-kerajaan besar muncul diawali dengan kerajaan-kerajaan kecil bertambah kuat yang selanjutnya menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Meskipun juga banyak ditemukan kerajaan lain menundukkan dan menggabungkan diri secara sukarela kepada kerajaan yang kuat. Apabila integrasi politik dalam suatu kerajaan terjadi secara damai maka secara kuantitatif lapisan anakarung atau anakaraeng dan to maradeka menjadi semakin besar jumlahnya. Akan tetapi bila integrasi politik terjadi lewat jalan kekerasan yang berlarut-larut akan memunculkan lapisan sosial baru yaitu budak atau ata.

Lapisan sosial ata dapat terbentuk selain akibat kekalahan dalam perang juga karena tidak dapat membayar hutang. Mereka bekerja pada tuannya, tanpa mendapat upah, tetapi makan dan tempat tinggal sekeluarga disediakan oleh majikannya. Pada masa terjadi krisis ekonomi jumlah lapisan ini meningkat sebagai akibat semakin banyak orang yang terlibat hutang dan tidak dapat melunasinya. Jika tuannya merasa tidak mampu menanggung hidupnya maka hal ini akan mendorong terjadinya perdagangan budak. Maros dan Pangkajene yang pada masa sebelum

Perang Makassar merupakan daerah lumbung beras, akhirnya menjadi pemasok utama budak yang diperdagangkan di Batavia.

Tenaga budak banyak digunakan sebagai penggarap sawah di Sulawesi Selatan, demikian juga di Toraja pada suku Bare atau To Lage; di Sulawesi Tengah yakni di Palu serta Sulawesi Utara misalnya di Gorontalo dan Bolang Mangondow. Pada umumnya kehidupan para budak itu cukup lumayan, oleh karena itu kebanyakan dari mereka merasa enggan bila dibebaskan dari majikannya. Di Toraja biasanya budak tinggal di rumah tuannya sampai saat mereka berumah tangga sendiri, serta menggarap tanah yang sebagian hasilnya diserahkan kepada majikannya. Budak-budak yang sudah menikah mempunyai milik, tetapi tuannya masih tetap dapat menugaskan mereka. Mereka mendapat sepertiga dari hasil panen bila semua biaya ditanggung tuannya dan mendapat separuh bagian bila menanggung sendiri seluruh biayanya. Pembagian ini juga berlaku untuk usaha ternak kambing, domba dan kerbau¹¹.

Budak di Gorontalo dapat dibedakan sebagai berikut :

- (1) Hapita, hamba milik raja yang mengolah kebun dan sawah milik raja.
- (2) Mongolube, keturunan budak yang setelah berumur 10 tahun menjadi budak Hapita.
- (3) Budak pusaka, yaitu budak yang bekerja pada orang kebanyakan (orang bebas).

Kaum bangsawan di Gorontalo memandang pekerjaan berdagang dan bertani merupakan pekerjaan yang hina. Pekerjaan ini hanya patut dilakukan oleh budak¹².

Di Bone budak mendapat perlakuan lebih manusiawi, bila dibandingkan dengan di daerah Sulawesi Selatan lainnya. Di Kerajaan Bone pernah terjadi usaha pembebasan budak, yaitu pada tahun 1643, dilakukan oleh Raja Bone La Maddaremeng. Akibat kebijakan itu Bone diserang oleh Gowa, Sidenreng dan Wajo. Laskar Bone dikalahkan. Selanjutnya Raja Gowa, Sultan Malikussaid mengangkat Karaeng Sumana sebagai penguasa pemerintahan di Bone dengan gelar Jannang¹³.

Pada ahun 1776, satu abad setelah perang Makassar, bekas wilayah Gowa berada di bawah kekuasaan VOC, Bone menduduki Noorder

Provincie, yakni Maros dan Pangkajene, daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan dan pemasok utama budak yang diperdagangkan di Batavia. Pada waktu itu di Maros terjadi pemberontakan Batara I Sangkilang melawan VOC. Namun setelah dikuasai Bone Noorder provincie tidak diserahkan kepada Belanda. Bone menolak hegemoni politik VOC di Sulawesi Selatan dan berupaya menerobos monopoli ekonomi oleh Belanda. Untuk itu Bone mengembangkan kota pelabuhan Pare-pare, di selat Makassar sebagai bandar niaga. Selanjutnya, melewati selat Makassar Bone menjalin hubungan perdagangan dengan Inggris, kerajaan-kerajaan Melayu dan ke Maluku. Rupanya sejak itu orang-orang Bone melakukan migrasi musiman pada masa panen padi di Maros dan Pangkajene yang penduduknya terdiri dari Suku Makassar. Orang-orang Bugis itu bekerja menyabit padi yang pada masa sebelumnya lazim dilakukan oleh Budak. Mereka memperoleh seperempat bagian dari hasil panen.

Kebijakan yang ditempuh raja Bone merupakan awal kebangkitan kemaritiman dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Kebijakan Bone selanjutnya diikuti oleh kerajaan-kerajaan Bugis lainnya seperti Wajo dan Sidenreng. Eksploitasi ekonomi yang bersifat monopoli oleh VOC dan sistem ekonomi subsistensi di kalangan penduduk bumi putera digantikan dengan ekonomi perdagangan. Proses komersialisasi terjadi. Demikian pengaruh Bone atas kerajaan kecil di Sulawesi Utara seperti Gorontalo, Semawa dan lain-lain terjadi pada periode ini. Pada tahun 1810 pengaruh Wajo masuk ke Bolang Mangondow¹⁴.

Namun aktivitas kemaritiman itu kembali surut, setelah Inggris dalam Konvensi London pada tanggal 14 Agustus 1814 bersedia menyerahkan wilayah koloni Belanda di Amerika, Afrika dan Asia. Konvensi ini akhirnya direalisasikan dalam traktat London tanggal 17 Maret 1824. Inggris tidak mencampuri kepentingan-kepentingan politik Belanda, jika orang-orang Inggris diberi kebebasan kegiatan niaga di wilayah koloni Belanda, kecuali berdagang rempah-rempah di Maluku.

Gubernur Jenderal Baron van der Capellen sejak tanggal 5 Juli 1824 berada di Makassar melakukan berbagai pendekatan pada kerajaan-kerajaan sekutu di Sulawesi Selatan dengan menawarkan perubahan-perubahan atas isi perjanjian Bungaya tahun 1667. Akan tetapi upaya ini berakhir dengan kegagalan, ditolak oleh Ratu Bone, I Manneng Arung Data yang mendapat dukungan raja Tanete dan Suppa. Akhirnya van der

Capellen memerintahkan operasi militer atas kerajaan-kerajaan yang dianggapnya membangkang. Belanda sukses dalam operasi militer yang dilakukan pada tahun 1824 dan 1825, tetapi gagal dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Ratu Bone beserta para penggantinya tidak bersedia bekerjasama dengan tulus hati. Baron van der Capellen terpaksa harus menahan diri, karena pada waktu itu terjadi Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin oleh Diponegoro melawan Belanda¹⁶.

Salah satu hal yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan agraris adalah pasal 13 dan 14 dari perjanjian Bungaya yang diperbaharui pada tahun 1824. Isinya adalah upaya memajukan pertanian rakyat dari kerajaan-kerajaan yang menandatangani perjanjian diijinkan berdagang ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Kebijakan ini nampak berpengaruh pada aktivitas pelayaran di kalangan orang-orang Bugis dan Makassar khususnya, akan tetapi relatif belum mampu merubah kehidupan agraris. Prasarana ekonomi seperti perijinan berlayar, tarif pajak yang tidak seragam. Pajak yang dipungut di Makassar jauh lebih besar dari yang dikenakan di Batavia. Komoditas dagang yang dibawa kapal-kapal berbendera Belanda dan negara-negara Eropa lainnya juga dikenai pajak yang lebih tinggi dengan yang dipungut di Batavia. Demikian pula yang terjadi dengan Jung-jung Cina. Selain itu di Sulawesi relatif belum terdapat komoditas dagang berupa hasil-hasil pertanian, selain padi. Teknologi penanaman tanaman-tanaman yang laku di pasaran ekspor belum dikenal. Meskipun demikian produksi beras mulai bergeser yang semula hanya untuk kebutuhan sendiri telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Perubahan agraris yang cukup berarti baru terjadi setelah pemerintah kolonial Belanda memberlakukan perdagangan bebas pajak dan pelabuhan bebas masuk untuk kapal-kapal asing di pelabuhan Makassar, Manado dan Kema. Pada tahun berikutnya juga diumumkan untuk Kaili. Ketentuan bebas pajak itu tidak termasuk barang-barang ekspor yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan tersebut. Semenjak itu digiatkan upaya penanaman tanaman-tanaman yang hasilnya laku untuk pasaran ekspor seperti kopi, tebu, kapas, kelapa dan coklat.

Tanaman kopi di Sulawesi Selatan pada mulanya hanya terdapat di Bantaeng, Gowa dan Pulau Selayar. Di Gowa kopi diperkenalkan oleh pedagang Arab. Kopi biasanya ditanam di dataran tinggi, diusahakan

sendiri oleh penduduk dan ada yang diusahakan oleh para bangsawan dengan cara memerintahkan para pengikut atau budaknya menanam kopi.

Di Sulawesi Utara, yakni di Remboken telah ditanam pada tahun 1796 atas usaha Bastian Enok yang kemudian diikuti oleh penduduk di sekitar Minahasa. Pada tahun 1822 perkebunan ini diusahakan oleh pemerintah dengan mendatangkan orang-orang Jawa untuk menanam kopi. Hasil kopi di Minahasa pada tahun 1818 berjumlah 200 pikul, pada tahun 1853 meningkat menjadi 16.000 pikul. Kopi dibeli pemerintah yang pada mulanya ditukar dengan kain, tetapi setelah tahun 1825 dibeli dengan uang. Tanaman kopi juga ditanam di Minahasa, Bolang Mangondow dan daerah Modayag¹⁷.

Penanaman kopi dimulai dengan membuka hutan yang diperkirakan cocok untuk kopi, kemudian ditanami jagung. Beberapa bulan kemudian, mereka panen jagung dan kopi ditanam. Pada tahun berikutnya mereka datang kembali membersihkan tanaman kopi yang telah tumbuh dari alang-alang dan rumput, serta menabur jagung di sela-sela tanaman kopi. Mereka akan datang beberapa bulan, kemudian untuk panen jagung, merawat tanaman kopi dan menabur bibit jagung lagi. Hal ini dilakukan beberapa kali sehingga kopi berbuah. Kebun kopi baru dijaga ketika mulai berbuah. Tempat pemukiman para penjaga kebun itu dari tahun ke tahun, seiring dengan perkebunan yang terus meluas, makin banyak penduduknya sehingga berkembang menjadi perkampungan baru¹⁸.

Oleh karena perdagangan kopi sangat menguntungkan maka biasanya atas inisiatif para penguasa (raja, karaeng, aru dan lainnya) dibuka kebun-kebun kopi baru. Kebun kopi akhirnya dikembangkan di Maros, Sinjai, Bone, Pangkajene, Mandar, Toraja, Minahasa dan lain-lain. Keterlibatan para bangsawan atau regent dalam kegiatan produksi dan perdagangan kopi, telah mendorong pembentukan jannang-jannang (pejabat yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat).

Jumlah produksi kopi dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Wilayah Makassar pada tahun 1852 mengeksport 18.000 pikul. 1855 menurun 17.000, tetapi pada tahun 1857 naik menjadi 26000 pikul dan pada tahun 1859 menjadi 42.000 pikul. Hasil produksi di Bonthain pada tahun 1856 menghasilkan 10190 pikul, pada tahun 1857 menurun 9550 pikul, tetapi pada tahun 1858 naik menjadi 12346 pikul dan pada tahun 1860 turun lagi menjadi 12000 pikul. Perdagangan kopi sangat

menguntungkan, terutama para pedagang. Pada pembeli pertama harga tiap pikulnya f.6 sampai f.8, pada pedagang yang terakhir antara f.25 sampai f.30, sedangkan harga pasaran di Makasar antara f.25 sampai f.30. Hal ini berarti lebih banyak keuntungan yang diterima pedagang daripada para petaninya¹⁹.

Sehubungan dengan keuntungan perdagangan kopi sangat menguntungkan maka hal ini telah mendorong raja-raja dan para bangsawan memonopoli produksi ini. Mereka turut berperan dalam perdagangan kopi, yang seringkali memaksa petani untuk menjual yang harga lebih rendah dan juga kadang-kadang membebani petani dengan berbagai kewajiban. Misalnya di Gowa, menjelang akhir abad ke-19, petani harus membawa kopi sejauh 50 sampai 60 paal, kopi selanjutnya dijual dengan harga yang lebih rendah dari tempat lainnya. Hal ini juga terjadi di Bone. Akibatnya produksi kopi di kedua kerajaan itu mengalami kemunduran. Transportasi pada masa itu selain menggunakan tenaga manusia juga menggunakan kuda. Pada musim panen kopi para pemilik kuda pergi ke daerah-daerah penghasil kopi untuk menyewakan kuda sebagai alat pengangkutan kopi²⁰.

Selain kopi, dapat dikemukakan di sini adalah upaya penanaman tanaman tebu, kelapa, kapas dan tembakau. Tebu pada masa itu dipandang kurang cocok untuk daerah Sulawesi. Tebu hanya ditanam di daerah Takalar, Maros dan Pangkajene berdampingan dengan tanaman padi, di tanam atas persetujuan penduduk. Pada tahun 1867 telah dibangun tiga pabrik gula yang menghasilkan gula sejumlah 3450 pikul. Dari jumlah ini yang diekspor adalah 1350 pikul. Perkebunan tebu di Zuderdistricten (distrik selatan yang berkedudukan di Takalar) berturut-turut pada tahun 1858 telah menyumbang pemerintah berupa pajak f.2503, pada tahun 1859 sejumlah f.1006 dan tahun 1860 menyumbang f.3526. Pabrik Gula diusahakan oleh usaha partikular (swasta) yakni Makassar Suiker. Usaha penanaman dilakukan oleh para penguasa dengan menggunakan tenaga penduduk. Pengangkutan tebu dan gula dilakukan dengan menggunakan tenaga kerbau, misalnya di Gowa dan Makassar, sedangkan di tempat lain biasanya dibawa petani sendiri ke pabrik²¹.

Pihak pengusaha pabrik gula tidak membayar biaya penanaman tebu. Penguasa hanya membayar tebu yang baik dalam ikatan-ikatan yang masing-masing terdiri dari 100 batang. Harga tiap ikat di Zuderdistricten

antara 60 - 70 sen, sedangkan di Makassar harganya 55 sen. Batangan tebu itu di pabrik digiling dan dimasak menjadi gula. Adapun harga gula di pasaran pada masa itu berkisar antara f.25 sampai f.40 tiap pikulnya.

Di pabrik gula yang terdapat di Makassar dan Zuiderdistricten dipekerjakan kuli-kuli dan orang-orang yang tergadai yang diupah sebagai buruh harian. Juru masak gula biasanya adalah orang-orang Cina yang diupah antara f.60 sampai f.80 per hari. Jenis tebu yang ditanam di Sulawesi tidak memerlukan air dan sistem pengairan yang teratur seperti yang lazim di Jawa. Tebu dapat terus tumbuh meskipun hanya mendapat siraman hujan.

Tanaman kapas kurang mendapat perhatian. Penduduk yang mengusahakan kapas terdapat di Selayar dan di Turatea. Produksi pada tahun 1865 hanya mencapai 370 pikul, tetapi pada tahun 1866 mencapai 740 pikul. Pada tahun berikutnya mencapai 862 ikul dan pada tahun 1868 menurun menjadi 598 pikul. Jumlah ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu pada tahun 1868 telah diimpor kapas sejumlah 186 pikul²².

Pemerintah Kolonial Belanda dalam memberlakukan kebijakan perdagangan bebas juga mendorong penanam pohon kelapa, tetapi tidak mendapat sambutan yang hangat. Tanaman kelapa justru telah banyak ditanam jauh sebelum kebijakan itu. Oleh karena itu banyak dijumpai di Pulau Selayar dan kepulauan Sangir Talaud.

Di Sulawesi Selatan penghasil kelapa selain Selayar adalah Makassar, Noorddendistricten, Zuiderdistricten, Bonthain, Bulukumba dan Sinjai. Ekspor kelapa dari Selayar (penghasil kelapa paling banyak di Sulawesi) pada tahun 1860 mencapai 291.190 butir, pada tahun 1866 mencapai 350 buah, kemudian pada tahun 1867 meningkat sangat tajam yakni mencapai 1.284.000 butir kelapa. Harga 100 buah kelapa pada tahun 1866 antara f.1.5 sampai f.a.8. Selayar juga mengeksport minyak kelapa yakni pada tahun 1860 berjumlah 3.472 pikul, pada tahun 1866 berjumlah 600 pikul dan pada tahun 1867 meningkat lebih dari enam kali lipat yaitu 3.820 ikul. Harga tiap pikulnya pada waktu itu antara f.1.30 sampai dengan f.1.45²³.

Di sebagian besar wilayah Sulawesi, budak sangat berperan dalam menggarap sawah dan kebun, juga mengolah hasilnya, mengangkut

produksi ke pasar dan lain-lain. Oleh karena itu ketika pemerintah Belanda membatasi perbudakan, pada tahun 1873 Kerajaan Sidenreng, dan Wajo menentang keras kebijakan itu. Kedua kerajaan itu melakukan berbagai persiapan perang melawan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan itu secara ekonomis sangat merugikan para majikan, yang umumnya adalah para bangsawan, karena jika pada mulanya cukup hanya memberi makan dan tempat tinggal, setelah itu pada setiap tugas atau pekerjaan harus mengeluarkan sejumlah uang.

- Gorontalo, sebelum tahun 1889 merupakan daerah yang subur, makmur dan surplus beras. Pada waktu perbudakan dihapuskan seara berangsur-angsur berubah menjadi daerah yang miskin. Taah-tanah yang subur ditinggalkan bekas budak dan memilih tinggal di hutan, membuka lahan-lahan baru dan menanam padi gogo. Di Gorontalo terdapat garis pemisah yang tegas antara lapisan bangsawan dan budak. Kepada budak, para bangsawan menuntut kepatuhan dan kesetiaan yang diwujudkan dalam bentuk perintah. Tidak terdapat dialog yang masing-masing menempati posisi yang sederajat. Akibatnya kedua golongan itu gagal menentukan kesepakatan menyangkut pembagian pekerjaan, modal dan pembagian hasilnya²⁴.

Secara menyeluruh penghapusan perbudakan berakibat bagi kemunduran pertanian penduduk. Para bangsawan kehilangan kekuasaan untuk memperoleh tenaga kerja yang cukup untuk mengolah sawah-sawah mereka. Produksi beras menurun. Namun hal ini secara berangsur-angsur terjadi penyesuaian. Antara pemilik tanah dan bekas budak dapat menjalin kesepakatan kerja yang biasanya dalam sistem bagi hasil²⁵.

Sistem bagi hasil sesungguhnya telah berlangsung lebih awal dari kebijakan penghapusan perbudakan. Sistem bagi hasil, bagi modal dan penggarapan mulai berkembang bersamaan dengan terjadinya proses komersialisasi dan individualisasi. Pada berbagai daerah corak sistem bagi hasil tidak sama, ditentukan oleh kondisi dan hasil inovasi masyarakat setempat.

Di Tondano pemilik tanah disebut dengan Timoyo, menyediakan alat-alat pertanian dan bibit. Penggaran disebut tinoyoan selama bekerja kebutuhan makannya ditanggung timoyo. Dalam sistem demikian tinoyoan mendapat 1/10 bagian dari hasil panen.

Di Minahasa terdapat pembagian tanaman yang dilakukan sebelum panen. Masing-masing mendapat separuh bagiannya. Pemilik tanah yang memiliki bagiannya terlebih dahulu. Apabila tinoyoan diminta memanen sawah timoyo, maka perbandingannya adalah 5 untuk pemilik tanah dan 6 untuk penggarap²⁶.

Di Toli-toli penggarapan sawah dibagi tiga demikian juga hasilnya. Pemilik tanah yang menyediakan kerbau untuk membajak, dan menyediakan bibit mendapat satu bagian. Penggarap yang membajak, menggaru dan mengatur serta menjaga pengairan mendapat satu bagian dan penanam yang menyabit padi mendapat sisanya.

Di Makale, waktu itu masuk wilayah Luwu, bagian untuk pemilik tanah dan penggarap masing-masing separuh, setelah dikurangi biaya-biaya antara lain :

1. Menabur bibit (1/100 bagian), 2. Membuat petak bibit (1/100 bagian), 3. Mengantar makanan untuk penggarap (1/100 bagian), 4. Memasak makanan untuk pekerja (1/100 bagian), 5. Menyisihkan bibit pada 30 ikat di antara 100 ikat (1/100 bagian), 5. biaya sesajian yang dapat berupa seekor babi atau ayam. Sesaji berupa babi bila panen mencapai 8000 ikat, sesajinya antar 200 sampai 600 ikat. Jika panen kurang dari 8000 ikat, disisihkan 20 ikat untuk pembeli ayam, 7. Penggunaan kerbau untuk membajak, disisihkan 50 ikat tiap harinya, 8. Biaya yang diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas penggarapan sawah, jumlahnya 10 ikat, 9. Setiap orang yang datang pada hari terakhir panen, meskipun tidak turut bekerja, bagiannya adalah 2-20 ikat²⁷.

Di daerah Mandar yakni wilayah Ulunna Salu dan Binuang Atas pada tahun 1924 terdapat ketentuan bahwa tanah yang tidak digarap boleh ditanami orang lain yang menikmati hasilnya secara penuh selama 3 sampai 4 tahun. Setelah itu baru dilakukan sistem bagi hasil. Pemilik tanah dan penggarap masing-masing mendapat separuh bagian²⁸.

Pada tahun 1909 di Kerajaan Gowa terdapat ketentuan bahwa 1/3 dari hasil tanah kalompoang diserahkan sebagai tesang. Di Sungguminasa berlaku bagi hasil separuh-separuh antara pemilik tanah dengan penggarap bila sawahnya subur, jika tanahnya kurang subur 2/3 bagian untuk penggarap. Kemudian penggarap akan mendapat 4/5 bagiannya bila

kondisi sawah sangat jelek dan tidak subur. Demikianlah sistem bagi hasil di Sulawesi bervariasi sifatnya.

4.2 Islamisasi, Sufisme dan Gerakan Sosial

Islamisasi di Sulawesi telah terjadi pada awal abad ke-16. Jatuhnya kerajaan Malaka kepada Portugis pada tahun 1511 telah mendorong bagi terjadinya migrasi para pedagang ke kota-kota pelabuhan niaga di sepanjang rute perdagangan laut di Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Kedatangan para pedagang muslim itu diterima dengan senang hati, karena akan meningkatkan penghasilan kerajaan yang dapat dipungut lewat bea cukai di pelabuhan. Raja Gowa Karaeng Tunipallangga (1546-1565) menyambut kehadiran mereka dengan mendirikan mesjid di Mangallekara. Pada tahun 1532, ketika kerajaan Gowa berkembang dengan pesat di bawah pimpinan Raja Tumaparisi Kalonna, Anakhoda Bonang (seorang saudagar muslim dari Jawa) mewakili para pedagang Melayu (termasuk di dalamnya pedagang dari Pahang, Patani, Campai, Minangkabau, Johor) pindah dari kerajaan Siang (Pangkajene) ke Somba Opu, ibukota kerajaan Gowa. Para pedagang ini diterima dengan baik oleh Tumaparisi Kalonna.

Islamisasi di Sulawesi Tenggara telah terjadi lebih awal yang terjadi di Sulawesi Selatan. Raja Buton telah memeluk agama Islam pada tahun 1540. Ia di Islamkan oleh Syekh Abdul Wahid, seorang Mubaligh Melayu yang datang dari Johor. Raja yang pertama yang masuk Islam bernama Mulae. Islamisasi selanjutnya diperluas oleh penggantinya yaitu La Kilaponto yang bergelar Sultan Murhum. Islam dinyatakan sebagai agama resmi kerajaan²⁹.

Islamisasi di beberapa tempat di Sulawesi Timur, termasuk di Selayar, yang pada tahun 1580 diberikan Sultan Ternate (Babullah) kepada Raja Gowa (I Manggarai Daeng Mammata Karaeng Tunijallo) di Sulawesi Selatan, terjadi terutama karena wilayah ini pada abad ke-16 pernah berada di bawah kekuasaan Sultan Ternate. Islam telah diterima di kerajaan Ternate pada tahun 1580. Pada masa itu rute perdagangan yang lazim ditempuh adalah dari Malaka ke pantai utara Jawa dan selanjutnya ke Maluku. Oleh karena itu islamisasi di Maluku dilakukan dari kota-kota Muslim di pantai utara Jawa (peran para santri Sunan Giri sangat

penting). Rute pelayaran niaga yang melewati Sulawesi Selatan baru berlangsung pada masa kemudian.

Di Sulawesi Selatan dapat diperkirakan Islamisasi dimulai oleh kalangan sosial para pedagang. Para pedagang dari daerah ini telah berlayar di seluruh Nusantara dan mereka banyak berhubungan dengan para pedagang Muslim, sehingga dapat diperkirakan dari kalangan pedagang Bugis dan Makassar lebih dahulu masuk Islam daripada rajanya.

Menurut sumber tradisional berupa kronil Tallo Islamisasi di Makassar berawal ketika Mangkubumi Gowa, yakni Raja Tallo, I Mallinggaang Daeng Nyonri, tertarik pada agama Kristen Katholik yang dianut orang Portugis dan agama Islam pada orang-orang Melayu. Untuk itu I Mallinggaang mengunjungi Arung Matoa Wajo, La Mangkatye, membicarakan dan membandingkan persoalan-persoalan ketauhidan antar agama Kristen dan Islam. Oleh karena tidak puas dengan penjelasan La Mangkatye, yang bukan muslim, maka akhirnya ia berketetapan untuk mengundang mubaligh yang tersohor pada masa itu yaitu Dato Ri Bandang seorang Minangkabau dari Kota Tengah. Dato Ri Bandang yang juga bernama Khatib Tunggal Abdul Makmur datang bersama dengan Khatib Sulaiman yang kemudian dikenal dengan Dato Patimang dan Khatib Bungsu yang bernama Dato Di Tiro; maka mulailah Islamisasi dilakukan di kerajaan Tallo.

Setelah proses penyiaran agama Islam berlangsung beberapa waktu lamanya, ketika mubaligh itu berminat memindahkan pusat aktivitasnya ke Luwu, yakni kerajaan terbesar di Sulawesi pada masa itu, Akhirnya Raja Luwu, La Patiware Daeng Parabung masuk Islam pada tahun 1603, bergelar sebagai Sultan Muhammad. Oleh karena raja Luwu merasa tidak mampu mendukung penyiaran Islam di seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, maka ketika mubaligh itu berpisah membagi tugas masing-masing, Dato Ri Bandang kembali ke Gowa dan Tallo, Dato Di Tiro ke Bulukumba dan Datu Sulaeman tetap di Luwu. Demikian akhirnya Mangkubumi Gowa masuk Islam pada tahun 1605 dengan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam yang kemudian diikuti oleh Raja Gowa I Mangerangi Daerang Manrabia yang bergelar Sultan Alaudin³⁰.

Setelah Gowa Tallo beragama Islam maka aktivitas islamisasi sepenuhnya didukung oleh agama. Seruan Raja Gowa agar kerajaan-kerajaan tetangganya masuk Islam diterima dengan baik oleh Raja Sawitto

dan juga oleh Siang, Tanete dan Suppa yang sebelumnya telah menganut agama Kristen. Namun seruan Raja Gowa ditolak oleh raja-raja yang tergabung dalam persekutuan Tellumpocoe yaitu Bone, Wajo dan Soppeng. Penolakan ini memberi peluang bagi raja Gowa untuk melanjutkan kebijakan ekspansinya dalam rangka mewujudkan kesatuan politik di Sulawesi yang telah dimulai oleh Tumaparisi Kalonna pada awal abad ke-16. Penaklukan atas kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dilakukan untuk menyebarluaskan agama Islam. Dalam proses ini, orang-orang Melayu selain terlibat upaya pembangunan kerajaan, juga terlibat dalam berbagai operasi militer. Akhirnya lawan-lawan Gowa dapat terkalahkan; Sidenreng dan Soppeng pada tahun 1609, Wajo pada tahun 1610 dan Bone pada tahun 1611. Keberhasilan Gowa itu banyak didukung oleh kenyataan bahwa sebagian dari rakyat kerajaan-kerajaan lawannya telah masuk Islam, sehingga tidak memberi dukungan kepada rajanya dalam berbagai pertempuran. Orang-orang Islam itu yang biasanya adalah para pedagang memiliki loyalitas kepada orang-orang Islam lainnya daripada kepada rajanya.

Daya tarik Islam dibandingkan dengan kepercayaan tradisional adalah karena keunggulannya dalam konsep menyangkut nilai-nilai sosial yang lebih manusiawi dan demokratis serta rasional. Islam menempatkan individu pada kedudukan dengan martabat yang sama. Raja menempati posisi yang sederajat terhadap rakyatnya. Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya yang memandang raja sebagai keturunan dewa yang bersemayam di dunia atas dan dunia bawah. Oleh karena itu raja cenderung untuk berkuasa secara absolut. Kehadiran Islam telah memperbaiki kondisi sosial pada masa itu. Sultan Alaudin, misalnya pada tahun 1631 melarang bunga uang dalam utang piutang. Kebijakan ini untuk mencegah terjadinya perbudakan yang terus meningkat akibat terbelit oleh utang.

Akan tetapi rupanya pada masa itu belum terjadi perubahan-perubahan sosial secara mendasar menurut ajaran-ajaran Islam. La Madaremeng, Raja Bone, mengambil tindakan yang lebih tegas daripada yang dilakukan Sultan Alaudin. Ia menetapkan bahwa semua hamba sahaya (budak) di negerinya dihapuskan, kecuali budak turun temurun, dan mereka pun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan bangsawan Bone, termasuk

Ibu Raja sendiri yaitu We Tenri Selorang Datu Pattiro. Banyak bangsawan Bone pindah ke Gowa dan mengadukan keputusan itu kepada raja Gowa. Akhir dari keputusan ini adalah Gowa, Sidenreng, dan Wajo menyerbu Bone. Laskar Bone dikalahkan, La Madaremeng ditangkap di Larompong, wilayah Luwu. Raja Gowa Sultan Malikussaid mengangkat Karaeng Sumana (Pamannya sendiri) sebagai pelaksana pemerintahan Gowa di Bone dengan gelar Jannang. Dengan demikian dapat diperkiraan bahwa Agama Islam mengalami sinkretisme dengan kepercayaan tradisional.

Di Mandar, Agama Islam diterima pada tahun 1610, pada pemerintahan Raja Balanipa yaitu Daetta, yang sesudah itu bersekutu dengan Gowa menganeksasi Bone. Islam disiarkan oleh Abdurachiem Kamaludin yang kawin dengan putri bangsawan Maradia Lembang. Di antara para bangsawan Mandar yang pertama berhasil diislamkan adalah Maradia Pallis Kunang, setelah itu menyusul Arajang Balanipa Daeta. Abdurachiem mengorganisasi para mubaligh yakni para muridnya sendiri dalam sebuah wadah yang dinamai dengan mukim.

Mubaligh lain yang berperan penting bagi penyiaran Islam di Mandar adalah Raden Mas Suyro Adilogo dari Jawa yang datang bersama Syeikh Zakaria Al-Magribi, pada tahun 1625. Kedua mubaligh ini juga melakukan islamisasi melalui jalan perkawinan. Suryo Adilogo mengawini I Lissi Puang, sedangkan Syeikh Zakaria Al-Magribi kawin dengan Puanna I Boddi, puteri Tumatindo³². Pengislaman lewat istana, yakni dari kalangan para bangsawan lebih efektif bila dibandingkan lewat kalangan kelas bawah. Rakyat banyak akan cenderung mengikuti pemimpinnya. Oleh karena itu Islamisasi pada kalangan bangsawan, lebih-lebih raja, akan diikuti rakyatnya yang biasanya secara sukarela masuk Islam.

Islamisasi di Sulawesi Utara dilakukan oleh seorang mubaligh, Sarib Mansyur, seorang bangsawan dari Mangindanao di Pilipina Selatan. Sarib Mansyur pada pertengahan abad ke-16 menjadi Raja Kendahe, menggantikan penguasa sebelumnya yakni Wagama yang bergelar Kulano, gelar ini juga digunakan oleh mubaligh itu. Sarib Mansyur selain mengislamkan rakyat Kendahe juga mengislamkan rakyat Tawalide dan Sangir Talaud.

Di Bolaang Mangondow islamisasi telah terjadi pada tahun 1660, pada masa kekuasaan Raja Binangkang. Pusat aktivitas Islam terdapat di

Bolaang dan Kotabangun. Hal ini berarti kehadiran Islam mendahului agama Kristen Katholik yang dibawa oleh para pendeta Portugis. Meskipun demikian sampai raja-raja Bolaang Mangondow belum masuk agama Islam ketika Andi Lantai, seorang bangsawan dari Wajo, Sulawesi Selatan mendarat di Kali Sumoit (Kali Bantik) pada tahun 1810, dengan perahu Padewakang. Andi Lantai bersama dengan seluruh anak buahnya telah terlibat dalam pertempuran melawan bajak laut dari Loloda dan Mangindanao, di perairan dekat Pulau Molosing. Bajak-bajak laut itu sering merampok di wilayah Bolaang Mangondow. Andi Lantai pada mulanya hanya minta izin sementara sambil menunggu perbaikan kapalnya yang rusak akibat pertempuran. Akan tetapi akhirnya menetap, karena menjadi menantu raja Bolaang Mangondow, yakni Cornelis Manoppo yang beragama Kristen. Keturunan Andi Lantai dengan Henimombang, putri Cornelis Manoppo, yaitu Andi Panengkelen yang dibesarkan di Wajo. Setelah dewasa ia diangkat menjadi Raja Bolaang Mangondow dengan gelar Raja Abraham Segeha. Setelah itu Agama Islam berkembang meluas di Bolaang Mangondow dan sekitarnya³³.

Perkembangan Agama Islam di Sulawesi Selatan selama abad ke 18 didominasi oleh ajaran-ajaran Syekh Yusuf, bangsawan Gowa yang pernah menjadi mufti besar di Kerajaan Banten, Syekh Yusuf sendiri meninggalkan Gowa pada tahun 1644, pada usia 18 tahun, dengan restu Sultan Gowa, Malikus Said. Dalam perantauannya Syekh Yusuf pernah menjadi murid Syekh Nuruddin Ar-Raniri, penganut tarekat Qadiriyyah, di Banten. Di Yaman ia mempelajari tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abi Abdullah Muhammad Baqi bin Syekh Al-Kadir Mazjaji al-Yamani Zaidi al-Naqsabani. Selain itu juga mempelajari tarekat al-Baalawiyah pada Syekh Maulana Saed Ali di Madinah. Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, ia mempelajari tarekat Khalwatiyah dari Syekh Abu al Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Khalwati al-Quraisyi. Karena prestasinya sangat baik maka dia diberi gelar oleh gurunya sebagai Tajul Khalwati Hidayatullah. Syekh Yusuf tinggal di Timur Tengah selama 15 tahun, memperdalam agama Islam. Di dalam risalahnya Syekh Yusuf menyatakan telah mempelajari sejummlah tarekat selain dari yang telah diketemukan di atas juga tarekat Dasuqiaya, Syaziliyah, Hasytiah, Rifaiyah dan lain-lain. Ia menguasai 16 tarekat³⁴.

Ketika Syekh Yusuf kembali dari perantauan (1644-1672), kerajaan Gowa telah mengalami kehancuran, maka ia menetap di Banten. Ia diangkat sebagai mufti besar kerajaan Banten. Dari Banten ia menyiarkan agama Islam lewat para muridnya ke Sulawesi Selatan.

Syekh Yusuf menugaskan Abdul Fathi Abdul Bashir al-Dhahair, kelahiran Rappang untuk mengajarkan tarekat Khalwatiyah. Abdul Bhasir yang disebut Shetta di Gowa digelari juga sebagai khalifa pertama” (pemimpin tertinggi d bidang agama) di Sulawesi Selatan.

Tarekat Naqsabandiyah baru dikembangkan di Sulawesi Selatan setelah Syekh Yusuf dibuang ke Ceylon (tahun 1683). Berbagai bukti naskah-naskah dari tarekat ini terdapat di Galesong Utara, dan selatan juga di Sanrobone. Beberapa diantaranya ditulis dalam huruf Serang (Banten) dengan diberi penjelasan dalam bahasa Makassar. Tarekat ini merupakan berkembang luas di kalangan orang-orang Makassar, yang putus asa, frustasi dan menderita akibat penjajahan Belanda, setelah kekalahan mereka dalam melawan kekuatan gabungan VOC dan Bugis (Bone dan Toangke) pada tahun 1669. Dalam tarekat Naqsabandiyah mereka dapat menyalurkan segala penderitaan jiwa dan mengalihkannya pada penghayatan spiritual pada zikir gqalbi dari Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini mampu membakar semangat para penganutnya dan sesekali muncul dalam bentuk perlawanan, pengacauan dan gerakan protes sosial di Tanah Makassar pada umumnya. Dengan tarekat ini mereka meniru kehidupan Rasul (Nabi Muhammad) dan para sahabatnya, berserah diri kepada Allah, berzikir, hidup bersahaja, untuk itu mereka menjauhi keramaian dan kesibukan duniawi.

Namun karena sifat tarekat ini yang menutup diri dari pergaulan dunia luar yang terus menerus sampai puluhan bahkan ratusan tahun lamanya, maka terjadilah sinkritisme dengan kepercayaan-kepercayaan setempat. Oleh karena itu di Antang dan Tetebaru yakni kampung-kampung di sekitar Gowa terdapat para pemuja Syekh Yusuf yang kolot.

Dalam keyakinan agama mereka terdapat kepercayaan unsur-unsur penghormatan pada Gunung Bawakaraeng, yaitu kepercayaan asli sebelum kedatangan agama Islam di Sulawesi Selatan.

Penyiaran tarekat Khalwatiyah terjadi lebih luas ketika Raja Bone, La Temmasongek menjadi Raja Bone. Ia mengawini cucu Syekh Yusuf.

Oleh karena itu diangkat menjadi pimpinan tarekat Khalwatiyah. Jaringan keluarga dan kekuasaan mereka sangat luas. La Temmasongek adalah putera La Patauk Matana Tikka Nyilik na Walinonoe yang selain sebagai Raja Bone juga menjadi Datu Soppeng dan Ranreng Wajo. Ibu La Temmesongek adalah Puteri Setiaraja. Oleh karena itu pengikut tarekat Khalwatiyah dapat ditemukan di Bone, Wajo, Luwu dan Soppeng. Tarekat ini berkembang tidak hanya di kalangan keluarga kerajaan-kerajaan Bugis tetapi juga pada kalangan para pedagang Bugis. Berbeda dengan orang-orang Makassar pendukung tarekat Naqsabandiyah adalah para petani yang tidak memiliki kekuasaan politik karena berada di bawah kekuasaan Belanda, maka para pengikut tarekat Khalwatiyah berkembang di kerajaan-kerajaan Bugis yang pada masa itu masih berdaulat, bebas dari penjajahan Belanda.

4.3 Misi dan Zending

Agama Kristen, di beberapa tempat di Sulawesi, telah diterima penduduk, pada pertengahan abad ke-16. Hal ini mendahului penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Kristen itu dilakukan oleh para misionaris Portugis. Pada mulanya oleh para imam dari ordo Fransiskan kemudian oleh ordo Yesuit. Di Sulawesi Utara Kristenisasi juga dipengaruhi oleh Spanyol yang berkedudukan di Filipina.

Orang-orang Portugis dan Spanyol itu menyiarkan agama katolik Roma, yang bersifat hirarkis. Maksudnya, wewenang dan kekuasaan penyiaran agama dikoordinasi Paus yang membawahi para uskup yang memimpin sejumlah imam. Orang awam tidak memiliki kebebasan menyatakan pendapat dalam gereja. Para pemimpin agama itu pada mulanya dididik dalam biara yang memisahkan dirinya dari kehidupan keluarga dan meninggalkan berbagai aktivitas komersial. Kehidupan mereka secara ekonomis banyak disokong oleh negara yang berada di bawah pengaruh gereja. negara berkewajiban melindungi gereja dan mendukung penyiaran agama³⁸.

Kedatangan Portugis ke Indonesia diawali dengan perang suci (salib) melawan kekhalifan Kordova di semenanjung Iberia yang terletak di Eropa Barat Daya, yaitu kekhalifan muslim bangsa Arab dan Berber. Perang ini, meski tidak terjadi secara terus menerus, berlangsung hampir selama satu setengah abad, akhirnya meluas menjadi perang melawan

kekhalifaan Turki yang pada masa itu memperluas wilayahnya di Timur Tengah termasuk pantai utara Afrika. Selain itu juga tidak dapat diingkari bahwa pelayaran Portugis ke Indonesia adalah dalam rangka mencari kekayaan dengan cara memonopoli perdagangan di Asia dan Eropa.

Demikianlah pada tahun 1498 kapal-kapal Portugis dipimpin oleh Vasco da Gama melewati Semenanjung Harapan, ujung selatan Benua Afrika dan selanjutnya mencapai India. Pada bagian lain Spanyol menuju Asia dengan melalui Samudera Atlantik. Columbus dengan berbendera Spanyol pada tahun 1492 telah menemukan benua Amerika. Perlombaan dan persaingan mencari kekayaan antara Spanyol dan Portugal terjadi, yang sesungguhnya telah diperkirakan oleh Paus. Oleh karena itu Paus pada tahun 1494 membagi dunia atas dua bagian, Amerika menjadi wilayah Spanyol dan Asia menjadi milik Portugis.

Pelayaran-pelayaran Portugis, seperti telah dikemukakan selain untuk berdagang juga untuk memerangi pedagang-pedagang muslim di Asia. Pada tahun 1511 mereka menaklukkan dan menguasai Malaka, Maluku dan Macao (Cina) bahkan Jepang. Kristenisasi dilakukan oleh para misionaris yang penuh semangat di kota-kota pusat perdagangan itu.

Pada tahun 1522 Portugis menduduki Ambon dan selanjutnya mendirikan benteng di Ternate. Pada waktu yang bersamaan Spanyol tiba di Maluku dari arah utara dan mendirikan benteng di Tidore. Perselisihan terjadi menyangkut batas-batas wilayah mereka. Perselisihan berkembang menjadi peperangan. Pada tahun 1529 Portugis dengan bantuan Sultan Ternate berhasil mengusir Spanyol yang didukung oleh Sultan Tidore dari Maluku. Oleh karena itu Kristenisasi di Indonesia Timur dilakukan oleh para misionaris Portugis, sedangkan para misionaris Spanyol menyiarkan agama Kristen di Filipina. Persaingan politik antara Spanyol dan Portugis tidak menguntungkan perkembangan dan keberadaan umat Kristen karena negara terlibat langsung dalam penyiaran agama. Kristenisasi diperlakukan sebagai bagian dari upaya penguasaan wilayah. Hal ini baru berakhir pada tahun 1540-an, ketika berkembang gerakan kontra reformasi dalam tubuh gereja Katolik Roma. Gerakan ini muncul sebagai reaksi dari gerakan reformasi terhadap kekuasaan gereja Katolik Roma. Akan tetapi gerakan ini juga sikap dan pandangan pada masa itu, yang menempatkan gereja sebagai bagian dari negara³⁹. Mereka justru sebaliknya menegaskan bahwa gereja bukan sebagai suatu lembaga

negara dan gereja mempunyai metode dan tujuan sendiri. Para misionaris kontra reformasi tidak mengikatkan diri baik kepada Portugal maupun Spanyol, melainkan hanya kepada Gereja. Gerakan ini memisahkan politik dari kehidupan agama. Hasilnya negara (Portugal dan Spanyol) berkewajiban melindungi seluruh umat Kristen. tanpa mengkaitkannya dengan kepentingan-kepentingan politik.

Pada tahun 1543 Antoni de Payva bersama dengan 12 orang temannya tiba di Pelabuhan Pare-pare. Mereka mengkristenkan Raja Suppa, La Makarawi-e bersama keluarganya. Raja dibaptis dengan nama Don Luis. Selanjutnya mereka membaptis Raja Siang di Pangkajene dengan nama Don Yuan. Pada masa itu telah didirikan sebuah gereja di Pangkajene yaitu Gereja Santo Rafael. Upaya Kristenisasi di Sulawesi Selatan berakhir dengan kegagalan, karena seorang perwira Portugis yakni Juan de Eredia melarikan Dona Elena Vesiva, putri Raja Supa naik ke kapal. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, menyerbu orang-orang Portugis dengan pedang terhunus. Orang-orang Portugis melarikan diri ke atas kapal dan segera berlayar menuju Malaka⁴⁰.

Kristenisasi Sulawesi Utara terkait erat dengan persaingan dalam perluasan wilayah antara Portugis dan Kesultanan Ternate. Pada tahun 1563, Sultan Hairun bermaksud menguasai Sulawesi Utara. Hal ini mendorong Portugis untuk mendahului rencana itu, maka dikirimkanlah pasukan dengan dua kapal kora-kora, yang membawa Peter Magel Haes ke Menado, yakni sebuah pulau kecil di depan pantai Minahasa. Raja Menado dan rakyatnya berjumlah sekitar 1500 orang dibaptiskan. Raja Pulau Siau yang kebetulan berada di Menado juga dibabtis. Dua minggu berikutnya Pater Magelahaes berlayar ke Kaidipan di Pantai Utara Gorontalo. Ia membaptis 2000 orang. Lima hari berikutnya seorang misionaris lainnya membaptis raja pulau Sangir dan rakyatnya. Pater Magelhaes tinggal di Kaidipan selama 8 hari mengajar agama kristen kepada penduduk. Setelah itu memilih Menado sebagai pusat aktivitas misionaris. Permintaan raja Banggai di Sulawesi Tengah, raja Gorontalo, raja Bolaang Mangondow dan penduduk Minahasa untuk dibaptis ditolak, karena Pater Magelhaes merasa tidak mampu membina dan mengajar serta memimpin umat yang tersebar di wilayah yang sangat luas.

Aktivitas misionaris di Sulawesi Utara akhirnya terhenti ketika terjadi perang antara Portugis dan Ternate, yang berawal dari pembunuhan

Sultan Hairun. Pangeran Babullah, putra Sultan Hairun menuntut balas. Benteng Portugis di Ternate direbut pada akhir tahun 1577. Para misionaris Portugis diusir dari Maluku dan Sulawesi Utara. Oleh karena itu ketika Spanyol dan Portugal dipersatukan oleh Raja Felipe II, Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina memperluas wilayah kekuasaannya ke selatan, yakni di bekas jajahan Portugis. Namun seorang misionaris Spanyol yang mengunjungi Menado, Siau, Sangir dan Kaidipan pada tahun 1585 menyatakan bahwa penganut agama Kristen telah lenyap, diserbu angkatan laut Ternate, bahkan orang-orang Kristen Sangir membantu Ternate menyerang Siau.

Para misionaris Kristen mengaktifkan kembali penyiaran Injil di Menado dan Siau, setelah Spanyol menguasai Maluku Utara pada tahun 1606. Namun usaha Kristenisasi atas daerah Tomohon dan Tondano pada tahun 1619 gagal, bahkan penduduk menjadi berang. Persoalannya adalah pada waktu itu terjadi kegagalan panen, penduduk Tomohon dan Tondano berpendapat bahwa para dewa telah marah karena kehadiran dan aktifitas misionaris. Salah satu faktor penting yang menghambat perkembangan agama Kristen Katholik pada masa itu adalah, agama Islam mulai berkembang, terutama dibawa oleh orang-orang Ternate.

Pada tahun 1644 Spanyol terdesak dari Maluku oleh kekuatan gabungan Ternate dan VOC. Pasukan Spanyol di Sulawesi Utara ditarik ke Filipina. Orang-orang Katholik di Menado dipaksa masuk agama Kristen Protestan oleh VOC. Hal serupa terulang kembali tahun 1677, pasukan-pasukan kompeni dan Ternate menduduki Sangir dan Siau di Timur Laut Sulawesi Utara. Para misionaris dibunuh, Raja Siau dan seluruh rakyatnya terpaksa mengakui agama Kristen Protestan sebagai pegangan hidupnya⁴¹.

Orang-orang Belanda adalah penganut agama Kristen Protestan Calvinis. Mereka memiliki organisasi gereja, ibadah dan ajaran yang berbeda dengan yang terdapat pada agama Kristen Katholik. Mereka menolak otoritas kekuasaan gereja di bawah pimpinan Paus. Negara dan gereja bagi mereka memiliki kedudukan yang sederajat dalam memajukan kehidupan agama. Perbedaan ini telah menimbulkan perselisihan dengan gereja Katolik Roma, lebih dari itu pertentangan antar Spanyol dan VOC di Indonesia merupakan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan Belanda. Akan tetapi VOC adalah sebuah perkumpulan pada pedagang

yang bertujuan memegang monopoli dan melakukan eksploitasi ekonomi di Indonesia. VOC menempatkan penduduk Indonesia sebagai bangsa yang terjajah, maka tidak diperlakukan sederajat dengan bangsa Belanda. Pihak VOC tidak berupaya untuk mendidik pelayan-pelayan gereja, kecuali mendatangkannya dari negeri Belanda. Dengan demikian maka umat Kristen dan aktivitas para Zendeling praktis tidak berkembang pada masa VOC. Di beberapa tempat, terjadi sinkritisme dengan kepercayaan tradisional masyarakat setempat⁴².

Ketika VOC mengalami kebangkrutan, selanjutnya seluruh kekuasaan diserahkan kepada pemerintah Belanda, agama dan umat Kristen mendapat perhatian. Raja Belanda William I menata kembali organisasi gereja. Sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu yang ditandai dengan semangat pencerahan, yang menaruh penghargaan yang tinggi atas kebebasan berpikir dan menyatakan berlakunya kebebasan beragama, maksudnya urusan agama tidak dikaitkan dengan kebijakan politik. Realisasinya adalah penduduk bumiputera dalam hal beragama Kristen mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan orang Barat pada umumnya. Sedangkan kepada penduduk bumiputera yang beragama Islam, pemerintah cenderung bersikap toleran. Namun pada masa berikutnya karena orang-orang Islam cenderung memusuhi orang-orang Belanda, maka pemerintah lebih menyukai penduduk bumiputera beragama Kristen. Kebijakan Kristenisasi seringkali karena pertimbangan untuk menciptakan stabilitas keamanan dengan tujuan mencegah masuk Islam.

Perlu dikemukakan bahwa perkembangan sikap orang-orang Kristen Protestan itu, selain karena pencerahan, juga didorong oleh gerakan Pietisme di Eropa terutama di Inggris. Pietisme memprihatinkan dan menyangsikan kemampuan akal budi dan ilmu pengetahuan Abad Pencerahan. Oleh karena itu para zendeling (misionaris Agama Kristen Protestan) gerakan Pietisme berupaya menanamkan kesadaran dan keimanan serta menyiarkan agama seluas mungkin.

Dengan diilhami oleh Revolusi Perancis (tahun 1789) mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan pekabaran Injil swasta di luar perkumpulan resmi gereja.

Josep Kam dan Gottlob Bruckner merupakan dua dari tiga orang pendukung gerakan Pietisme yang pada tahun 1814 tiba di Indonesia.

Mereka adalah anggota *Nederlandsh Zendeling Genootschap* (NZG) yang didirikan pada tahun 1797. Mereka datang atas perintah *London Missionary Society* atau yang lazim disingkat LMS. NSG bertujuan menghilangkan intoleransi yang telah menyebabkan perang-perang agama. Ia mengikuti jejak London Missionary Society, yang didirikan para pendeta dari empat lembaga gereja, yang memiliki tradisi untuk merangkul berbagai aliran keagamaan Kristiani. Joseph Kam membangkitkan kembali semangat Kristiani yang hampir padam di Maluku. Ia berhasil dan menetap di Ambon, oleh karena itu digelar sebagai Rasul Maluku.⁴³

Pada tahun 1817 Kam datang di Minahasa, melakukan pembinaan pelayanan keagamaan bagi umat Kristen Protestan. Ia mengusahakan seorang Guru dari Ambon. Selanjutnya pada tahun 1822 ia meminta NZG mengirimkan utusan-utusan penyiar Injil ke Minahasa. Akhirnya atas usahanya pemerintah Belanda mengirimkan Melledoorn yang menjabat pendeta pada tahun 1827 sampai tahun 1839. Penduduk Tondano yang selalu memberontak melawan pemerintah Kolonial Belanda dapat dikristenkan, bahkan pada tahun 1826 di Tondano telah didirikan sebuah sekolah. Joseph kam dan kawan-kawannya telah meninggalkan pendekatan penyiaran agama seperti yang sering para misionaris Portugis yakni pembaptisan secara masaal. Para zendeling mengutamakan penyampaian ayat-ayat Injil Pembaptisan baru dilakukan setelah seseorang memiliki keimanan kepada Kristus.

Aktivitas zending itu banyak ditentukan oleh dukungan dan campur tangan pemerintah. Berdasarkan keputusan Raja Belanda tanggal 5 September 1815 lembaga gereja ditempatkan di bawah kementerian perdagangan koloni (Departemen van Koophandel en Kolonial) yang menunjuk suatu komisi yang disebut dengan nama Maagsche Commissie sebagai badan penasehat bagi pemerintah yakni Menteri Jajahan dan berkewajiban menguji dan melantik calon-calon pendeta yang diangkat raja dan dipekerjakan pada lembaga gereja. Pada tahun 1935 komisi ini dijadikan badan perwakilan GPI di Negeri Belanda. Seluruh pengurus gereja, pada tahun 1820, dipersatukan di negeri jajahan, dipersatukan dalam *Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost-en West-India* (Gereja Protestan di Hindia Barat dan Timur) yang lazim dikenal dengan lembaga Batavia yang tugasnya dilimpahkan kepada pengurus gereja. Para pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Selanjutnya

pemerintah mempersatukan seluruh golongan umat Protestan pada tahun 1835 dengan mendirikan *De Protestantcshe Kerk in Nederlandsch-Indie* (Gereja Protestan di Hindia Belanda) yang juga disebut dengan nama Gereja Protestan di Hindia Belanda atau GPI. Seluruh aktivitas gereja secara finansial dan administratif tergantung kepada pemerintah. Tugas gereja meliputi upaya memelihara kepentingan agama Kristen, menambah pengetahuan religius dan menyuburkan cinta kasih kepada pemerintah dan tanah air. Secara administratif para pendeta diangkat dan diberi tugas oleh Gubernur Jenderal.⁴⁴

Ketergantungan gereja dan campur tangan pemerintah itu bertentangan dengan jiwa Revolusi Perancis dan Pencerahan, juga tidak searah dengan semangat Pietisme. Berbagai kritik timbul sehubungan dengan kebijakan pemerintah ini. Mereka menuduh pemerintah telah menghidupkan kembali sistem hubungan gereja dan pemerintah seperti yang berlaku pada zaman VOC. Mereka menuntut otonomi yang luas bagi gereja, tetapi tuntutan ini baru dapat direalisasi pada tahun 1935 di bidang administrasi.

Keterlambatan proses otonomisasi gereja itu rupanya juga dipengaruhi oleh kenyataan orang-orang Belanda sebagai penjajah memandang dirinya sebagai bangsa superioritas. Kekristenan tidak dikaitkan dengan ketidakadilan di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Tidak ada suatu kenabian dari kalangan gereja tentang kesewenang-wenangan kolonialisme. Gagasan tentang penghapusan perbudakan, misalnya, tidak berasal dari kalangan gereja, melainkan dari pemerintah Inggris ketika berkuasa di Indonesia antara tahun 1811-1816. *Utrechtsche Zendings Vereeniging* (UZV) berpendirian bahwa negeri jajahan merupakan anugerah Allah untuk dieksploitasi kekayaannya, untuk itu maka wajar bila penduduk bumiputera menerima imbalan barang-barang rohani berupa firman Allah dari orang-orang Kristen (Belanda). Dengan demikian maka negeri jajahan semata-mata hanya suatu objek yang nasibnya ditentukan oleh subyek yaitu Bangsa Barat⁴⁵.

Tujuan eksploitasi negeri jajahan untuk mewujudkan kemakmuran negeri induk dan upaya mempertahankan diri sebagai bangsa superior telah mendorong penghematan dana bagi pelayanan gereja kepada umatnya. Hal ini telah merupakan sebab bagi timbulnya lembaga-lembaga gereja baru, selain dari yang didirikan pemerintah. Lembaga ini adalah

Het Java-Comite yang didirikan pada tanggal 19 October 1854. Lembaga ini dibentuk untuk mengusahakan dana bagi para zendeling yang akan diberangkatkan ke Sangir-Talaud, Irian Barat dan ke daerah Batak Toba. Lembaga lainnya adalah *Het Sangir en Talaud Comitte* (STC) yang didirikan pada tahun 1855. Tugasnya adalah mengusahakan bantuan dana dan pekerja yang melayani aktivitas gereja.⁴⁶

Perlu dikemukakan bahwa penganut agama Kristen di Sulawesi Utara pada abad ke-18 telah berkembang dengan pesat,. Pada tahun 1705 penganut agama Kristen terdapat di Menado, Bolaang Itam, Kaidipan, Buol, Attingola, Siau, Sangir Talaud dan Minahasa. Di Menado jumlah pengikutnya mencapai 500 orang, sedangkan di Siau mencapai 3300 orang. Jumlah tertinggi terdapat di Minahasa dan Sangir Talaud yakni 12.396 orang (pada tahun 1771). Pada abad ke-19 mereka praktis terlantar, karena tidak mendapat bimbingan dan asuhan para pendeta yang digaji oleh pemerintah. Mereka tidak digabungkan ke dalam jemaat GPI. Hal ini mengundang keprihatinan sekelompok Kristiani di negeri Belanda. Mereka mendirikan perkumpulan “zendeling tukang” yang beranggotakan orang-orang yang bersemangat tinggi untuk menyampaikan ayat-ayat Injil, tetapi kurang memiliki keahlian dan keterampilan. Mereka datang ke Sangir Talaud, tanpa dukungan dana untuk transportasi dan tidak digaji oleh pemerintah. STC pada waktu itu mengupayakan dana itu dengan menjalin kerjasama dengan *De Nederlandsche Zending Vereeniging* (NZV atau Perhimpunan Zending Belanda), *Jawa Comite dan Utrechtsche Zending Vereniging* (UZV). Para calon zendeling yang akan dikirim ke Sangir-Talaud dididik oleh NZV dan UZV. Kegiatan komite ini mengalami pasang surut, sebab bukan sebuah lembaga zending seperti yang lainnya. Ia tidak memikul tanggung jawab keuangan dan pekerjaan para zendeling, meskipun mengusahakan pencarian calon-calon zendeling kemudian mengupayakan dana untuk transportasi dari Negeri Belanda ke Batavia. Beberapa tahun setelah STC didirikan, tanggung jawab itu akhirnya dilimpahkan kepada Lembaga Batavia⁴⁷.

Sejak pertengahan abad ke-19 jumlah umat Kristen berkembang dengan pesat di Sulawesi Utara. Pada tahun 1850 terdapat 70% dari jumlah penduduk Tondano telah dibaptis. Di Minahasa pada tahun 1880 terdapat 80.000 orang Kristen sisanya 17.000 masih memiliki kepercayaan tradisional. Perkembangan ini terus meningkat pada awal abad ke-20.

Sekolah-sekolah banyak didirikan di Minahasa, karena permintaan penduduk setempat, yang menanggung biaya pembangunan gedung dan menyediakan alat-alat pengajaran. gaji guru dibayar NZG. Agama Kristen diajarkan oleh para pendeta Belanda yang secara berangsur-angsur mendapat dukungan dana berupa sumbangan para jemaat yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Sekolah di Minahasa telah terdapat pada tahun 1835. Sepuluh tahun kemudian jumlah berkembang menjadi 55 sekolah zending dan 11 sekolah pemerintah. Pada tahun 1848 jumlah sekolah menjadi 88 dengan muridnya berjumlah 5000 orang. Sedangkan sekolah guru zending telah didirikan pada tahun 1852 di Sonder yang 4 tahun berikutnya dipindah ke Tanah Wangko. Sekolah ini didirikan oleh Pendeta N. Greatland. Di Tomohon juga terdapat sekolah agama yang didirikan pada tahun 1878. Di sini dididik calon-calon pembantu pendeta. Jumlah sekolah di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus meningkat⁴⁸. Perkembangan ini telah mengantarkan pada kenyataan bahwa banyak guru jemaat Kristen pada tahun 1926 dikirim ke Donggala, Gorontalo dan Sulawesi Barat Daya, bahkan ke luar Sulawesi, seperti di kepulauan Kai, Aru dan Tanimbar, ke Pulau Timor, Irian Barat dan Kalimantan Barat.

Bila di bagian utara Sulawesi agama Kristen berkembang dengan pesat, maka di Sulawesi Selatan tidak dapat dikembangkan di kalangan penduduk pribumi. Upaya penyiaran telah dimulai pada tahun 1884 di Makassar (Ujung Pandang) tetapi sampai tahun 1906 tidak berhasil menarik perhatian penduduk asli. Umat Kristen di sini terdiri dari para pendatang yang tinggal di dalam kota, di sekitar benteng Roterdam. Oleh karena pada masa itu lazim dikenal sebagai jemaat benteng⁴⁹.

Gerakan zending ditingkatkan sesudah ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan Bone dan lainnya pada tahun 1905. Sasaran zending adalah suku-suku yang belum memeluk agama Islam. Perkumpulan pekabaran Injil di Makasar dipimpin Ds. R.W.F. Kyftenbelt dengan dukungan NZG, mendirikan pos-pos guru agama di pedalaman Sulawesi seperti di Mamasa, Rantepao, Makale dan Kolonedae. Upaya ini didukung oleh Gubernur Sulawesi yang tidak menghendaki suku-suku Mori, Toraja, Bare dan lain-lain masuk Islam, karena orang-orang Islam cenderung menentang kekuasaan pemerintah Belanda. Pada tahun 1914 atas usul GPI, pemerintah membuka resort pembantu penyiaran Injil di Sulawesi Timur yang berkedudukan di Luwuk dan Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamasa.

Pada tahun 1909 penduduk Poso di Sulawesi Tengah menerima agama Kristen. Kepala suku Papa i Wunte dibaptis oleh pendeta A.C. Kruyt. Meskipun demikian kepercayaan tradisional di kalangan masyarakat Poso yang telah masuk Kristen tetap ada. Sebab Kruyt tidak secara langsung menentang dan memberantas kepercayaan tradisional, melainkan menyampaikan Injil yang dapat dimengerti masyarakatnya.

Sampai masa Perang Dunia I Sulawesi Tenggara belum digarap secara efektif oleh para zendeling. Sesungguhnya wilayah ini telah diputuskan dalam konferensi para zendeling di Poso pada tahun 1913 sebagai sasaran utama mereka. Akan tetapi akhirnya ditunda.

Aktivitas misionaris gereja Katolik Roma sejak kekalahan Portugis atas VOC sampai akhir abad ke-19, relatif mengalami kemunduran. Hal ini terutama karena pada umumnya orang Belanda beragama Kristen Protestan. Pernyataan pemerintah kolonial Belanda tentang kebebasan beragama di negeri jajahan tidak diikuti dengan peningkatan aktivitas gereja Katolik. Salah satu faktor yang terpenting adalah jumlah misionaris Belanda sangat terbatas, selain kekuatiran pemerintah menyangkut stabilitas keamanan mereka.

Semangat misionaris baru dibangun kembali pada tahun 1900 ketika pemerintah menyatakan berlakunya Politik Etis. Daerah jajahan selanjutnya benar-benar digarap oleh para misionaris Yesuit. Sejak tahun 1902 daerah kegerejaan Katholik dipilah-pilah menjadi vikariat apostolik atau prefektur apostolik yang dipimpin langsung oleh Paus yang berkedudukan di Roma. Kondisi ini dipandang mempersulit pemerintah dalam melaksanakan pengasawan politik atas para misionaris dan jemaatnya. Oleh karena itu berdasar tekanan dari pihak pemerintah, pada tahun 1913, dibentuk Biro Pusat Misi yang memimpin seluruh gerakan misionaris di Indoensia dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Demikianlah, pada tahun 1938 di Menado telah terbentuk vikariat apostolik yang diselenggarakan oleh para misionaris dari ordo Hati Kudus, sedangkan di Makassar telah dibentuk prefektur apostolik yang didirikan oleh ordo Hati Tak Ternoda Santa Maria⁵⁰.

CATATAN

1. Mattulada mengemukakan pendapatnya, dengan berdasarkan pada sumber-sumber sejarah tradisional, bahwa pada abad ke-16 terdapat pola-pola umum dalam kehidupan ekonomis, masing-masing adalah pola kelautan pada Kerajaan Gowa, pola perniagaan di Wajo dan pola pertanian terdapat di Bone.
2. I. Adam, *Pemerintahan di Minahasa* (terjemahan), (Jakarta : Bharata, 1975), p.p. 14, 23 dan 27.
3. A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), p. 71.
4. R.A. Kern, *I La Galigo* (Yogyakarta : Gajah Mada University).
5. *Ibid.*, p. 1025-1026
6. Secara berurutan anakaraeng, anakaraeng dan todiang terdapat pada suku Bugis, Makassar dan Mandar.
7. Mukhlis & Edward L. Poelinggomang, *Batara Gowa, Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Tanah Makassar* (Ujungpandang ; Toyota Foundation, 1985), p.p. 41-46.
8. Hedy Shri Ahimsa Putra, *Minawang, Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1988), p.p. 59-60.
9. Mukhlis & Edward L. Poelinggomang, *op.cit.*, p. 53
10. *Ibid.*, p.54
11. A.M.P.A. Shelma, *op.cit.*, p.p. 359-361

12. *Ibid.*,p.p. 359-360
13. *Peristiwa Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari abad XIV s/d XIX* (Ujungpandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1985), p.27
14. *Lihat Sejarah Daerah Sulawesi Utara* (Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, 1977/1988),p.96.
15. E.S. De Klerck, *History of The Netherlands East Indies*, Volume II, (Amsterdam: B.M. Israel N.V., 1975),p.91
16. Abd. Razak Daeng Patunru, *Sedjarah Gowa* (Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1967),p.100
17. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara* (Djakara: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), p. 76-77.
18. *Kolonial Verslag* (1985),p.188.
19. *Kultuur Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1860.*
20. *Kultuur Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1860.*
21. *Kolonial Verslag*, 1855, hlm.139.
22. *Kultuur Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1863.*
23. *Lihat Kultuur Verslag tahun 1860, 1866 dan tahun 1867.*
24. Gonggrijp, "*Gorontalo*" dalam KS, 1915 II dalam A.M.P.A. Schelma, op.cit.,p.361.
25. *Adatrechtbundel III*,p.163,p.
26. A.M.P. a. Schelma,op.cit.,p.68.
27. *Ibid.*,p.73
28. *Ibid.*,p.93.

29. Darwah Hamzah, "*Abdurrachiem Kamaluddin Pelopor Penganjur Agama Islam di Daerah Mandar*" dalam Panji Masyarakat, 15 Februari 1976, p.p.26,27,28.
30. J. Noorduyn, *Islamisasi Makassar* (Jakarta: Islamisasi Makassar: Bharata, 1972), p.p.28,29,33,34. Juga lihat Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), p.p.222.
31. *Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad XIV s/d XIX* (Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 1988) p.47 dan p.60.
32. Darwas Hamzah, "*Abdurrachiem Kamaluddin Pelopor Pengajur Agama Islam di Daerah Mandar*" dalam Panji Masyarakat, 15 Februari 1976, p.p.26,27,28.
33. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 1977/1988). p.p.58, 95-97.
34. Khusnul Yaqin Rachman, "*Asal Usul Sekh Yusuf Tajul Khalwati dan Penyebaran Ajarannya di Daerah Sulawesi Selatan*", makalah Seminar memperingati Syech Yusuf sebagai Pahlawan Nasional, di Unhas, 1993, p.p.17-19.
35. Mukhlis, "*Dimensi Sosial-Budaya Sejarah Sulawesi Selatan*" "Makalah Seminar Sejarah MSI Sul-Sel Kerjasama dengan Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional Ujungpandang, 11-12 Desember 1993, p.p.8-9
36. A.a. Cense "*Pemujaan Syaikh Yusuf di Sulawesi Selatan*" dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1985), p.246.
37. Khusnul Yaqin, *op.cit.*, p.27.
38. Dr. Th. van den End, Ragi Carita, 1., *Sejarah Gereja di Indonesia 1500-1800* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1993) p.p.22-23
39. *Ibid.*, p.43.

40. Prof.Dr.H.A. Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujungpandang: Hasanuddun University Press, 1992),p.3.
40. Dr.Th. van den End, *op.cit.*,p.p. 80-81
41. Marwati Djuned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional).
42. Dr. Th. van den End, *op.cit.*, p.25,85 dan 93.
43. Pdt.Dr. Zakaria J . Ngelow, *Kekristenan dan Nasionalisme, Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indoneſia 1900-1950* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1994), p.18-19.
44. *Ibid.* ,p.p16-17.
45. Pendapat Kamma, salah seorang pemimpin UZV, yang mengutip pandangan Hoornbeek, teolog Belanda pada abad ke-17. *Ibid.*,p. 25.
46. Mr.S.C.Graaf van Randwijk, *Oegstgeest*, Kebijakan "Lembaga-lembaga Pekabaran Injil yang bekerjasama 1897-1942 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1989), p. 35-36.
47. *Ibid.*, p.p. 35-36.
48. *Ibid.*, p. 86-86,50
49. *Ibid.*, p. 110.
50. Dr.Th.van den End, *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*,2,2 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1993), p. 39.

BAB V

PENGARUH BARAT

5.1 *Perkembangan Birokrasi Kolonial*

Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-16. Kedatangan mereka karena tertarik rempah-rempah dari Indonesia, terutama rempah-rempah yang berasal dari kepulauan Maluku. Bangsa Barat pertama yang datang ke Indonesia adalah Bangsa Portugis yang berlayar dari Malaka yang didudukinya pada tahun 1511. Bangsa Portugis ini berlayar dari Malaka menuju Gresik di Jawa Timur dan selanjutnya ke Maluku tempat pengumpulan rempah-rempah.

Kemudian menyusul Bangsa Spanyol yang datang pada tahun 1521 dengan dua buah kapal melalui Filipina, Kalimantan Utara, Tidore, Bacan dan Jailolo. Sewaktu mereka pulang, beberapa di antara mereka tinggal di Tidore. Karena bangsa Portugis merasa mendapat saingan bangsa Spanyol, maka orang-orang Portugis menyerang mereka.

Meskipun terjadi perselisihan dengan bangsa Portugis, orang-orang Spanyol tetap berlayar ke Maluku hingga tahun 1534. Karena perjanjian Spanyol dengan Portugis, maka orang-orang Spanyol meninggalkan Maluku dan dengan demikian Bangsa Portugis menjadi bebas melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah¹.

Selanjutnya orang Portugis datang ke Makassar pada tahun 1536 dan terus ke Maluku dalam rangka penyebaran agama Katolik. Akan tetapi agama Katolik terdesak oleh agama Protestan yang dibawa oleh orang-orang Belanda².

Selanjutnya orang Belanda datang ke Indonesia dan tiba di Banten pada tahun 1596 yang juga merupakan tempat perdagangan rempah-rempah dari daerah sekitarnya dan dari Maluku, Seterusnya orang Belanda menuju Tuban dan berlayar ke Maluku. Di Maluku mereka singgah di Ternate dan Sultan Ternate menyambut dengan baik kedatangan orang-orang Belanda, karena Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan orang Portugis dan Spanyol.

Pada tahun 1607 orang Belanda berkunjung ke daerah Sulawesi Utara dengan persetujuan Sultan Ternate, karena Sulawesi Utara dibawah kekuasaan Sultan Ternate. Orang-orang Belanda ini ditugasi oleh Sultan Ternate untuk menyuruh orang Ternate semuanya yang berada di Menado kembali ke Ternate. Hal itu dilakukan untuk memudahkan orang-orang Belanda mengusir orang-orang Spanyol yang berada di sana yang datang ke Sulawesi Utara lewat Filipina. Pada tahun 1617 Bangsa Spanyol mendirikan sebuah benteng kecil di Menado dan memasok beras dari Minahasa ke Maluku untuk keperluan militer. Orang-orang Spanyol mencoba menyebarkan agama Katholik di sekitar Danau Tondano, tetapi mereka mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Kemudian dalam tahun 1643 para pemimpin lokal mengundang orang-orang Belanda yang beragama Protestan untuk dimintai bantuannya.

Di Sulawesi Selatan, Makassar merupakan daerah transit perdagangan rempah-rempah yang secara internasional bertambah terus selama abad ke-16. Di Makassar terdapat kantor dagang orang Inggris, Portugis, Denmark, dan Gujarat. Mereka membeli rempah-rempah yang membanjiri Makassar dan kemudian mengirimnya ke Eropa.

Pada mulanya orang Belanda tidak begitu tertarik kepada Kerajaan Gowa di bagian Timur ketika datang ke Indonesia. Setelah mereka mengetahui bahwa pelabuhan Gowa merupakan pelabuhan transit bagi kapal-kapal dagang yang berlayar dari dan ke Maluku, maka mereka berkesimpulan bahwa pelabuhan Gowa sangat baik karena berada di antara Malaka dan Maluku. Lagipula, pelabuhan aman karena tidak

mendapat gangguan dari orang Portugis. Kemudian Belanda berusaha mencari hubungan dengan Sultan Gowa dengan mengirim surat yang menyatakan bahwa tujuannya hanya berdagang saja. Raja Gowa mengundang Belanda untuk berkunjung ke pelabuhan Gowa dengan syarat bahwa mereka hanya berdagang saja dan Raja Gowa tidak ingin kerajaannya menjadi tempat adu senjata antara orang-orang asing³.

Sejak itu orang-orang Belanda mulai mengirim utusan ke Gowa dan mengajak Raja Gowa untuk menyerang Banda dan tidak lagi menjual beras kepada orang-orang Portugis. Akan tetapi ajakan itu semuanya ditolak oleh Raja Gowa, karena Raja Gowa tidak mau merugikan dirinya sendiri. Raja Gowa bahkan mengalah, karena kapal-kapal Belanda menyerang Maluku. Situasi memperburuk keadaan hubungan antara Gowa dengan Kompeni, karena keduanya mempunyai kepentingan dalam perdagangan.

Hal ini memperuncing keadaan dan kedua belah pihak berlomba menyebarkan pengaruhnya, karena Kompeni menginginkan bagian terbesar dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku yang pada waktu itu perdagangan sedang dikuasai oleh orang-orang Makassar. Karena merasa usaha memonopoli rempah-rempah tidak mungkin tanpa menundukkan Kerajaan Gowa.

Kompeni berusaha melumpuhkan Kerajaan Gowa dengan mengirim armada dari Martapura dan Batavia untuk memblokade pelabuhan Somba Opu. Tetapi usaha ini gagal, karena orang-orang Makassar masih lolos ke Maluku. Di Buton orang-orang Gowa melakukan penyerbuan dan pembunuhan terhadap orang-orang Belanda sehingga menyulitkan orang-orang Belanda. Hal ini membuat orang Belanda mendekati Gowa kembali dan melahirkan perdamaian dari tahun 1637 hingga 1654⁴.

Karena berbagai sebab, diantaranya pemberian hal-hal istimewa kepada orang Denmark, Portugis dan Inggris oleh Raja Gowa serta pengiriman bantuan tentara dan senjata kepada Hitu dan Seram menyebabkan terjadinya perang terbuka pada tahun 1654. Dalam bulan April 1655 Sultan Hasanuddin memimpin langsung armada Gowa menyerang Belanda yang berkedudukan di Buton dan serangan tersebut membawa kemenangan tentara Makassar atas tentara Belanda. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1655, ditanda tangani lagi perjanjian damai antara Makassar dengan Belanda.

Perjanjian ini tidak memuaskan Belanda, karena Sultan Hasanuddin kuat mempertahankan kenyataan yang adil. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1656, Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gowa dari laut. Serangan ini sangat tiba-tiba dan gencar, sehingga Belanda dapat menduduki Benteng Somba Opu di bagian selatan Makassar. Dengan serangan ini, perjanjian baru diadakan lagi antara Gowa dan Belanda yang sangat merugikan Gowa⁵.

Kemudian pada tahun 1666, armada Makassar di bawah pimpinan Karaeng Karunrung menyerang Buton yang telah bersekutu dengan Belanda. Pada tanggal 5 Oktober 1666, Belanda menyatakan kembali perang terhadap Makassar dengan pimpinan ekspedisi penyerangan Admiral Speelman. Dalam perang ini Makassar menderita kekalahan. Belanda bekerja sama dengan Arung Palakka yang berhasil mengumpulkan tentara yang jumlahnya sangat besar. Tentara Makassar dikalahkan di Buton, Bantaeng, Gelesong dan Barobong. Karena kekalahan ini, terpaksa Makassar menerima Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada tanggal 18 Nopember 1667⁶. Perjanjian ini telah menghancurkan kegiatan Makassar dan mengusir pedagang-pedagang Eropa dari kota serta menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Setelah itu kebanyakan kekuasaan Makassar dijadikan daerah teritorial Bone.

Di Sulawesi Utara, Belanda memantapkan kehadirannya. Gubernur Belanda yang berkuasa di Ternate, Robert Padtbrugge melakukan perjalanan ke Sulawesi Utara dalam tahun 1677 - 1679. Fort Rotterdam didirikan di Manado sebagai pangkalan utama Belanda dan kepulauan Sangir-Talaud ditaklukkannya. Gorontalo dan Limboto membuat perjanjian dengan Padtbrugge, bahwa kedua kerajaan itu menyetujui bahwa Ternate telah menyerahkan hak-haknya atas Gorontalo dan Limboto kepada VOC⁷.

Sedang Minahasa yang terdiri atas 24 wilayah menandatangani suatu perjanjian dengan Kompeni Belanda dalam tahun 1679. Negeri-negeri ini diwajibkan untuk mengirimkan bahan makanan ke pos-pos Belanda di Manado dan Ternate. Kemudian negeri-negeri kecil ini menjadi basis Belanda untuk sistem penanaman kopi secara paksa di Indonesia pada abad ke-19. Akan tetapi Banggai dan Tabungku yang berada di Sulawesi Tengah bagian timur tetap di bawah kekuasaan Ternate sampai tahun

1900⁸. Sedang Tana kaili dikunjungi pedagang VOC Belanda dalam tahun 1667 dan mereka mengadakan kontak dengan raja-raja yang berkuasa di Donggala, Tawaeli dan Parigi. Kedatangan pedagang Belanda ini untuk mencari emas. Hubungan Belanda dengan masyarakat Kaili masih terbatas pada hubungan dagang semata⁹.

Menjelang tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda G.A.G.I Van der Capellen membentuk sebuah komisi yang ditugaskan untuk meneliti dan membuat laporan mengenai keadaan Sulawesi Selatan. Anggota-anggota komisi ini terdiri atas Kolonel Van Schelle dan Mr. J.H. Thobias. Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat komisi itu, van der Capellen berangkat ke Makassar pada bulan Juni 1824 dan mengundang Raja-raja Sulawesi Selatan untuk diajak berunding mengenai pemerintahan Belanda di daerah ini. Dalam perundingan itu banyak di antara raja-raja yang tidak hadir. Meskipun demikian, perundingan berjalan terus sampai keluar sebuah naskah perjanjian yang disepakati bersama antara raja-raja yang hadir di satu pihak dan van der Capellen atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian tersebut dinamakan "Perjanjian Pembaharuan atas Perjanjian Bungaya 1167/1669" (*Bungayas contract te Oejoeng Pandang Vernieuw*) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 9 Agustus 1824 di Makassar¹⁰.

Adapun yang hadir dalam perundingan itu adalah raja-raja dari Makassar, Sidenreng, Tanete, Buton, Sanrobone, Binama, Bangkala dan Laikang. Sedang raja-raja yang tidak hadir adalah raja-raja dari Bone, Soppeng, Mandar, Suppa dan Luwu.

Berdasarkan perjanjian Bungaya yang diperbaharui itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kewenangan yang luas untuk memulai pemerintahannya di Sulawesi Selatan secara mutlak dan bahkan Sulawesi secara keseluruhan dengan nama *Celebes en Onder Horigheden* (Celebes dan Daerah Taklukannya) yang berkedudukan di Makassar.

Secara keseluruhan Daerah Sulawesi dibagi menjadi tiga jenis kekuasaan di bawah pengawasan Gubernemen Hindia Belanda, yaitu :

- (1) Daerah-daerah Gubernemen yang langsung di bawah kekuasaan dan pemerintahan Hinda Belanda.

- (2) Daerah-daerah Gubernemen yang langsung dikuasai dan diurus oleh Gubernemen Hindia Belanda.
- (3) Daerah-daerah yang menjadi sekutu Gubernemen yang disebut *Bondgenootschappelijke Landen*.

Adapun negeri-negeri yang termasuk jenis pertama ialah Distrik Makassar, Distrik Utara (Maros), Distrik Bonthain dan Bulukumba serta Pulau Selayar dan pulau sepanjang pantai barat Sulawesi, sedang daerah-daerah jenis kedua adalah Kaili, Pare-pare, Tanete, Tallo, Wajo, dan Laiwani. Dan yang termasuk jenis ketiga adalah Mandar, Toraja, Massenrengpulu, Ajatappareng, Bacukiki, Batupute, Labaso, Soppeng, Bone, Gowa, Luwu, Sanrobone, Turatea, Buton, Sumbawa, dan Flores¹¹.

Sedang di Sulawesi Tengah, barulah pada tahun 1850 dua buah kapal Belanda bernama Argo dan Bromo pimpinan kapten Van Der Hart mendarat di Pantai Parigi. Tentara Belanda itu menyerahkan naskah perjanjian (*Lange Verdrag*) kepada Magau Parigi Iskandar Abd. Muhammad untuk ditandatangani. Setelah itu, datang utusan Gubernur Belanda di Makassar ke Sulawesi Tengah menyampaikan perjanjian kepada raja-raja Tan Kaili, agar mereka meyakini kekuasaan Belanda atas mereka. Akan tetapi raja-raja ini masih tetap bersikap bebas, sehingga dalam 1888, Gubernur Belanda di Makassar mengirim pasukan massose sebanyak 3 buah kapal perang. Kapal-kapal perang itu menembaki pantai Kayu-Malue yang menimbulkan banyak korban manusia. Karena peristiwa itu, terpaksa Magau Tawaeli, Yangge Bodu (Toma I Tangngu) menandatangani plakat panjang pada tanggal 26 Juni 1888. Sejak saat itu raja-raja Tan Kaili yang membangkang tidak mau meyakini kekuasaan Belanda karena dipaksa menandatangani kontrak-kontrak pengakuan tersebut. Raja-raja yang menandatangani kontrak perjanjian pengakuan kekuasaan Belanda atas mereka secara berturut-turut adalah : Magau Palu, Magau Banawa, Magau Binomaru, Magau Sigi, nadika (Magau) Dolo dan Magau Parigi. Penandatanganan ini dilakukan oleh raja-raja Tana Kaili satu-persatu dan berlangsung dari tahun 1888 hingga 1897, termasuk raja-raja lain di Poso, di Buah dan Toli-toli¹².

Kemudian di Sulawesi Tengah ditempatkan seorang Asisten Residen yang bernama M.J.H. Engelenberg di Donggala. Tidak lama kemudian,

setelah terjadi stabilisasi, maka Sulawesi tengah juga dibagi ke dalam tiga wilayah bawahan. yaitu :

- (1) Sulawesi Tengah bagian barat (Tana kaili dan sekitarnya) menjadi wilayah kekuasaan langsung Gubernur *Celebes en Onderhorigheden* Gubernur Sulawesi dan daerah takluknya) yang berkedudukan di Makassar.
- (2) Sulawesi Tengah bagian tengah Teluk Tomini menjadi wilayah keresidenan (*residente*) Sulawesi Utara yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang Residen yang berkedudukan di Manado.
- (3) Sulawesi Tengah bagian Timur Teluk Tolo, menjadi wilayah keresidenan (*residente*) Sulawesi Timur dengan pusat pemerintahannya dipimpin oleh seorang residen yang berkedudukan di Bau-bau.

Pada tahun 1919 ketiga wilayah tersebut diatas disatukan kembali ke dalam satu wilayah keresidenan, yaitu Residentie Sulawesi Utara dengan ibu negerinya Manado. Sedangkan Tan Kaili dan sekitarnya dijadikan wilayah *Afdeling* yang terdiri atas empat buah *Onderafdeling*, sembilan wilayah adat *gemenschap Afdeling* ini, disebut *Afdeling Donggala* dengan ibu negerinya Donggala¹³.

Di Sulawesi Utara sejak tahun 1817, Minahasa telah di bawah kekuasaan Belanda dan merupakan daerah yang diperintah langsung di luar Jawa. Selanjutnya pada tahun 1924 disusun pemerintahan pertama di Minahasa yang membagi negeri itu ke dalam 27 walak. Walak-walak ini kemudian direorganisasi pada tahun 1856 untuk pertama kalinya dan disebut distrik-distrik. Lama kelamaan distrik-distrik ini kehilangan fungsinya sebagai kesatuan adat dan telah menjadi kesatuan-kesatuan administrasi. Kemudian Sulawesi Utara dan Tengah menjadi satu keresidenan dan ibu negerinya Manado. Keresidennan ini meliputi Gorontalo, Poso dan Donggala, sedangkan Minahasa merupakan wilayah yang diperintah langsung oleh Belanda dari Pusat pemerintahan di Batavia. Lagi pula Minahasa merupakan suatu daerah khusus di antara daerah yang diperintah langsung. Penduduknya mayoritas beragama Kristen dan berpendidikan lebih baik dari suku-suku bangsa lain di Hindia Belanda. Oleh karena itu, mereka lebih banyak digunakan sebagai pegawai dan guru dari seluruh daerah jajahan.

Pada tahun 1919 Minahasa mendapatkan Dewan Minahan (Minaharaad) yang dapat dianggap sebagai perintis pembentukan DPRD Kotapraja Manado dan DPRD Minahasa pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1918 diusulkan pula reorganisasi distrik yang pelaksanaannya diadakan pada tahun 1920, yaitu pengurangan jumlah distrik dari 16 distrik menjadi 7 buah distrik, yaitu Menado, Tomohon, Tondano, Tonsea, Toulow, Kawangkoan, Amurang dan Ratahan ini berlangsung hingga tahun 1942.

Pada tahun 1926 Onderafdeing Menado, Amarang dan Tondano dihapuskan dan diterapkan politik pengawawalian (*Outvoogdings politik*) yang menjadi Minahasa sebuah *Oderafdeling dan distrik*. Distrik diperintah langsung oleh Asisten Residen Menado, Kepala Afdeling Menadodi Gorontalo ditempatkan seorang Asisten Residen yang disebut Asisten Residen Gorontalo. Pada waktu Asisten residen van Baak, susunan genealogis yang berlaku. Dalam tahun 1858, kerajaan Gorontalo diperintah oleh seorang raja, dibantu oleh 2 jagugu, 2 kapitan laut, 4 wulea, 10 lopu, 20 Wala-apulu dan kira-kira 100 Olongea dan Taudaa.

Keasisten residenan Gorontalo meliputi Gorontalo, Limboto, Bone, Bolango dan Attingola dan termasuk wilayah Kontroliran Buol yang kemudian dipisahkan dan disatukan dengan Donggala. Pada tahun 1924-1925 wilayah-wilayah kontraliran Gorontalo dan Kuandang disatukan dan sejak wilayah keasisten residenan Gorontalo meliputi wilayah Gorontalo dan Boalemo¹⁴.

Dalam *Regering Reglement (RR)* tahun 1854 wilayah Indonesia dibagi secara administratif dalam *gewest-gewest* yang ditetapkan oleh raja di Negerland berdasarkan artikel 68 ayat 1. Untuk membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya digunakan penggolongan "wilayah Jawa di Madura dan wilayah di luar Jawa". Pada tahun 1899 Hindia Belanda dibagi menjadi 39 *gewest*, yaitu 22 *gewest* di pulau Jawa dan Madura dan 17 di luar Jawa dan Madura. Menurut pembagian terakhir pada tahun 1942, Hindia Belanda hanya dibagi 8 *gewest*, yaitu 5 *gewest* di Jawa dan madura dan 3 *gewest* di luar Jawa dan Madura.

Sebenarnya pelaksanaan *Regering reglement (RR)* tahun 1854 di Sulawesi baru tampak pada tahun 1856, yaitu bersamaan dengan pengangkatan C.A. Brauw sebagai Gubernur. Mengenai struktur

lembaga-lembaga pemerintahan *gewest* Sulawesi (*Celebes en Onderhorigheden*) yang berkedudukan di Minahasa adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang Pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur C.A. Brauw dan dibantu oleh staff yang terdiri atas: - Asisten resident : Grudelbach, - Sekretaris Merangkap Perpajakan : D.Y. Van Der Ven, - Sekretaris Urusan Bumiputera; Y.G. Wijamalen, Pembantu - Sekretaris: C.W. Bethbeder, - Pembantu Urusan Bumiputera: I. Altheer, - Pembantu Urusan Pemerintahan: C.G. Pieloor, - Penerjemah: J.W.D. Ranberge dan L. Pieters, - Kepala Urusan Agama: Abdul Gafur, - Urusan Ulama: Brahman, - Kapten melayu: Abdul Husin, - Melayu : Tajudin.- Kapten Wajo: Kakana Rette - Kapten Ende: karim Daeng Sitaba, dan - Kapten Cina: Tjing Siang
- (2) Badan Peradilan, terdiri atas : - Hakim Ketua: G.F.H Henny - Hakim Anggota: A.J. De Graaf, J.C. Termitelan dan G. Xeyligers - Opsir Pegadilan : Th. K. Singerlen - Sekretaris Pengadilan: W. Fadena, dan - Sekretaris Luara Biasa: L.A. Misero dan juru sita J. Misero.
- (3) Urusan Yatim Piatu dan Warisan (Wees and Budelkamer) terdiri atas : Ketua, A.F. Van Der Ven, Anggota A.W. Bedtbedet, H. Vennger Kuiper dan Gong I Ciu, Pembukuan N.D.A. Kervel, Sekretaris N. Altheer, dan Juru Sita W.S. Beth dan Tan Tjing Pae.
- (4) Bidang Lain-lain (Vender Plaatselijk Personeel) terdiri atas : Notaris D. Bodde, Kepala Pegadaian/Pelelangan R.H. De Grave, Kepala pelabuhan D.A.J.B. De Graaf, Kepala Pergudangan N.D.A. Kersel, Urusan Pengairan B.J. Nijastra, dan , Kepala Penjara : J.P.A. Misero.
- (5) Kepala-kepala Pemukiman Orang Eropa (Europesche Wijkmeester) terdiri atas : Kepala lingkungan Stad Vlaardingen F.A. Corporas, Kepala lingkungan Van Het Prims Hindrik Pad: R.H. De Grave, Kepala Lingkungan Negorij Baru : B.J. Worms, dan Kepala Lingkungan Kampung Baru : D.J.M. Mesman
- (6) Kepala/Urusan Penyemprotan (Brandspuitmeester) terdiri atas : Kepala J. Grudelbach dan anggota-anggotanya M. Muller, H. Venger Kuiper, J.A. Hahue dan E.B.L. Van Rhee¹⁶.

Selanjutnya sampai pada tahun 1860 birokrasi kokonial semakin tampak kemajuan perkembangannya dengan bertambahnya beberapa jabatan penting di dalam organisasi pemerintahan. Jabatan-jabatan penting tersebut adalah; Urusan Perjalanan, Dinas Pekerjaan Umum, Urusan Ketentaraan. Selain dari itu, di bidang pengadilanpun tampak kemajuan dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Makassar¹⁷.

Sejak tahun 1924, *gewest Celebes en Onderhoorigheden* dibagi menjadi delapan afdeling (Staatblad 1924 No. 467), yaitu :

- (1) Afdeling Makassar ibu negerinya Makassar
- (2) Afdeling Sungguminasa ibu negerinya Sungguminasa
- (3) Afdeling Bontain ibu negerinya Bontain
- (4) Afdeling Bone ibu negerinya Watampone
- (5) Afdeling Pare-pare ibu negerinya Pare-pare
- (6) Afdeling Mandar ibu negerinya Majene
- (7) Afdeling Luwu ibu negerinya Palopo
- (8) Afdeling Buton ibu negerinya Bau-bau.

Pembagian di atas diubah lagi berdasarkan staadblad 1922 No. 216 yang membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 8 Propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Surakarta, Sumatera, Borneo, *groote Oost* (Timur Besar). Penataan wilayah di propinsi Groote Oost didasarkan atas bisluit Gubernur tanggal 24 Pebruari 1940 No. 21 (Bijblad No. 14337) yang membagi *Groote Oost* atas tiga keresidenan yaitu *Celebes Onderhoorigheden*, Menado dan Maluku. Keresidenan Celebes en Onderhoorigheden dibagi menjadi tujuh afdeling dalam rangka penyesuaian perubahan ini, yaitu :

- (1) Afdeling Makassar ibu negerinya Makassar
- (2) Afdeling Bontain ibu negerinya Bontain
- (3) Afdeling Bone ibu negerinya Watampone
- (4) Afdeling Pare-pare ibu negerinya Pare-pare
- (5) Afdeling Mandar ibu negerinya Majene
- (6) Afdeling Luwu ibu negerinya Palopo
- (7) Afdeling Buton ibu negerinya Bau-bau.

Setelah dibentuknya gewest groote Oost (Propinsi Timur Besar) maka pulau Sulawesi telah menjadi 2 keresidenan, yaitu keresidenan Celebes en Onderhoorigheden dan Keresidenan Menado. Keadaan pembagian pemerintahan di Sulawesi ini berlangsung hingga terbentuknya negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1946.

5.2 Pendidikan di Masa Kolonial

Pendidikan di masa kolonial dapat dibagi menjadi tiga jenis pendidikan, yaitu pendidikan tradisional, pendidikan Islam, dan Pendidikan Barat.

5.2.1 Pendidikan Tradisional

Pada umumnya pendidikan tradisional berlaku sebelum pendidikan klasikal dimulai di Sulawesi, sebagai contoh pendidikan di zaman Kerajaan Gowa dahulu, belum ada pendidikan formal. Warga masyarakat memperoleh pendidikan itu rumah tangga dan melalui kelompok-kelompok masyarakat secara informal dan non formal.

Di dalam rumah tangga pendidikan moral yang bersifat sopan santun diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya semenjak masa kecil. Pendidikan di rumah tangga ini berintikan tata kelakuan yang mengajarkan kepada anak bertingkah yang baik dan sopan satu berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada sebaya maupun terhadap yang lebih muda. Selanjutnya ajaran yang diperoleh melalui enculturasi tersebut dipraktekkan di dalam masyarakat luas¹⁸.

Di samping pendidikan dalam rumah tangga tersebut di atas, pendidikan juga dapat diperoleh seseorang melalui kelompok-kelompok masyarakat berupa keterampilan. Pendidikan keterampilan ini banyak jenisnya, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan dan seni bela diri serta pengobatan tradisional.

Dalam pelaksanaan pendidikan keterampilan, anak-anak berumur 5 tahun dibiasakan di bawa ke tempat kerja, seperti perikanan, pertanian, peternakan dan pertukangan. Di bidang pertanian, anak-anak dibawa ke kebun oleh orang tuanya untuk melihat apa yang dikerjakan oleh orangtuanya dan orang-orang dewasa lainnya dengan menggunakan alat-alat pertanian untuk mengarap kebun atau sawah. Dengan cara demikian

anak-anak akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang bercocok tanam.

Apabila orang tuanya bekerja sebagai nelayan, maka anak-anaknya akan dibawa ke laut oleh orang tuanya untuk melihat cara mendayung sampan dan menjalankan perahu sambil menangkap ikan. Anak-anak ini akan melihat orang tuanya menggunakan alat-alat penangkap ikan. Keikutsertaan seorang anak ke laut, ia akan dapat mengetahui jenis-jenis alat tangkap dan cara-cara menggunakannya. Seorang anak akan mengetahui tidak saja jenis-jenis alat tangkap, tetapi juga akan mengetahui jenis alat tangkap untuk jenis ikan tertentu.

Jika seorang anak telah menjadi dewasa, maka sudah tahu mengemudi perahu dan dapat menggunakan berbagai jenis alat tangkap berkat pengalamannya bersama orangtuanya. Dengan pengalaman sebagai nelayan, seseorang dapat juga bekerja sebagai sawi (kelasi) pada perahu layar yang bergerak di bidang angkutan laut dari kota pelabuhan yang satu ke kota pelabuhan lainnya. Dengan cara orang tua membawa anak ke tempat kerja berlaku juga untuk keterampilan lainnya.

Di kalangan kaum Bangsawan dan masyarakat luas yaitu keseluruhan norma-norma adat mempengaruhi tingkah laku suku Bugis, Makassar dan Mandar. Diajarkan norma-norma itu dihormati dan dianggap sakral. Nilai-nilai yang terkandung dalam pangngadereng menjadi unsur utama pendidikan masyarakat¹⁹.

Adapun isi pangngadereng menurut Arung Bila ada lima macam, yaitu : Adat Besar (Bugis: Ade' Maraja), Adat Yang Kekal (Bugis: Ade' Putra Onro), Ketetapan (Bugis: Tuppu), Tata Cara (Bugis: Wari), dan Percontohan (Bugis: Rapang)²⁰.

Orang Bugis-Makassar dan Mandar mempelajari pangngadereng tersebut di atas melalui Lontaraq yang ditulis dalam huruf Bugis-Makassar yang dinamakan huruf Lontaraq.

Selain Lontaraq yang berisi pangngadereng, masing banyak jenis Lontaraq menurut isinya. Salah satu di antaranya adalah Lontaraq Pappaseng (Pesan), yaitu kumpulan amanat atau pesan orang terkemuka/bijaksana untuk diajarkan/diwariskan kepada keluarga atau generasi penerus²¹.

Proses pemindahan nilai-nilai dari leluhur kepada generasi penerus merupakan kewajiban bagi masyarakat Sulawesi melalui pendidikan khusus di dalam istana, putera-puteri Raja diajari oleh para cerdik pandai kerajaan. Para cerdik pandai ini lazimnya membacakan Lontaraq atau menceritakannya, karena guru-guru itu telah menghapuskannya. Mereka diajari ilmu kekebalan, ilmu kebatinan untuk menangkal penyakit yang bersumber dari sihir atau disebabkan oleh makhluk halus. Selain dari itu, mereka juga diajari ilmu bela diri yang menggunakan senjata tajam, terutama badik serta menunggang kuda. Calon raja yang telah melalui pendidikan ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana akan menciptakan suasana pemerintahan yang harmonis dalam arti tidak sewenang-wenang.

Dari isi Lontaraq yang harus dipahami oleh calon Raja, menandakan bahwa ia harus dilatih berperasaan halus. Seperti diketahui bahwa bahasa Lontaraq itu pada umumnya ditulis dengan bahasa kiasan dan bukan bahasa sehari-hari. Dalam hal mengemukakan pendapat dan keinginan, bahasa ibarat dan perbandingannya digunakan, sehingga memerlukan ketelitian dalam memahaminya. Demikian juga kata sindiran, kiasan, ibarat dan perbandingan tidak terkecuali dipakai dalam menyatakan cinta kasih kepada kekasih²².

Sebenarnya Lontaraq adalah milik orang istana, karena itu tergolong dalam Tradisi Besar (Great Tradition). Di istana terdapat orang-orang cerdik pandai yang memiliki ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Para cerdik pandai inilah yang menulis Lontaraq serta peristiwa sejarah yang terjadi di kerajaan.

Dari isi Lontaraq diketahui bahwa ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh seorang aparat istana, yaitu : (1) Memahami Ade' (Adat), (2) Mengetahui Kaidah-kaidah Kebenaran, (3) Menguasai Pengertian Dari Kaidah Tersebut, (4) Berpendirian Tegas, (5) Takut Kepada Dewata (Yang Maha Kuasa), (6) Memahami Wari Dan Rapang, dan, (7) Memahami Apa Yang Disebut Bicara²³.

Ternyata bahwa pendidikan di masa lampau sebelum Islam bersumber dari Lontaraq. Norma-norma kehidupan yang tercantum dalam Lontaraq disebut Pangngadereng yang terdiri atas Ade', Wari, Rapang dan Bicara. Sedang mereka yang bertindak sebagai guru adalah palontaraq, sanro dan pinati²⁴.

Setelah agama Islam masuk ke Sulawesi pada abad ke-17, pendidikan agama Islam juga berlangsung secara tradisional, yaitu anak-anak belajar mengaji di rumah guru atau di mesjid. Anak-anak ini mengaji secara berkelompok di rumah guru atau di mesjid di bawah bimbingan guru mengaji.

Menurut Mattulada²⁵ ada dua cara yang dikenal paling umum tentang pendidikan agama Islam, yaitu :

- (1) Untuk pendidikan dasar agama (mengaji Quran, belajar shalat dan lain-lain) bagi anak-anak. Mereka mengunjungi guru-guru mengaji di mesjid-mesjid atau di rumah guru-guru mengaji itu. Guru-guru mengaji itu pada umumnya adalah juga *parewa sara'*, yaitu Imam, Khatib dan lain-lain,.
- (2) Untuk pendidikan lanjutan agama bagi para pemuda-pemuda, mereka mengunjungi ulama tersebut yang memberikan pendidikan itu. Di tempat kediaman ulama itu, berkumpul puluhan pemuda mengikuti pegajian. Orang Bugis-Makassar menyebut pendidikan cara ini dengan istilah *pangaji kitta'*. Murid-murid pengajian ini disebut *santri* yang berasal dari berbagai daerah. Santri-santri ini berdiam dalam pondokan yang dibangun di sekitar rumah tempat kediaman ulama atau guru itu.

Selanjutnya Mattulada²⁶ menyebutkan satu cara lain lagi di samping dua cara tersebut di atas, yaitu cara *penyiaran* yang dilakukan oleh para ulama dengan mengunjungi pada pemuka adat yang berpengaruh di negeri itu. Para ulama ini diundang beberapa hari dan menginap di rumah pemuka adat. Mereka diajarkan ilmu-ilmu agama kepada pemuka adat dan keluarganya. Setiap ilmu yang diajarkan diberi imbalan dengan sedekah seperti ringgit atau barang berharga lainnya. Ulama yang melakukan cara ini biasanya mereka yang disebut *Saiye* dan dipercaya bahwa mereka adalah orang Arab yang masih mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Pengajian menurut cara ini melahirkan adanya pemuka adat atau orang-orang bangsawan Bugis-Makassar yang dipercaya sebagai orang-orang sakti yang memiliki ilmu gaib dan pengetahuan agama yang mendalam.

Seperti halnya Sulawesi Selatan, agama Islam masuk ke Sulawesi Tengah di kalangan orang Kaili pada permulaan abad ke-17. Selama

kurang lebih empat abad, pendidikan agama Islam di Tana Kaili mengembangkan ajaran Tauhid dan Syariat pada lapisan masyarakat tingkat atas saja, di mana terasa adanya apresiasi keagamaan Islam itu yang agak jelas. Lapisan sosial tersebut didominasi oleh keturunan Arab yang terasa masih dalam isolasi atau terasing dalam dari integrasi sosial dalam masyarakat Kaili. Sedang lapisan sosial bawah atau orang-orang kebanyakan, masih mengikuti petunjuk (bekas) pemimpin-pemimpin kaumnya dan menjadikannya panutan, seperti halnya dalam pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakatnya²⁷.

5.2.2 Pendidikan Islam

Di atas telah diuraikan pendidikan Islam yang berlangsung secara tradisional. Dalam uraian selanjutnya pendidikan Islam yang akan dijelaskan adalah pendidikan yang sudah bersifat klasikal dalam bentuk sekolah modern yang dikelola secara organisatoris oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bentuk pendidikan Islam disebut Madrasah dan Pesantren. Kedua lembaga pendidikan ini mempunyai sistem pendidikan yang sama.

Seperti diketahui bahwa Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Nopember 1846. Sejak itu *Gouvermen van Makassar* disebut *Gouvermen van Celebes en Onderhoorigheden* dan secara berangsur-angsur Raja-raja dijadikan *Zelfbestuur* yang secara langsung diawasi dan dikuasai oleh pemerintahan Belanda.

Daerah Sulawesi Selatan merupakan satu kesatuan administrasi yang memberi keluasan penduduknya untuk bergerak ke seluruh daerah dan keluar daerah Sulawesi Selatan serta terbuka pula bagi para pendatang. Dengan demikian semakin banyak orang Bugis-Makassar yang dapat menjalankan ibadah ke Mekah dan juga bermukim di tanah Arab untuk mendalami ilmu agama. Para ulama dari Jawa, Sumatera dan pedagang-pedagang Arab yang merangkap sebagai penyiara agama mengunjungi daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Mereka mengajarkan ilmu agama kepada pemuka-pemuka masyarakat dengan caranya sendiri-sendiri. Selanjutnya pengajian-pengajian Islam yang disponsori oleh pemerintah *Zelfbestuur* (bekas Kerajaan-kerajaan Bugis Makassar) diselenggarakan oleh para ulama asal Bugis-Makassar dan guru-guru agama yang

didatangkan dari Jawa, Sumatera dan Tanah Arab bertumbuh menjadi pendidikan kader-kader Islam di Sulawesi Selatan²⁹.

Selanjutnya, pada tahun 1926 di Bone, sebuah madrasah didirikan oleh *Zelfbestuur* (Raja Bone) yang diberi nama "*Madrasah Amiriah*" dan memberi bantuan kepada "*Al Madrasah Masriah*". Para pengasuh tidak hanya orang-orang Bone, tetapi juga orang-orang Arab yang didatangkan dari Tanah Arab, seperti Abdul Aziz Al Hasyimi Al-Murabbi dan Abdul Hamid dari Mesir. Mesjid-mesjid menjadi tempat pengajian yang resmi yang dikunjungi penduduk untuk mendengar uraian-uraian para ulama.

Di daerah Wajo seperti di Sengkang, pendidikan Islam dilaksanakan di madrasah, setelah pada ulama asal dari daerah itu pulang dari penuntutan ilmu agama di Tanah Arab. H. Makkatu adalah salah seorang di antara ulama yang merintis pengembangan pendidikan Islam formal dengan mendirikan pengajian di Tosora.

Organisasi Islam Muhammadiyah mulai menyebar ke Sulawesi Selatan pada tahun 1926. Organisasi Islam mendirikan mushalla yang menjadi tempat pengembangan usaha selanjutnya dan tempat pertemuan untuk pengembangan organisasi. Di ibu negeri *afdeling* (kabupaten) Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah seperti *Standard-School*, *Scakel School*, *Vervolg School* yang struktur dan kurikulumnya sama dengan sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi ditambah dengan mata pelajaran untuk pendidikan agama Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti ini didirikan di ibu negeri Afdeling Makassar, Bonthain, Pare-pare dan Luwu. Guru-gurunya kebanyakan didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Nafkah guru-guru itu diperoleh dari pembayaran uang sekolah murid-muridnya dan dari sumbangan masyarakat anggota Muhammadiyah setempat. Selain dari itu Muhammadiyah juga mendirikan madrasah-madrasah yang khusus memberikan pendidikan agama seperti madrasah diniyah di beberapa *Onderafdeling*³⁰.

Selanjutnya Muhammadiyah mendirikan madrasah muallimin yang mendidik guru-guru di kota Makassar. Tamatan madrasah ini sebagian besar bekerja di pedalaman Sulawesi dan sebagian lainnya melanjutkan pendidikannya ke Jawa dan Sumatera untuk Sekolah-sekolah Lanjutan Atas atau Sekolah Guru Lanjutan.

Golongan Islam yang bukan Muhammadiyah memikirkan juga bagaimana usaha memberikan pendidikan kepada umat yang umumnya disebut golongan kolot. Golongan ini menghubungi ulama-ulama Wajo yang sudah lama bermukim di Mekah, seperti Haji Abdul Rasyid dan istrinya Hajjah Sitti Saleha. Kedua suami istri ini telah lama bermukim di Tanah Arab dan dapat digolongkan kepada orang yang berilmu yang disebut ulama. Mereka berdua mempunyai anak 9 orang; 4 laki-laki dan 5 perempuan, yang kesemuanya dibesarkan dan memperoleh pendidikan di Tanah Arab. Salah seorang diantaranya bernama Kyai Haji M. As'ad bin Abdul Rasyid, dikirim orangtuanya untuk memenuhi panggilan ke Tanah Wajo untuk mengabdikan dirinya pada pengembangan pendidikan Islam. Ia membantu iparnya Kyai Haji Ambo Emme yang lebih dahulu merintis pendidikan Islam di rumahnya sendiri. Haji Ambo Emme tidak lagi dapat menampung murid-muridnya yang bertambah besar jumlahnya yang ingin belajar di rumahnya. Pada tahun 1932 Haji Ambo Emme bersama Kyai Haji M. As'ad mendirikan Madrasah Arabiah Islamiah (MAI). Haji M. As'ad lebih dikenal di kalangan umat Sulawesi Selatan dengan panggilan "*Anregurutta Haji Sade*". Keharuman namanya bertambah semerbak ketika beliau muncul dalam pertemuan di Watampone yang diusahakan oleh Raja Bone Andi Mappanyukki dengan nama "*Peretmuan Oelama Celebes Selatan*". Dalam pertemuan tersebut Haji M. As'ad muncul dengan gagasan sebagai berikut :

- (1) Mengembangkan pendidikan Islam melalui madrasah, di samping melanjutkan usaha para ulama yang masih ada dengan pengajian sistem tradisional.
- (2) Madrasah mendapat dana pengembangannya dari sumber-sumber zakt fitrah dan harta dari masyarakat.
- (3) Madrasah bebas dari segenap aliran politik, tidak menekankan pada salah satu mazhab.
- (4) Madrasah yang berkembang dapat membentuk cabang-cabangnya di mana saja, atas permintaan masyarakat dan
- (5) Para ulama menghindari sejauh mungkin persengketaan dalam perkara hilafiah³¹.

Gagasan di atas menjadi keputusan pertemuan tersebut yang diterima oleh semua pihak termasuk Raja Bone, Andi Mappanyukki. Berdasarkan

gagasan itu, maka disusun kembali sistem pendidikan di madrasah amiruatul Islamiyah di Watampone.

Di Makassar sistem pengajian madrasah seperti yang diajarkan di Wajo, Bone dan Soppeng tidak dapat berkembang. Sekolah-sekolah Muhammadiyah lebih menarik pemuda-pemuda dari daerah sebelah selatan kota Makassar. Pada zaman pendudukan Jepang (1941-1945), perguruan Islam baik Muhammadiyah maupun perguruan-perguruan lainnya mengalami kemunduran atau ditutup sama sekali. Sebagaimana diketahui bahwa perguruan-perguruan telah berkembang sejak tahun 1930-an, namun kader Islam sudah cukup banyak dan tahu melakukan kegiatan yang tidak dilarang oleh Jepang.

Karena usaha melanjutkan perguruan Islam tidak memungkinkan di zaman Jepang, maka pengajian-pengajian tradisional muncul di mana-mana. Murid-murid para ulama yang berasal dari pusat-pusat pendidikan di Wajo, Bone, Sinjai dan Salemo kembali ke kampungnya masing-masing dan mendirikan pengajian cara lama. Mereka dikunjungi oleh murid-murid dari kampung-kampung terdekat. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang semula melakukan kegiatan seperti biasa, akhirnya ditutup oleh Jepang.

Untuk menganggulangi pendidikan Islam Pemerintah pendudukan Jepang mendirikan perguruan Islam di Makassar yang dinamakan Madrasah Jamiatul Islamiyah (*Kokyo Gakuin*) di bawah pimpinan Umar Faisal (orang Jepang) dibantu oleh tenaga-tenaga ulama Islam orang Indonesia, seperti K.H. Muh Akib dan K.H. Darwis Zakaria. Murid-murid sekolah muallimin Muhammadiyah dan perguruan Islam lainnya melanjutkan pelajarannya ke Perguruan Islam yang baru itu³³.

5.2.3. Pendidikan Barat

Pada tahun 1779 di Makassar diadakan sekolah VOC yang mempunyai murid sebanyak 50 orang. Dari jumlah itu dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa VOC dalam bidang pendidikan dan pengajaran selama hampir 200 tahun di Indonesia betul-betul sangat sedikit sekali. Selanjutnya pada tahun 1865, pemerintah Belanda mendirikan "Hoofdenschool" (Sekolah Menak) di Tondano (Minahasa). Di sekolah tersebut, murid-murid mendapat kesempatan untuk menerima yang lebih tinggi daripada yang diberikan sekolah-sekolah rendah bumiputera.

Anak-anak yang dapat diterima di sekolah ini hanyalah berasal dari lapisan sosial tingkat atas saja. Mereka dapat mempelajari bahasa Belanda secara lebih mendalam di sekolah ini. Jadi jelas sekali bahwa sekolah ini merupakan tempat pendidikan calon-calon pegawai.

Selain dari pelajaran bahasa Belanda, murid-murid juga mendapat mata pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah rendah biasa dan juga ilmu mengukur tanah, menggambar peta, menggambar bangunan, pertanian, peternakan dan tata susila. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Akan tetapi Hoofden school ini dibubarkan pada tahun 1872³⁵.

Di Sulawesi terdapat dua buah sekolah guru yaitu sekolah guru di Tondano yang didirikan pada tahun 1873, seperti tersebut di atas dan di Makassar yang didirikan pada tahun 1876. Sekolah guru ini jumlahnya diperbanyak, yaitu 10 buah untuk seluruh Nusantara, yaitu di Surakarta (1852), yang kemudian dipindahkan ke Malang pada tahun 1875, Bukittinggi (1856), Tana Batak (Tapanuli 1864) dan ditutup pada tahun 1874. Kemudian di Bandung (1866), Ambon (1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875) dan Padang Sidempuan (1879)³⁶.

Salah satu isi perjanjian antara Raja Gowa dengan Pihak Belanda adalah Raja Gowa diwajibkan memajukan pendidikan rakyat atas *Volksonderwijs*³⁷. *Volksonderwijs* yang dimaksud oleh pemerintah kolonial Belanda adalah pendidikan formal dalam bentuk sekolah dengan daftar pelajaran tetap dan teratur. Pada masa kerajaan Gowa, telah lama terdapat pendidikan dan kini disebut pendidikan non formal dan diasuh oleh pejabat Kerajaan Tu Kajannang Bura'ne (Makassar: Jawatan Kepemudaan). Tu Kajannang Bura'ne ini mendidik pemuda-pemuda di bidang ketangkasan, seperti memanah, menunggang kuda, menjerat rusa liar, bela diri dan lain-lain³⁸.

Usaha pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah rakyat (*volksschool*) di Gowa termasuk Makassar, dipelopori oleh Van Der Capellen. Sebelum adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tentang pendidikan rakyat, seorang Pendeta atau Penginjil bernama Benyamin Frederil Matthes telah mendirikan sekolah. B.F. Matthes datang ke Makassar bersama dua orang temannya, yaitu L.W. Schmidt dan H.W. Bosman yang disebut terakhir adalah seorang

pendidik atau guru. Kedatangan B.F. Matthes ke Makassar untuk menyebarkan agama Kristen. Untuk memperlancar pekerjaannya, ia berusaha mendekati masyarakat setempat. Pertama-tama yang dilakukannya ialah mendirikan lembaga pendidikan guru. Di samping itu, Matthes ingin mempelajari tradisi dan latar belakang sosial budaya suku bangsa Makassar dan Bugis³⁹.

Matthes dengan dua kawannya mendarat di Makassar pada tahun 1875 dan setahun kemudian, yaitu pada tahun 1876 ketiga orang berkawan itu mendirikan sebuah sekolah guru bernama *Kweekschool* yang oleh orang Makassar disebut Sikola Rajaya (Skeolah Kaum Bangsawan) seperti yang telah disebutkan di atas. Sekolah guru tersebut merupakan salah satu dari sepuluh sekolah guru yang dibuka di seluruh Nusantara⁴⁰.

Pada mulanya, usaha Matthes mendirikan sekolah guru (*Kweekschool*) belum mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda, yang penyebabnya tidak jelas, mengapa pemerintah tidak senang terhadap usaha Matthes mencerdaskan rakyat dan kota Makassar. Mungkin, karena Matthes adalah penginjil dan bukan pedagang atau pendidik. Lagipula Belanda merasa pada waktu itu belum kokoh kekuasaannya terhadap Gowa dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan⁴¹.

Kweekshcool yang dibuka Matthes (1876) itu khusus mencetak kader guru. Karena belum ada sekolah yang dibuka sebelumnya, maka sangat sukar mendapat pelajaran privat di rumah masing-masing memasuki *Kweekschool*. Itulah asalnya mulanya, mengapa masyarakat umum memberi nama Sikola Rajaya (Sekolah Raja)⁴².

Pada tahun 1880, setelah sekolah itu berumur empat tahun pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pengelolaan sekolah *Kweekschool* tersebut dan mengangkat Benyamîn Frederick Matthes sebagai direktornya.

Sebenarnya yang mendorong Matthes membuka *Kweekschool* di Makassar (1876) adalah *Koninklijk Besluit 1848*, di mana pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan untuk memajukan pendidikan bagi penduduk setempat. Untuk pembinaan pendidikan bumiputera, pemerintah Belanda menyediakan dana keuangan sebanyak 25.000 Gulden (dua puluh lima ribu gulden, uang Belanda).

Adapun mata pelajaran pokok yang akan diberikan bagi murid-murid sekolah bumiputera, yaitu : (1) Pelajaran Membaca, (2) Menulis, (3) Berhitung, (4) Menggambar, dan (5) Bahasa Daerah⁴³.

Sejak *Kweekschool* di Makassar menamatkan murid-muridnya, tersedialah tenaga pengajar untuk sekolah-sekolah rakyat. Selain dari itu, guru-guru didatangkan dari Menado, Ambon dan lain-lain untuk mengisi kekurangan guru. Selanjutnya dibuka beberapa sekolah untuk masyarakat biasa di Butungweg, yaitu *Tweedeschool* (Sekolah Kelas Dua) yang berarti bahwa sekolah tersebut lebih rendah mutunya dibandingkan dengan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Indo Belanda dan anak-anak Bangsawan. Kemudian didirikan lagi sebuah sekolah pada tahun 1905 di sebelah selatan karebosi (Jl. Ammana Gappa sekarang) yang diubah menjadi *Inlandscheschool* atau sekolah Melayu menurut sebutan penduduk Makassar. Bahasa yang digunakan di sekolah tersebut adalah Bahasa Melayu⁴⁴.

Selanjutnya, pada tahun 1906 di Makassar dibuka pula sekolah untuk anak-anak Ambon di Kampung Tabaringan, yaitu *Holland Ambonsche School* (HAS). Bagi anak-anak China didirikan lagi sebuah sekolah yang bernama *Holland Chinese School* (HCS) pada tahun 1907.

Pada tahun 1912, di Majene dibuka sekolah Melayu (*Inlandscheschool*) yang merupakan satu-satunya sekolah pemerintah untuk seluruh daerah Mandar⁴⁵.

Dan tahun 1912 hingga 1920 dibuka sekolah HIS (*Holland Inlandsche School*) di Sulawesi Selatan, meliputi daerah Makassar, Parepare, Palopo, Watampone dan Bulukumba dan pada tahun 1930-an di Majene.

Setelah seseorang tamat HIS, ia dapat melanjutkan pelajaran ke MULO (*Middlebare Uitbruik Lagere Onderwijs*) yang dibuka pada tahun 1920 di Makassar di bawah pengawasan langsung oleh asisten residen. Di samping itu OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaaren*) dibuka pada tahun 1921 juga di Makassar. Sekolah-sekolah keterampilan juga dibuka seperti *Ambathschool* yang menghasilkan tukang kayu dan solder pada tahun 1927 dan sekolah pertanian atau *Landbow School* dibuka pada tahun 1932, sehingga penyuluhan pertanian bagi rakyat petani dapat ditanggulangi⁴⁶.

Sejak dari 1905 hingga 1942 kuantitas pendidikan di Makassar yang dilaksanakan pemerintah Belanda dapat dirinci sebagai berikut :

(1)	Kweeksechool sebanyak	1 buah
(2)	Sekolah Rakyat (Tweede Clase) sebanyak	1 buah
(3)	Sekolah Rakyat (Inlandscheschool) sebanyak	3 buah
(4)	Volksschool sebanyak	14 buah
(5)	Vervolkschool sebanyak	8 buah
(6)	Holland Ambonsche School sebanyak	1 buah
(7)	Holland Chinese Schoöl sebanyak	1 buah
(8)	HIS sebanyak	1 buah
(9)	MULO sebanyak	1 buah
(10)	OSVIA sebanyak	1 buah
(11)	Ambathschool sebanyak	1 buah
(12)	Landbouwschool	1 buah

Dari berbagai jenis pendidikan itu pendidikan guru mendapat prioritas utama untuk menanggulangi tenaga guru, sehingga sejak tahun 1920-an pemerintah membuka kursus bagi masyarakat yang berminat menjadi guru. Untuk maksud tersebut, dibuka LVO (*Lergaang Voor Onderwijs*) dan kemudian dilebur menjadi CVO (*Cursus Voor Onderwijs*) dan Normal School pada tahun 1925⁴⁷.

Usaha memajukan pendidikan oleh pemerintah kolonial di Sulawesi merupakan usaha pelaksanaan politik etis pada umumnya di Indonesia. Di satu pihak Belanda menghendaki agar masalah kesejahteraan rakyat di tanah jajahan mendapat perhatian, namun di pihak lain menghambat usaha tersebut. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan percepatan kemajuan rakyat Indonesia, karena mereka masih ingin lebih lama lagi bercokol di Indonesia untuk menikmati kekayaan alamnya.

Selain pemeritnah berusaha di bidang pendidikan, pihak swasta dan missi keagamaan juga membangun sekolah-sekolah yang berasaskan keagamaan.

Di Minahasa, sekolah yang pertama (1865) didirikan atas permohonan guru dan penginjil Hellendoorn. Gedung sekolah itu dibangun oleh rakyat dan honorarium guru dibayar oleh pemerintah. Penginjil Riedel dan Schwarz segera menggunakan sekolah itu. Mereka

mendirikan lebih banyak lagi sekolah dan honorarium ditanggung perkumpulan. Di beberapa ibu negeri, pemerintah juga membangun sekolah-sekolah. Sekolah yang didirikan perkumpulan makin lama makin banyak dan secara langsung dan tidak langsung memungkinkan masuknya agama Kristen⁴⁸.

Pada guru sekolah pada umumnya terdiri atas pemuda yang telah memperoleh pendidikan di rumah para pendeta dan penganjil. Kemudian pendidikan itu ditingkatkan dan akhirnya didirikan sekolah pendidikan guru pribumi di Tondano; Minahasa 1872).

Di Sulawesi Tengah, misionaris Kristen memasuki daerah Poso pada tahun 1892, sbagaimana biasa para pendeta dan penganjil mengajar penduduk pribumi di rumah kediamannya, seperti halnya para pendeta dan penganjil di daerah Minahasa.

Kemudian di Sulawesi Selatan, Antione Arien Van De Loosdrecht bersama keluarganya mengambil keputusan untuk berangkat ke Indonesia. Di Batavia ia bertemu dengan Dr. Andriani, seorang pendeta dan antropolog. Dr. Andriani sudah pernah tinggal lama di Sulawesi Selatan, khususnya di Tana Toraja, desa pegunungan bagian utara. Penduduk Tana Toraja umumnya belum memeluk agama Islam, tapi masih menganut kepercayaan lama, animisme. Daerah pegunungan itu berhawa sejuk, tidak sama daerah pantai yang berhawa panas.

Kedatangan Loosrect ke Sulawesi melewati Makassar menuju Tana Toraja. Ia adalah utusan GZB (*de Gereformerde Zending Bond*) yang didirikan pada 6 Februari 1901 di Utrecht. Missinya mengadakan pengabaran Injilke seberang lautan, terutama ke daerah jajahan Belanda khususnya Indonesia⁴⁹.

Pada tahun 1910, Loosdrecht tiba di Makassar dan tinggal sebentar d Makassar, kemudian ia bersama keluarganya meneruskan perjalanan ke Tana Toraja. Selama 3 tahun, 1910-1913, Loosdrecht mengadakan pendekatan disertai propaganda yang sangat hati-hati. Di Tana Toraja ia bertemu Tuan Manembu seorang guru swapraja yang bersedia membantunya. Bersama Loosdrehct, Tuan Manembu membuka sekolah di Kesu, dekat Rantepao pada bulan Nopember 1913. Kepala distrik setempat menyambut baik pembukaan sekolah zending pertama di Kesu itu.

Usaha Lembaga Pendidikan Roma Katolik yang datang ke Sualwesi, tidak langsung ke Makasar, ibukota Sulawesi Selatan, melainkan para penginjil berada di Minahasa, Sulawesi Utara. Pengurus badan keagamaan yang bernama Vikariat Apostolik Sulawesi didirikan di sana yang mulai bekerja pada tahun 1919. Pada waktu itu, Sulawesi Selatan belum mendapat perhatian, sebab selain penduduk Sulawesi Selatan taat beragama Islam, juga telah ada Zending Kristen Protestan yang melakukan kegiatan pekabaran Injil. Para penginjil Katolik dinamakan *Missionaris*⁵⁰.

Pusat kegiatan *missionaris* didirikan di Makasar pada tahun 1927, dengan dibukanya gedung keuskupan agung. Wilayah kerja keuskupan agung ini meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun itu juga telah dibuka sekolah untuk menampung anak-anak bangsa Eropa khusus bagi anak puteri. Sedang anak-anak putera didirikan dalam kompleks Rajawali pada tahun 1934⁵¹.

Selanjutnya pada tahun 1934, para frater dari Teiburg membuka sekolah khusus untuk anak-anak Eropa yang bernama *Eropesche Lagere School (ELS)* di Makassar, di pinggir Lapangan Karebosi. Sejak itu mulailah kegiatan misionaris Katolik di Sulawesi Selatan, walaupun belum terkoordinasi secara baik⁵².

Pada dasarnya ELS hanya menerima murid-murid dari anak-anak bangsa Eropa, akan tetapi setelah beberapa tahun, akhirnya anak-anak terpendang di mata pemerintah kolonial diterima juga di sekolah mewah tersebut. Gedung ELS yang didirikan misionaris Katolik di jalan Rajawai dibuat dengan arsitektur modern pada masa itu, dengan gaya Eropa. Sedangkan gedung HIS untuk bumiputera dibuat dari bambu dengan atap daun padi yang dkeringkan. Tidak hanya gedung yang berbeda, alat-alat tulis juga dibedakan antara sekolah HIS bumiputera menggunakan batu tulis, sedang anak-anak Eropa (ELS) menggunakan kertas yang agak tebal. Karena itu anak-anak terpendang kalangan bumiputera berusaha masuk ke sekolah yang diistimewakan itu⁵².

Menurut Eerenbeemt⁵⁴, misionaris Katolik sebelum perang (1942), mendirikan lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada anak-anak bangsa Eropa. Tujuan utamanya sebagai permulaan kegiatan para misionaris itu lebih dahulu dilakukan pendekatan dengan pihak

penguasa. Pendidikan Katolik sejak semula berusaha menanamkan disiplin sekolah yang keras dengan kehidupan beragama menurut ajaran Katolik. Anak-anak bumiputera yang beragama Islam masuk sekolah ELS, bukan hanya mulai mengenal lebih dekat cara-cara hidup orang Barat, melainkan mengenal pula bagaimana ajaran agama mereka yang berbeda dari yang diantaranya sendiri. hal ini dapat menimbulkan koeksistensi dalam kehidupan beragama secara damai dan saling menghormati sesama umat beragama sesuai dengan konsep toleransi antar umat beragama.

5.3 Pendidikan Nasional

Sebenarnya pendidikan nasional telah lahir sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tahun 1936, Mr. Sunaryo seorang nasional republiken datang ke Makassar dan menemui beberapa orang sahabatnya untuk membicarakan kemungkinan mendidik kader yang berjiwa nasional/republiken. Ia diberi mandat oleh Pusat Taman Siswa Yogyakarta untuk membuka Taman Siswa di kota Makassar. Pada tahun itu juga disepakati membuka Perguruan Nasional dengan nama Taman Siswa. Sistem pendidikan disesuaikan dengan model sekolah pemerintah, tetapi jenjang pendidikan tetap mengikuti Pusat Taman Siswa di Yogyakarta⁵⁵.

Pada waktu pembukaan sekolah ini mengalami sedikit kesulitan tentang murid-murid yang akan diterima. Karena itu, beberapa tokoh nasionalis memindahkan anaknya atau adiknya masuk belajar ke Taman Siswa, seperti Wahab Tarru, tokoh nasionalis pada masa itu, memindahkan adiknya, Nanang yang sudah kelas IV VVS, tapi harus melalui kelas antara. Adapun guru-guru yang mengajar di sekolah itu adalah: Saelan (Ayah Emmy Saelan, pejuang), Sujiman, Goebel bersama istri, Gani dan Suwarno yang merangkap Kepala Sekolah Taman Siswa⁵⁶.

Murid-murid Taman Siswa diberikan pendidikan kader bangsa yang berupa paham nasionalisme melalui pelajaran agama dan bahasa Indonesia. Pergerakan Nasional dalam bentuk partai (PNI) didirikan oleh Suwarno pada tahun 1929, tetapi dibubarkan pada tahun 1933. Akhirnya yang bersifat nasional disalurkan para anggota masyarakat pendukungnya melalui wadah pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa seolah-olah merupakan wadah baru PNI atau Partindo. Tetapi dalam bentuk lembaga

pendidikan cara ini lebih aman ditempuh dalam upaya tetap membina jiwa nasionalis pada masyarakat di kota Makassar⁵⁷.

Selain Taman Siswa terdaat juga Perguruan Rakyat Indonesia yang sifatnya nasional. Sekolah dasar ini dibuka pada tahun 1937 oleh sekelompok Republikan yang berasal dari Minahasa. Pimpinan sekolah ini adalah Lengkang yang merupakan saingan dalam pendidikan kader-kader yang Nasionalis. Jumlah murid-murid di perguruan ini cukup memadai tetapi sekolah ini ditutup pada tahun 1939⁵⁸.

Lembaga pendidikan yang juga diselenggarakan pihak swasta adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah walaupun sekolah ini bercorak agama, tetapi sekolah-sekolah Muhammadiyah juga merupakan tempat pengkaderan bibit yang nasionalistik. Sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak menghasilkan pejuang nasional.

Pada masa pemerintahan Jepang (1942 - - 1945), sekolah-sekolah model Belanda yang ditinggalkan juga tetap diteruskan oleh Jepang, tetapi sekolah-sekolah diganti menurut istilah bahasa Jepang⁵⁹, seperti :

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	
	Belanda	Jepang
Pendidikan Dasar	Volkschool	Futsu U Kogakku
Pendidikan Sambungan	Vervolkschool	Kogio Kogakko
Pendidikan Guru	Normal School	Sihan Gakko
Pendidikan Menengah	MULO	Cu Gakko

Dari masa kemerdekaan hingga 1950, kota Makassar menjadi pusat Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Dr.H.J, Van Mook, sejak dirumuskan negara boneka itu pada konperensi Denpasar dilanjutkan dengan Konperensi Malino (15-25 Juli 1946). Pemerintah NIT mengambil alih berbagai lembaga pendidikan yang pernah dijalankan oleh pemerintah militer Jepang. Nama-nama sekolah yang dahulu dipakai kembali, tetapi sudah diubah menjadi bahasa Indonesia, seperti Volkschool menjadi sekolah rakyat 3 tahun, Vervolkschool menjadi sekolah Sambungan, Normal School menjadi SGB dan MULO menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum)⁶⁰.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, para pemuka Islam pro-Republik mendirikan Perguruan Islam Datumusseng dibawah pimpinan Haji Mansyur Daeng Tompo di Makassar. Pembukaan sekolah karena terdorong oleh reaksi teradap penjajah yang tidak memperhatikan pendidikan Islam dan mempersatukan umat Islam menentang penjajahan serta menampung pemuda pejuang yang ingin melanjutkan pendidikannya⁶¹.

Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 1945, tokoh-tokoh Pergerakan Nasional seperti Dr. GSSJ Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Mr. Andi Zainal Abidin, Suwarno dan lain-lain membuka Perguruan Nasional. Perguruan Nasional ini membuka SMP dan sebagai direktornya adalah Dr. Ratulangi sendiri, yang ketika itu adalah juga Gubernur Sulawesi. Ketika Gubernur Ratulangi ditangkap oleh NICA ia diganti oleh Syam.

Pada tahun 1948 Syam digantikan oleh Malajong Daeng Liwang. Perguruan Nasional ini cukup terkenal perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Dari sekolah itu tampil nama-nama tokoh pejuang seperti Wolter Monginsidi, Rivai Paerai dan lain-lain yang menentang kekuasaan NICA. Ide-ide nasionalis republiken dipompakan kepada anak didik melalui pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia.

Setelah Mr hardi, Sekjen Komisaris PP&K Jakarta berkunjung ke Indonesia Timur pada bulan Oktober 1950, maka dibentuklah Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi dalam bulan November 1950 yang meliputi :

(1) Di bagian Utara

- (a) Inspeksi SR Kabupaten Sangir/Talaud berkedudukan di Tahuna
- (b) Inspeksi SR Kabupaten Minahasa/Bolaang Mangondow, berkedudukan di Tomohon.
- (c) Inspeksi SR Kabupaten Gorontalo (Sulawesi Utara) berkedudukan di Gorontalo.
- (d) Inspeksi SR Kabupaten Poso, berkedudukan di Poso.
- (e) Inspeksi SR Kabupaten Donggala, berkedudukan di Palu.

(2) Di Bagian Selatan

- (a) Inspeksi SR Kabupaten Makassar I, berkedudukan di Makassar
- (b) Inspeksi SR Kabupaten Makassar II, berkedudukan di Makassar

- (c) Inspeksi SR Kabupaten Bonthain, berkedudukan di Bonthain.
- (d) Inspeksi SR Kabupaten Bone, berkedudukan di Watampone.
- (e) Inspeksi SR Kabupaten Pare-pare, berkedudukan di Pare-pare
- (f) Inspeksi SR Kabupaten Mandar, berkedudukan di Majene.
- (h) Inspeksi SR Kabupaten Luwu, berkedudukan di Luwu.
- (i) Inspeksi SR Kabupaten Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Bau-bau.

Untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah Rakyat, maka pemerintah membuka kursus Pengajaran untuk kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KP. Kpkb) pada bulan Desember 1950 di Propinsi Sulawesi. Di samping itu, untuk meratakan perbaikan mutu pengajaran, maka guru-guru yang berijasah SGB ditempatkan secara rasional. Guru-guru di kota yang telah mencapai ijazah yang lebih tinggi, dipindahkan ke pedalaman. Demikian juga tamatan SGB 1952 di Minahasa dan Daerah Gorontalo/Bolaang Mangondow sebanyak 45 orang semuanya dipekerjakan di Sulawesi Selatan, karena kekurangan guru⁶⁴.

5.3.1 Pendidikan Sekolah Rakyat

Perkembangan pendidikan/pengajaran tingkat SR atau sekolah dasar pada masa lampau sangat menyedihkan. Segala kesukaran ini bertalian dengan perbaikan mutu pelajaran yang telah merosot akibat pendudukan Jepang dan pergolakan revolusi nasional serta penyempurnaan SR 3 tahun menjadi SR 6 tahun. Menurut catatan Inspeksi Sekolah Rakyat Propinsi Sulawesi, bahwa Sekolah Rakyat yang terdapat di seluruh Sulawesi sebanyak 2906 Sekolah Rakyat yang terdiri atas :

- (1) Sekolah Rakyat Pemerintah 3 tahun sebanyak 1364 buah
- (2) Sekolah Rakyat Pemerintah 6 tahun sebanyak 505 buah
- (3) Sekolah Rakyat Bersubsidi 3 tahun sebanyak 364 buah
- (4) Sekolah Rakyat Bersubsidi 6 tahun sebanyak 296 buah
- (5) Sekolah Rakyat Partikelir yang belum bersubsidi 3 tahun sebanyak 134 buah
- (6) Sekolah Rakyat Partikelir yang belum bersubsidi 6 tahun sebanyak 43 buah

Dari 2906 SR di atas didapati jumlah murid sebanyak 525.753 orang dengan jumlah guru hanya 8432 orang dengan rincian ijazah sebagai berikut :

- (1) 89 orang berijazah SGA, antaranya 47 orang KS/FKS
- (2) 1948 orang berijazah SGB, antaranya 318 GB
- (3) 4501 orang berijazah VO
- (4) 1894 orang tidak berijazah guru (SR, SMP, dan lain-lain)

Selain jumlah SR tersebut di atas, terdapat juga 1 Konkordanschool (untuk anak-anak Belanda) dan 10 sekolah Tionghoa 3 tahun serta 38 buah sekolah Tionghoa 6 tahun.

5.3.2 Pendidikan Menengah

Perkembangan pengajaran tingkat menengah sesungguhnya mengalami kesukaran-kesukaran karena berbagai kekurangan. Namun demikian, pengajaran menengah ini tetap berjalan dan meluas ke beberapa daerah di seluruh Propinsi Sulawesi.

Adapun yang dimaksud pendidikan dan pengajaran menengah meliputi sekolah SMP dan sekolah-sekolah yang sederajat serta sekolah SMA dan sekolah-sekolah yang sederajat. Kalau ditinjau ke masa lampau, maka sekolah yang sederajat dengan SMP adalah sekolah MULO. Pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua terdapat 5 sekolah MULO di daerah Propinsi Sulawesi di samping beberapa buah sekolah kepunyaan partikelir dan 1 buah sekolah AMS serta 1 buah HBS yang masing-masing disamakan derajatnya dengan SMA. Semua sekolah tersebut mempunyai murid sebanyak 720 orang dengan jumlah guru sebanyak 70 orang⁶⁶.

Pada zaman pendudukan Jepang dan masa revolusi, keadaan ini berubah karena kekacauan yang ditimbulkan oleh agresi Belanda (NICA). Meskipun terdapat berbagai rintangan, tetapi semangat dan keinginan untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak dapat dibendung. Di beberapa tempat dibuka sekolah-sekolah menengah yang pada waktu itu masih bernama MULO, AMS, dan HBS. Di antaranya di Makassar, sekolah AMS juga dibuka di Bukit Koatis Minahasa.

Selanjutnya terdapat kemajuan yang cukup menggembirakan di lapangan pendidikan/pengajaran dengan bertambahnya jumlah sekolah menengah yang dibuka seperti 110 buah SMP di seluruh Propinsi Sulawesi milik pemerintah dan swasta dan puluhan jumlah SMA. Di Kabupaten Minahasa saja terdapat 33 SMP, 2 SMEP, 3 ST, 5 SGA, 6 SGB, 7 SKP dan 5 SMA. Sekolah-sekolah yang setingkat SMP cukup bertebaran di seluruh Propinsi Sulawesi, yaitu SKP, SMEP dan ST.⁶⁷ Sampai tahun 1950, di Sulawesi Selatan terdapat SMU (Sekolah Menengah Umum) 7 buah, SMEP 4 buah, SMA 2 buah, SMEA 1 buah, SGB 2 buah, SGA 1 buah, SGKP 1 buah. SKP 1 buah. ST 1 buah, SDP 1 buah, SHD yang kemudian diubah menjadi SMKA 1 buah dan SPMA 1 buah⁶⁸.

Dalam penyelenggaraan pendidikan menengah peranan swasta cukup memberikan andil, seperti Balai Perguruan Saweri Gading mempunyai banyak cabang-cabang di daerah-daerah dalam wilayah Propinsi Sulawesi. Selain dari itu perguruan agama (Islam dan Kristen) juga banyak mendirikan sekolah-sekolah SMP dan SMA, diantaranya 48 buah SMP dan 3 buah SMA yang dibangun oleh Perguruan Islam dan 11 buah SMP dan 2 buah SMA oleh Perguruan Kristen dan 2 buah SMA oleh Roma Katolik⁶⁹.

5.3.3 *Perkembangan Perguruan Tinggi*

Pada masa Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) di Makassar didirikan Perguruan Swasta, yaitu Balai Perguruan Tinggi Saweri Gading di bawah pimpinan Nurdin Syahadat. Tokoh-tokohnya ialah Nurdin Syahadat, Syamsudin Daeng Mangawing, Prof Dr. G.H.J. Riekerk Prof. Drs Wolhoff, dll mereka mendirikan BI⁷⁰.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 1947, berdasarkan Surat Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Makassar didirikan sebuah Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang dari Universitas Indonesia di Jakarta⁷¹.

Kemudian untuk memenuhi tenaga pengajar Ilmu Ekonomi dan Memegang Buku di sekolah menengah didirikan kursus yang bernama "Leergang Van De Opleiding Van Leraren M.O. Economie Handels Wetenschappen Met Beperkte Bevoegdheid" pada tanggal 1 September 1947 yang dipimpin oleh Drs. L.A.H. Enthoven. Kursus ini mulai dibuka pada tanggal 15 Januari 1948 dengan jumlah mahasiswa terdaftar

sebanyak 16 orang. Sejak tanggal 1 Pebruari 1948 pimpinan kursus ini selanjutnya dipercayakann kepada prof. Dr. J.J. Honrath yang juga mempunyai tugas untuk mengaktifkan kembali perkuliahan Fakultas Ekonomi Cabang Universtas Indonesia di Makassar.

Prof.Dr. J.J. Honrath diangkat menjadi guru besar dalam mata pelajaran Ilmu Ekonomi, Statistik dan Ilmu Bumi Perekonomian. Kegiatan kuliah dipusatkan di Bara-baraya Makassar sejak tanggal 8 Oktober 1948. Pada bulan Oktober 1948, itu juga jumlah mahasiswa menjadi 36 orang dengan tenaga dosen sebanyak 11 orang. Setelah berumur 1 tahun, yaitu pada bulan Oktober 1949, jumlah mahasiswa bertambah lagi menjadi 77 orang. Pada waktu itu kursus Leergang telah berhasil menamatkan 7 orang dari 8 mahasiswa yang menempuh ujian akhir⁷².

Perguruan tinggi ini mendapat suatu kemajuan dengan memperoleh beberapa orang guru besar, yaitu : (1) prof. Dr. J.J. Honrath, merangkap dekan, (2) Prof. Mr. Dr. C. De Heer, yang mengajarkan mata kuliah Ilmu Ekonomi Perusahaan yang juga merangkap jadi Sekretaris, (3) prof. Dr. Ph. Winkleman, mengajar Sejarah Perekonomian, dan (4) Prof. Dr. J.D.N. Versluys, mengajar Ilmu Ekonomi Tropis.

Karena perubahan ketatanegaraan dari NIT menjadi RIS dan dari RIS menjadi RI, mempengaruhi perkembangan kursus Leergang dan Fakultas Eonomi ini. Dalam bulan Oktober 1950 kegiatan perkuliahan terpaksa dibekukan, karena semua tenaga dosennya yang berkebangsaan asing, meninggalkan Makassar. Sebelum pembekuan perkuliahan kursus Leergang, masih berkesempatan menamatkan sebanyak 16 orang mahasiswa yang mengikuti ujian Akte M.O. memegang Buku dan Ilmu Dagang⁷³.

Beberapa mahasiswa yang berijazah MO dan mereka yang melanjutkan studi ke Universitas Indonesia di Jakarta merencanakan untuk mengaktifkan kembali Fakultas Ekonomi yang dipelopori oleh beberapa tokoh, seperti Nuruddin Syahadat, J. Dungga, Tutupoli, D. Ch. Lokuduitan dan beberapa orang lainnya. Mereka menghadapi kesulitan dan perbedaan pendapat sehingga terbentuk tiga kelompok yang menginginkan adanya perguruan tinggi, yaitu :

- (1) Kelompok pertama dipimpin oleh Nuruddin Syahadat, Prof. Drs. Wolhoff dan Mr. Tjia Kok Tjiang mendirikan Balai Perguruan Tinggi Saweri gading.
- (2) Kelompok kedua dipimpin oleh J.E. Tatengkeng yang menginginkan dbukanya sebuah Universitas Negeri di Makassar dan segera membentuk panitia untuk maksud tersebut.
- (3) Kelompok ketiga dipimpin oleh J. Dunga dan Tutupoli menginginkan pengaktifan kembali Fakultas Ekonomi dan membentuk Panitia untuk tugas itu.

Masing-masing kelompok berjuang dan akhirnya dicapai persetujuan antara Universitas Sawer gading dengan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bahwa Universitas Sawerigading akan memusatkan kegiatan pada kursus-kursus BI. Bahasa Inggris, Ilmu Mendidik dan Ilmu Hukum. Pemerintah Pusat (Mennteri PP dan K) berjanji akan segera membuka universitas negeri di Makassar dan mengaktifkan kembali Fakultas Ekonomi atas bantuan Gubernur Sudiro dan Walikota Makassar Ahmad Daya Syahrudin dan Universitas Indonesia bersedia membantu pendirian tersebut. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1952, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat didirikan sebagai cabang Universitas Indonesia di Jakarta dan prof. Dr. Heer sebagai Dekan pertama dengan jumlah mahasiswa sebanyak 46 orang. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 4 Oktober 1953 Fakultas Ekonomi diaktifkan kembali dan juga merupakan cabang Universitas Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1956, Fakultas Kedokteran dibuka dengan Dekan Prof. Dr. Soejono. Keempat Fakultas di atas menjadi cikal bakal Universitas Hasanuddin yang diresmikan pada tanggal 10 September 1956 oleh Wakil Presiden Drs. Muh. Hatta⁷⁴.

5.3.4 Konsep-konsep Ideal Dalam Budaya Sulawesi

Sebenarnya setiap suku bangsa mempunyai konsep ideal dalam kebudayaannya sesuai pandangan hidupnya. Di daerah Minahasa di Propinsi Sulawesi Utara, konsep *mapalus* adalah sangat menonjol dan sangat terkenal. Konsep *mapalus* ini diterapkan pada setiap pekerjaan berat apapun, di mana orang saling membantu untuk meringankan pekerjaan, seperti pekerjaan di bidang pertanian, pembuatan rumah baru dan lain-lain. Dalam pembuatan rumah, mereka bekerjasama untuk

penarikan kayu dari hutan. Di samping itu mereka juga bekerjasama dalam pembuatan perahu dan peluncurannya ke laut⁷⁵.

Di samping hal-hal tersebut di atas, mapalus juga dipraktekkan dalam menghadapi hal-hal penting, seperti kematian, perkawinan dan perayaan lainnya, untuk kepentingan rumah tangga dan komunitas, saling membantu dan kerjasama berdasarkan prinsip repositas. Suatu bantuan yang diberikan dalam suatu kegiatan, berupa tenaga, barang-barang ataupun uang, bersama dengan bentuk-bentuk penghormatan dan penghargaan, harus selalu disadari dan diberikan balasannya; apabila seseorang melalaikan hak maka ia dianggap orang yang 'tidak baik' dan bilamana ia pada suatu waktu mengalami suatu hal yang memerlukan bantuan, maka orang lain tidak akan mau atau setengah hati membantunya⁷⁶.

Sifat istimewa dari mapalus ini, karena laki-laki dan perempuan sama-sama bergerak dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan mapalus dalam mendirikan rumah baru, misalnya mulai dari penebangan kayu sampai kepada mendirikan rumah, selalu dalam keadaan harmonis dan gembira dengan ciri khas Minahasa. Demikian juga mapalus dalam pertanian, seperti penanaman padi sampai kepada menuai hasilnya selalu dalam keadaan harmonis dan gembira. Masyarakat Minahasa memang terkenal periang dan gembira. Kegembiraannya selalu diiringi dengan nyanyian dan tari. Tari, nyanyi dan makan minum menjadi sifat istimewa ketika mapalus dilaksanakan⁷⁷.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa kesadaran akan kesatuan tempat asal seperti sekarang, sekampung, sekecamatan melahirkan berbagai bentuk perkumpulan sosial baik di Manado maupun di kota-kota lain di luar Minahasa. Banyak dari organisasi sosial yang seasal ini juga bersifat keagamaan, atau perkumpulan arisan atau kumpulan uang (Kalangie dalam Koentjaraningrat)⁷⁸.

Ketaatan orang Gorontalo untuk mematuhi peraturan yang cukup besar dan budi pekerti mereka yang baik. Pembunuhan dan penganiayaan sampai mati, jarang sekali terjadi begitu pula pencurian. Keselamatan orang dan harta benda dapat dinikmati dengan rasa puas. Perkakas rumah dan hasil tanaman dapat dihindari oleh siapapun, termasuk hewan seperti: kuda berjalan bebas di daratan. Orang jarang atau tidak pernah

mendengar bahwa ada sesuatu yang dicuri, lagipula dalam tahun-tahun terakhir tidak ada perkara yang dimajukan di kalangan Mahkamah Kerajaan yang mengadili kejahatan besar⁸⁰.

Dalam kehidupan orang Kaili di Sulawesi Tengah, tergambar pada kebudayaan kemasyarakatan kekeluargaan yang terjalin dalam peristiwa-peristiwa perkawinan atau pilihan jodoh. Perkawinan yang membentuk keluarga batih menjadi peristiwa kehidupan yang dipandang salah satu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan sebagai To-Kaili. Peristiwa ini dipandang penting, karena berbagai hal dalam kehidupan ikut ditentukan. Perasaan harga diri, martabat pribadi, keluarga dan kelompok kaum ikut dipertaruhkan dalam penyelenggaraan perkawinan itu. Selain dari itu, penampilan status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat juga turut ditampilkan. Acara perkawinan itu sering kali mewujudkan luapan perasaan dalam persekutuan, sebagai bukti pentingnya perjodohan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kelompok perkauman. Keberhasilan seseorang melaksanakan perjodohan mewarnai kehidupan pribadinya sesuai dengan pola-pola yang terdapat dalam kebudayaan persekutuan itu⁸¹.

Selanjutnya sejumlah ungkapan dalam bahasa Kaili memperlihatkan begitu pentingnya masalah perkawinan itu dalam kehidupan orang Kaili. Di antara ungkapan-ungkapan itu adalah :

- (1) Mombali Tanda Tuvu, berarti perkawinan itu memberi bukti tentang hidup. Maksudnya perkawinan itu menghasilkan keturunan sebagai bukti bahwa seseorang pernah hidup di dunia ini.
- (2) Mompakalue Posalara, berarti perkawinan itu memperluas jaringan kekeluargaan.
- (3) Mompakabasaka Rante Ri Tambolo, artinya perkawinan itu melepaskan rantai yang melilit leher orang tua, jadi arti perkawinan menunjukkan seseorang atau sepasang suami istri pernah hidup di dunia yang dibuktikan dengan adanya keturunan. Keturunan ini sebagai pelanjut tradisi kehidupan keluarga dan mengembangkan jaringan kekerabatan⁸².

Sebagaimana diketahui bahwa orang Toraja mendiami daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, orang Toraja bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu,

Kabupaten Polewali-Mamasa dan Kabupaten Mamaju. Kerukunan dalam kekeluargaan masyarakat Toraja masih sangat kuat. Hal ini kita dapat lihat dalam upacara pendirian atau perbaikan Tongkonan mereka serta upacara kematian. Persatuan dalam kekerabatan orang Toraja masih sangat kuat. Orang-orang yang seketurunan bersatu di tongkonan mereka, terutama dapat dilihat pada upacara rambu tuka (sukacita) dan upacara rambu solo' (dukacita). Jadi pada masa hidupnya orang Toraja bersatu pada Tongkonan dan ketika mereka meninggal dunia, mereka juga tetap bersatu di Liang (kuburan adat keluarga) yang biasa disebut Tongkonan Tongmerambu atau Tongkonan Tak berasap⁸³. Konsep persatuan dan gotong royong merupakan konsep ideal yang masih dipertahankan dengan kuat dalam masyarakat orang Toraja sampai dewasa ini.

Selanjutnya konsep budaya ideal berupa *sirik* terdapat pada suku bangsa Bugis, Makassar dan mandar. Konsep budaya *sirik* ini memberikan dampak aplikatif terhadap segenap tingkahlaku nyata bagi segenap pemangku budaya *sirik* tersebut. Tingkahlaku ini dapat diamati sebagai perwujudan kebudayaan dan konsep *sirik* ini merupakan inti kebudayaan orang Bugis, Makassar dan Mandar. Sebagai inti kebudayaan ia mengandung lima anasir (1) ade', (2) bicara, (3) warik, (4) rappang, dan (5) sarak. Kelima anasir ini disebut pangngadereng (Bugis) dan Pangngadakkang (Makassar) dan itulah yang menjadi sumber sekalian tingkahlaku dalam membangun seluruh aspek kebudayaan rohaniah dan kebudayaan fisik⁸⁴.

Lebih jauh *sirik* merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang anggota masyarakat Bugis, Makassar dan Mandar untuk pada suatu saat dalam hidupnya berbuat sesuatu yang sangat nekad dengan memilih mengorbankan milik hidupnya yang terakhir, yaitu "nyawa", yang kerap kali dikembalikan kepada konsep budaya *sirik*. Ia rela mengorbankan apa saja demi tegaknya *sirik*. Ini merupakan satu kesadaran tentang nilai "martabat" yang didukung oleh setiap orang dalam tradisi kehidupan orang Bugis, Makassar dan Mandar. Ia juga merupakan kesadaran kolektif yang sangat peka dan dibebankan kepada setiap orang anggota persekutuan hidup untuk membangunnya, mempertahankannya dan menegakkannya⁸⁵.

Dalam naskah (*Lontaraq*) Bugis-Makassar terdapat berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa *sirik* bukan semata-mata berpangkal

pada peluapan emosi. Pada persekutuan hidup, desa, wanua, ataupun tana, terdapat orang pertama tempat *sirik* itu harus dipelihara, dikembangkan dan dibela. Tiap-tiap anggota persekutuan yang dipimpinnya, merasa dirinya bersatu dengan pimpinannya, karena *sirik* yang dimiliki bersama. Antara pemimpin dan yang dipimpin terlihat oleh satu kesatuan martabat diri yang menimbulkan sikap *pesse* (Bugis) atau *pacce* (Makassar) yang dapat dinamakan solidaritas yang kuat⁸⁶.

Selain *sirik* sebagai sumber motivasi, *sirik* juga merupakan etos kebudayaan yang berperan sebagai dinamisator dalam hidup sautu kebudayaan. Setiap kebudayaan ada intinya yang memberi warna kepada tata kehidupan dalam persekutuan hidup kemasyarakatan. Dalam pengertian ini, *sirik* mengandung nilai-nilai universal. *Sirik* dimiliki oleh semua umat manusia yang membina kebudayaannya sepanjang sejarah kemanusiaan dan dengan penamaannya masing-masing. Akan tetapi aksentuasi pernyataan-pernyataan berbeda-beda pada setiap kebudayaan, ruang dan waktu⁸⁷,

Menurut Mattulada, *sirik* pada orng Bugis-Makassar, kalau itu benar masih potensial untuk dapat menemukan reorientasi dan transformasi ke dalam interpretasi yang dapat melengkapi etos kebudayaan nasional Pancasila, serta segenap unsur-unsurnya merupakan darah daging pribadi *sirik*, maka *sirik* itu niscaya dapat menjadi daya dorong yang

CATATAN

1. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hlm.33-34
2. Tjandrasasmita, *Ibid*, hlm. 39.
3. *Ibid*, hlm 73-74.
4. *Ibid*, hlm. 77-79
5. Mattulada, 1978. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Ujungpandang: Dep. Ilmu-ilmu Kemasyarakatan FISBUDBUNHAS, hlm. 150.
6. *Ibid*, hlm. 151.
7. B.J. Hoga 1981. *Lima Pahalaa, Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijakanaksanaan Pemerintah di Gorontalo*. Jakarta: Penerbit Jambatan, hlm. 5-7.
8. Anthony Reid, 1990. *The Fall of Mighty Makassar Dalam Sulawesi* oleh T.A Volkman dan I. Coldwell (eds). Singapore: Perihias editon, hlm. 32-34.
9. Mattulada, 1991. *Majalah Antropologi Indonesia* N0. 48. Jakarta, FISIP UI, hlm.139.
10. Daud Limbugau, 1989. *Perjalanan Sejarah Kota Maritim, Makassar Abad ke 19-20 Dalam Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* oleh Mukhlis (ed). Ujungpandang: UNHAS, hlm. 20.

11. Mukhlis, dkk. 1984/1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan. Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 76-78.
12. Mattulada, 1991. *Majalah Antropologi Indonesia* No.118, op.cit, hlm. 139-141
13. *Ibid*, hlm. 155-156.
14. B.J. Haga, 1981. *Lima ...Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijakan Pemerintah Gorontalo*. Jakarta: Penerbit Jambatan, hlm. 1-15.
15. Daud Limbugau, 1989. *Loc.cit*, hlm. 25.
16. *Ibid*. hlm. 26-28.
17. *Ibid*. hlm. 22-29.
18. Mukhlis, dkk. 1984/1985. *Loc.cit*, hlm. 78.
19. Mattulada, 1971. *Kebudayaan Bugis-Makassar Dalam Manusia dan Kebudayaan Indonesia* oleh Koentjaraningrat (ed). Jakarta: Penerbit Jambatan, hlm. 275.
20. Sarita Pawiloy dkk, 1980/1981. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, hlm. 28.
21. *Ibid*, hlm. 23.
22. *Ibid*, hlm. 25
23. *Ibid*, hlm. 29.
24. *Ibid*, hlm. 29.
25. Mattulada, 1983. *Islam di Sulawesi Selatan Dalam Agama dan Perubahan Sosial* oleh Taufik abdullah (ed). Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 249.
26. *Ibid*, hlm. 249-250.
27. Mattulada, 1991. *Majalah Antropologi Indonesia*, Loc,cit, hlm. 166-167.
28. Abu Hamid, 1983. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan Dalam Agama dan Perubahan Sosial* oleh Taufik Abdullah. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 3.

29. Mattulada, 1983. *op.cit*, hlm. 260-261.
30. *Ibid*, hlm. 265.
31. *Ibid*, hlm. 270.
32. *Ibid*, hlm. 272.
33. *Ibid*, hlm. 273.
34. I. Djamhur dan H. Dana Supata. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Penerbit CV. Ilmu, hlm. 131.
35. *Ibid*, hlm. 130-131.
36. *Ibid*, hlm. 131.
37. Mukhlis dkk, 1984/1985. *Loc.cit*, hlm. 99.
38. *Ibid*. hlm. 99.
39. *Ibid*, hlm. 100.
40. *Ibid*, hlm. 100.
41. *Ibid*, hlm. 100-101.
42. *Ibid*, hlm. 101.
43. *Ibid*, hlm.109.
44. *Ibid*, hlm.109.
45. A.Latif Masri, 1959. *Sosiografi Daerah Mandar*. Yogyakarta, hlm. 32.
46. Daud Limbugau, 1989. *Loc.cit*, hlm. 36-37.
47. Mukhlis dkk, 1984/1985. *Loc.cit*, hlm. 116.
48. N. Graafland, 1991. (1869). *Minahasa, Negeri, Rakyat dan Budayanya*. Jakarta: Grafiti, hlm. 300..
49. Mukhlis dkk, 1984/1985. *op.cit*, hlm. 125.
50. *Ibid*, hlm. 126.
51. *Ibid*, hlm. 128.
52. *Ibid*, hlm. 128.
53. *Ibid*, hlm. 128.
54. *Ibid*, hlm. 129.

55. *Ibid*, hlm. 135.
56. *Ibid*, hlm. 136.
57. *Ibid*, hlm. 136.
58. *Ibid*, hlm. 136.
59. *Ibid*, hlm 143.
60. *Ibid*, hlm. 147.
61. *Ibid*, hlm. 148.
62. *Ibid*, hlm. 150.
63. Kementrian Penerangan RI 1953, *Propinsi Sulawesi. Makassar*, hlm. 486-487.
64. *Ibid*, hlm. 486-489.
65. *Ibid*, hlm. 490-491.
66. *Ibid*, hlm. 495.
67. *Ibid*, hlm. 496.
68. Pawiloy dkk, 1980/1981. *Loc.cit*, hlm. 117.
69. *Op.cit*, hlm. 496.
70. Pawiloy dkk, 1980/1981, *op.cit*, hlm. 188.
71. *Ibid*, hlm. 188.
72. *Ibid*, hlm. 199.
73. *Ibid*, hlm. 119.
74. Soewondo, A. *Glance The Birth of University Hasanuddin*.
75. N. Graafland, 1991 (1869), *Loc.cit*, hlm. 42.
76. N.S. Kalangie, 1987. *Kebudayaan Minahasa Dalam Manusia dan Kebudayaan Indonesia* oleh Koentjanraninggrat (ed). Jakarta: Penerbit Jambatan, hlm.157.
77. *Ibid*, hlm. 157.
78. Kementrian Penerangan RI, 1953. *Loc.cit*, hlm. 59.
79. B.J. Haga. 1981. *Loc.cit*, hlm.74.

80. Mattulada, 1991. *Majalah Antropologi Indonesia* No. 48, Loc.cit, hlm. 158.
81. *Ibid*, hlm. 159.
83. L.T. Tangdilintin, 1974. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Ujungpandang: Kantor Cabang II, Lembaga Sejarah dan Antropologi, hlm. 97 dan 115.
84. Mattulada, 1991. *Majalah Antropologi Indonesia* No. 48, Loc.cit, hlm. 102-104.
85. *Ibid*, hlm. 104-105.
86. *Ibid*, hlm. 105.
87. *Ibid*, hlm. 107.
88. *Ibid*, hlm. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Kenneth R. Hall, *Maritime trade and state Development in Early South-east Asia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985.
- Th. Q. Th. Pigesud, *Java in the fourteenth century. A. Study in cultural history*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1960. Vol II)
- Anthony Reid, *The Rise of Makassar*, dalam RIMA, 1983, Vol. 17
- Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires*, London: Robert Maclehose & Co. 1994
- P.A. Tiele, 'De Eropean in den Maleischen Archipel', dalam: BKI, 1880, No. 28, vol. I.
- Ch. Pelras, *Sumber Kepustakaan Eropa Barat mengenai Sulawesi Selatan*, dalam Buku Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 1973.
- Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Mangemba, H. D *Kota Makassar dalam lintasan sejarah*, Makassar: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Unhas, 1972.
- W. Donald McTaggart, *Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia: Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan* dalam: Masyarakat Indonesia, 1976.

- G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *Sedjarah Gowa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara).
- F.W. Stapel, *Het Bongaais verdrag*, disertasi, Leiden: Rijksuniversiteit Laiden, 1939.
- J. Noorduyn, *De handelrelatie van het Makassarsche rijk volgens een notitie Cornelis Speelman uit 1670*", daalm: Nederlandsche Historische Bronnen (No. 3).
- J.C. van leur "*Mahan op den Indischen Lessenaar*", dalam: KT, Vol. XXX, 1941. Vol XXX.
- Poelinggomang, Edward L, *The Dutch Trade Policy and its impact on Makassar's trade*", dalam: RIMA, 1993. Vol. 22.
- Poelinggomang, Edward L, *Proteksi dan Perdagangan Bebas : Kajian Tentang Perdagangan Makassar pada abad ke-19*, Amsterdam : Centrale Huisdrukkrij VU, 1981.
- Lapian, Andrian B, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Kamaruddin, dkk, *Pengkajian (transliterasi dan terjemahan) Lontarag Bilang Raja Gowa dan Tallok*, Ujungpandang: Depdikbud, 1986.
- Lopa, Baharuddin, *Hukum Laut, Pelaayaran dan Peniagaan* (Penggalian dari Bumi Indonesia Sendiri), Bandung : Pernerbit Alumni, 1982.
- Patunru, Daeng, Razak, Abd, *Sejarah Gowa*, Ujungpandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983.
- Mattulada Latoa: *Suatu Lukisan analisis antropologi politik orang Bugis*, disertasi, Jakarta : Universitas Indonesia, 1975
- Poesponegoro, Marwati Djonet & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta Depdikbud, 1983.

- Mukhlis, *Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa Zaman Pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669)*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1975.
- Mukhlis, *Landasan Kulturasi dalam Pranata Sosial Bugis-Makassar dalam* : Mukhlis, ed. *Dinamika Bugis-Makassar*, Jakarta : P.T. Sinar Krida, 1986.
- Ph.O.L.Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Ujungpandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977.
- H.J.Friedericy, *Aantekeningen over adat en Adatrecht bij Binesche Pauwvaar dalam* : KT, tahun XX, 1931.
- L. van Voeren, *De Parauwvaar van Celebes dalam* : KS, tahun 1. 1917, No. 1.
- H.E.D. Kern, *Catalogus bij de Boeginesche tot den I Lagaligocyclus behoorende handschriften der Laidische Univesiteitsbibliotheek alsmede van de andere Euorpeesche bibliotheek*, Leiden : Univesiteitsbibliotheek, 1939.
- H.J.Friedericy, *De sraden bij de Boeginechen en Makasaren dalam* : BKI, 1933, No. 80.
- Adam, I, *Pemerintah di Minahasa* (terjemahan), Jakarta : Bharata, 1975.
- A.M.P.A. Scheltema *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- R.A. Kern, *I La Galigo*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
- Mukhlis & Edward L. Poelinggomang, *Batara Gowa, Messiannisme Dalam Gerakan di Tanah Makassar*, Ujungpandang : Toyota Foundation, 1985.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang, Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1988).
- Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, *Peristiwa Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1985.

- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud,
Sejarah Daerah Sulawesi Utara, Jakarta:
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan
Daerah Depdikbud, 1977/1978.
- E.S.De Klerck, *History of The Netherlands East Indies*, Amsterdam:
B.M. Israel N.V, 1975, Vol. II.
- Gongrijp, *Gorontalo* dalam KS, 1915.
- Adatrechtbundel III.
- Hamzah, Darwas, *Abdurrachiem Kamaluddin Pelopor Penganjur Agama
Islam di Daerah Mandar* dalam Panji
Masyarakat, 15 Februari 1976
- J. Nooduyn, *Islamisasi Makassar*, Jakarta : Bharata, 1971.
- Abdullah Taufik, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali.
1983.
- Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, *Peristiwa Tahun
tahun bersejarah Daerah Sulawesi Selatan
dari Abad ke XIV s/d XIX*, Ujungpandang:
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,
Depdikbud, 1988.
- Khusnul Yaqin Rachman, *Asal-Usul Sekh Yusuf Tajul Khalwati dan
Penyebaran Ajarannya di daerah Sulawesi
Selatan*, Makalah Seminar memperingati
Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional di
Unhas, 1993.
- Abdullah, Taufik, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Jakarta: Gadjah Mada
University Press, 1985.
- Th. van den End , *Ragi Carita I*, Sejarah Gereja di Indonesia 1500-1860,
Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1993.
- Rahman, Rahim H,A, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*,
Ujungpandang: Hasanuddin University Press,
1992.
- Poesponegoro, Marwati, Djonet & Nugroho Notosusanto, *Sejarah
Nasional Indonesia III*, Jakarta: Depdikbud,
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional).

- Zakaria J. Ngelow, *Kekristenan dan Nasionalisme, Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994.
- Mr. S.C. Graaf van Randwijk, *Oegstgeest, Kebijaksanaan Lembaga-lembaga Injil Yang bekarjasama 1897-1942*, Jakarta : PT. BKP. Gunung Mulia, 1989.
- Mukhlis dkk. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950*. Jakarta: Depdikbud, Ditjaranitra, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1084/1985.
- I. Djumhu dan Drs. H. Dana Suparta. *Sejarah Pendidikan Bandung*: Penerbit CV. Ilmu, 1926.
- FISIP. U.I. *Antropologi Indonesia*. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia, No. 48-Th. XV. Jan-April 1991, Jakarta: Jurusan Antropologi: FISIP.U.I
- Taufik Abdullah, ed. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1983
- N. Graaland. *Minahasa, Negeri Rakyat dan Budayanya*, Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Utama, Grafiti, 1991.
- Mukhlis, ed. *Presepsi Sejarah Kawasan Pantai*, Ujungpandang: P3MP UNHAS, 1989.
- Koentjaraningrat, ed. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan, 1987.
- Uka Tjanrasaamita (ed). *Sejarah Nasional Indonesia III* Jakarta: Depdikbud, Ditjaramitra, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1981/1982.
- Haga, B.J. *Lima Pahalaa, Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintah di Gorontalo*, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1981/1982.

Volkman, Toby-Alice and Ian Caldwell (eds). *Sulawesi, The Celebes, Indonesia Travel Guide*, 1990.

Mattulada. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*. Ujungpandang: Dep.Ilmu-ilmu Kemasyarakatan FISIBUD UNHAS. 1978.

Masri, A.W. *Sosiografi Daerah Mandar*, Yogyakarta: A.W. Masri, 1959.

Kementrian Penerangan Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi, Makassar: Jawatan Penerangan R.I.Propinsi Sulawesi, 1953.

Drs. Sarita Pawiloy, dkk. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*. Ujungpandang: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981.

Soewondo, *A Glance on The Birth of University Hasanuddin*.

L.T. Tangdilintin. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Kantor Cabang II, Lembaga Sejarah dan Antropologi. Ujungpandang, 1974.

